

## BAB 2

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah 47.995 km<sup>2</sup>, merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau tepatnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudra Hindia; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 90 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 10 persen. Secara administratif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.

Sementara itu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan.

**Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten				
01. Pacitan	12	5	166	171
02. Ponorogo	21	26	281	307
03. Trenggalek	14	5	152	157

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
		Kelurahan	Desa	Jumlah
04. Tulungagung	19	14	257	271
05. Blitar	22	28	220	248
06. Kediri	26	1	343	344
07. Malang	33	12	378	390
08. Lumajang	21	7	198	205
09. Jember	31	22	226	248
10. Banyuwangi	24	28	189	217
11. Bondowoso	23	10	209	219
12. Situbondo	17	4	132	136
13. Probolinggo	24	5	325	330
14. Pasuruan	24	24	341	365
15. Sidoarjo	18	31	322	353
16. Mojokerto	18	5	299	304
17. Jombang	21	4	302	306
18. Nganjuk	20	20	264	284
19. Madiun	15	8	198	206
20. Magetan	18	28	207	235
21. Ngawi	19	4	213	217
22. Bojonegoro	28	11	419	430
23. Tuban	20	17	311	328
24. Lamongan	27	12	462	474
25. Gresik	18	26	330	356
26. Bangkalan	18	8	273	281
27. Sampang	14	6	180	186
28. Pamekasan	13	11	178	189
29. Sumenep	27	4	330	334
<b>Kota</b>				
30. Kediri	3	46	0	46
31. Blitar	3	21	0	21
32. Malang	5	57	0	57
33. Probolinggo	5	29	0	29
34. Pasuruan	4	34	0	34
35. Mojokerto	2	18	0	18
36. Madiun	3	27	0	27
37. Surabaya	31	154	0	154
38. Batu	3	5	19	24
<b>Jumlah</b>	<b>664</b>	<b>777</b>	<b>7.724</b>	<b>8.501</b>

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015



### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

#### a. Posisi Astronomis

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara 111,0°-114,4° Bujur Timur dan 7,12°-8,48° Lintang Selatan.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55, total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber: Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

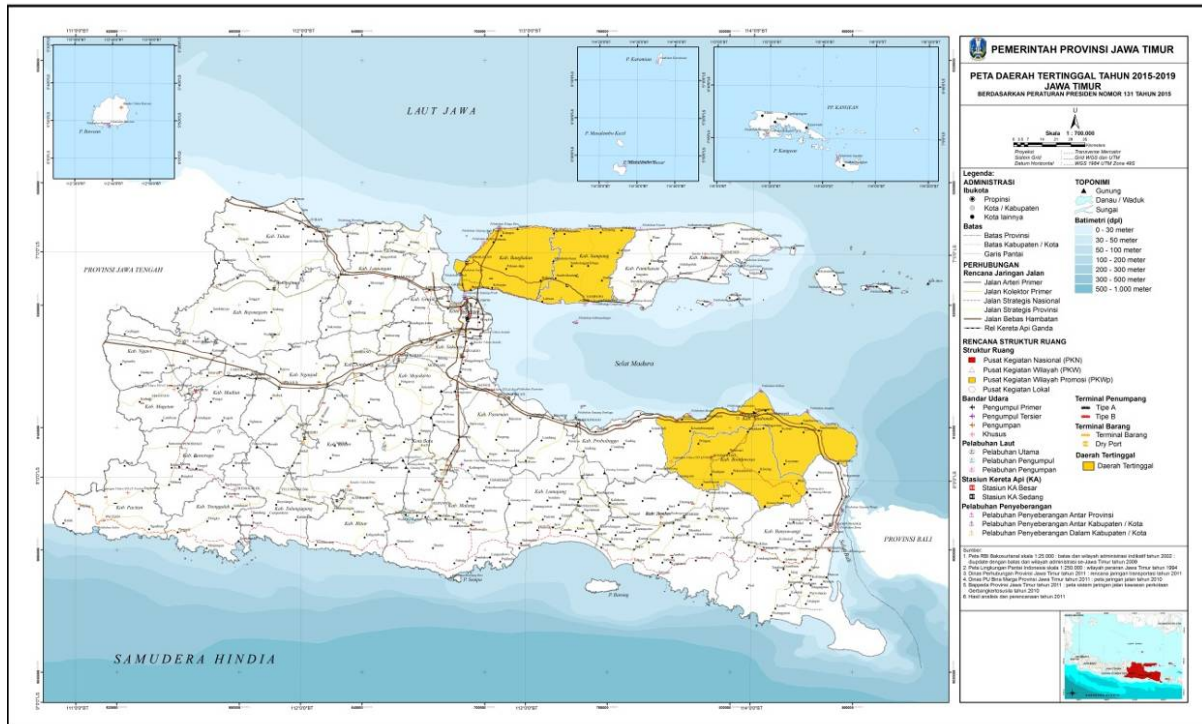
#### b. Kondisi Kawasan

##### Kondisi Daerah Tertinggal

Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibanding daerah lain dalam skala nasional. Penentuan daerah tertinggal menggunakan 6 (enam) kriteria dasar, yaitu: perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal mengamanatkan bahwa daerah tertinggal ditetapkan setiap lima tahun secara nasional dengan Peraturan Presiden berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, terdapat Empat Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yaitu: Kabupaten Sampang, Bangkalan, Situbondo dan Bondowoso merupakan

bagian dari 122 Kabupaten diidentifikasi mengalami ketertinggalan dibanding dengan wilayah lainnya secara nasional. Daerah Tertinggal rata-rata mempunyai keterbatasan infrastruktur & komunikasi, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta banyaknya sumberdaya yang belum dikelola secara optimal.



**Gambar 2.1 Peta Kawasan Tertinggal di Provinsi Jawa Timur**

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

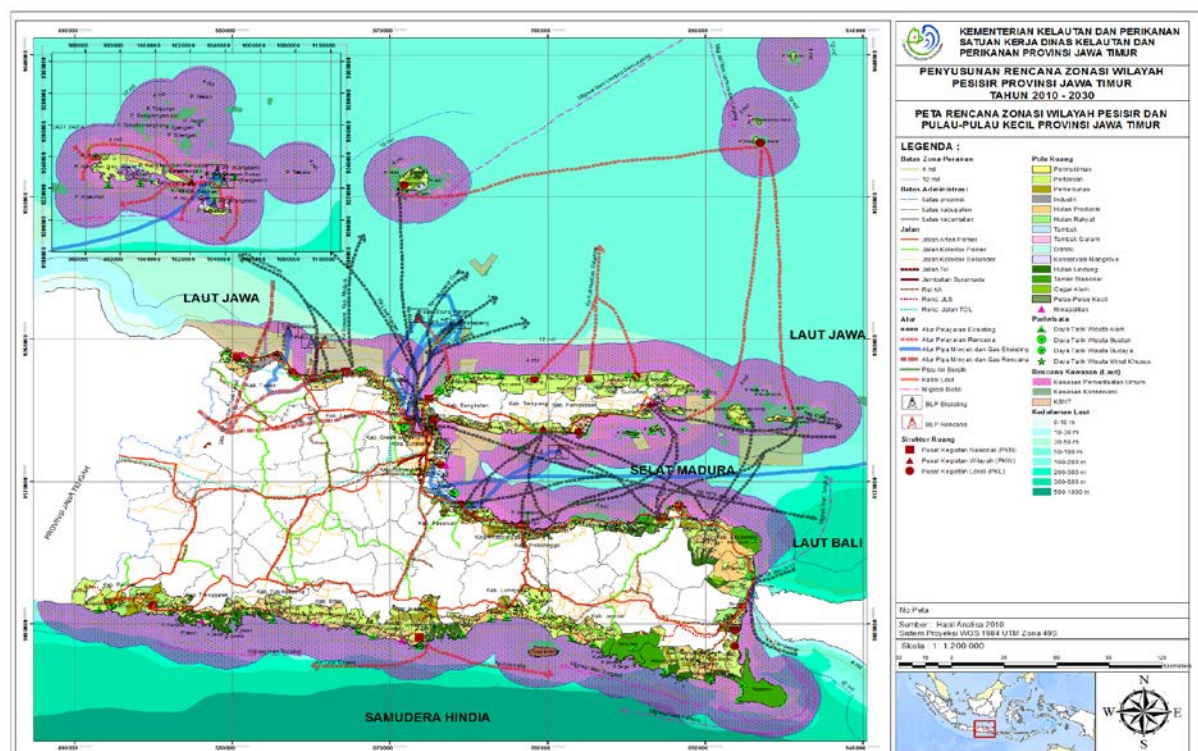
## Kondisi Kawasan Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut, seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat, seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Pesisir bagian utara, selatan dan laut di wilayah Provinsi Jawa Timur mempunyai hamparan hutan mangrove, padang lamun dan ekosistem terumbu karang yang harus dilestarikan. Ketiga ekosistem tersebut memiliki ciri, sifat dan karakter yang berbeda – beda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya.

Hubungan ketiga ekosistem tersebut adalah mutualistik yaitu di antaranya: mangrove menyediakan makanan/hara bagi padang lamun sedangkan padang lamun memecah/meredam gelombang dari lautan sehingga mangrove tumbuh dengan baik karena mangrove tidak tahan terhadap gelombang cukup besar.

Berdasarkan kondisi geografis, wilayah pesisir dan laut Jawa Timur ke arah daratan sebagian besar merupakan pegunungan dan perbukitan sehingga kemiringan wilayah pesisirnya relatif tinggi. Kemiringan rendah dijumpai pada sebagian kecil wilayah teluk dan lembah. Ke arah laut wilayah pesisir tersusun oleh pasir, tanah padas, batu dan karang dengan kemiringan yang relatif tajam.



**Gambar 2.2 Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RZWP3K Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032*

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 dimanfaatkan untuk wilayah pesisir bagian laut menjadi Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Sedangkan untuk wilayah pesisir bagian darat arahan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan RTRW Kab/Kota yang berlaku.



## Kondisi Kawasan Pegunungan

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang, Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, Gunung Raung.

## Kondisi Kawasan Kepulauan

Pulau-pulau kecil di Jawa Timur sebanyak 445 buah pulau berada dalam wilayah administrative, dan tersebar di Kabupaten Pacitan (31 pulau), Kabupaten Tulungagung (19 pulau), Kabupaten Blitar (28 pulau), Kabupaten Malang (100 pulau), Kabupaten Situbondo (5 pulau), Kabupaten Sumenep (121 pulau), Kabupaten Gresik (13 pulau), Kabupaten Sampang (1 pulau), Kabupaten Trenggalek (57 pulau), Kabupaten Sidoarjo (4 pulau), Kabupaten Banyuwangi (15 pulau), Kabupaten Jember (50 pulau), dan Kabupaten Probolinggo (1 pulau). Dari beberapa wilayah tersebut kawasan yang memiliki pulau terbanyak adalah Kabupaten Sumenep.

### 2.1.1.3 Topografi

#### A. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15 % yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar berada pada kawasan Jawa Timur Bagian Selatan.



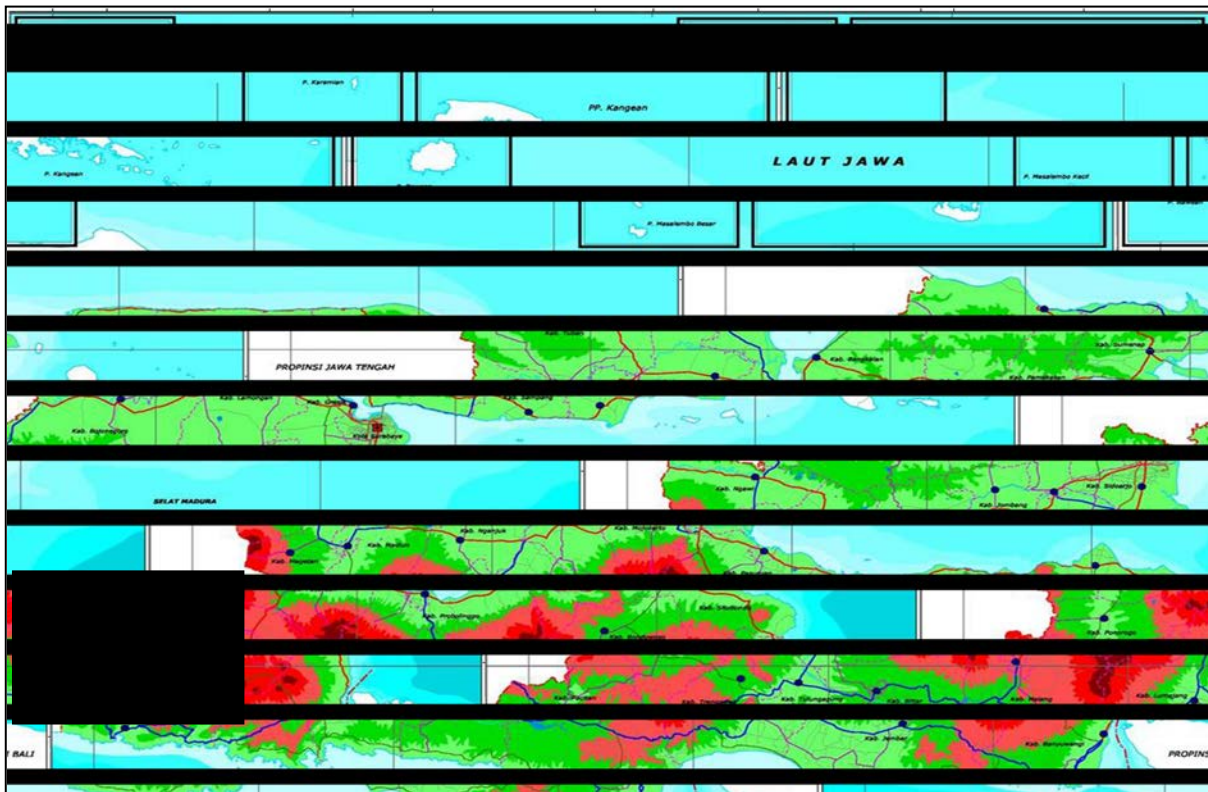
**Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

## B. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut: meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.



**Gambar 2.4 Peta Ketinggian Lahan**  
*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

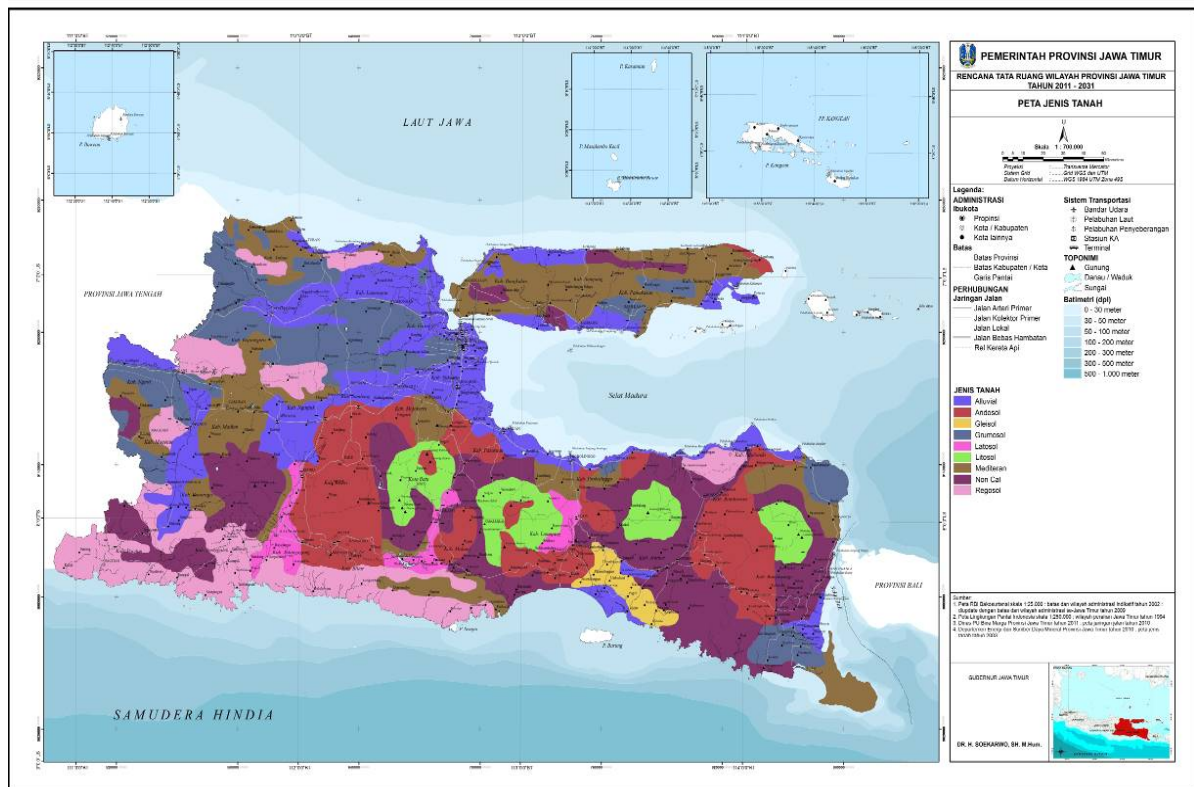
#### 2.1.1.4 Geologi

### a. Struktur dan Karakteristik

Secara umum wilayah Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Plioson, Miosen, dan Kwartar yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 % luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 %, sekitar 65,49 % dari luas wilayah yaitu dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.







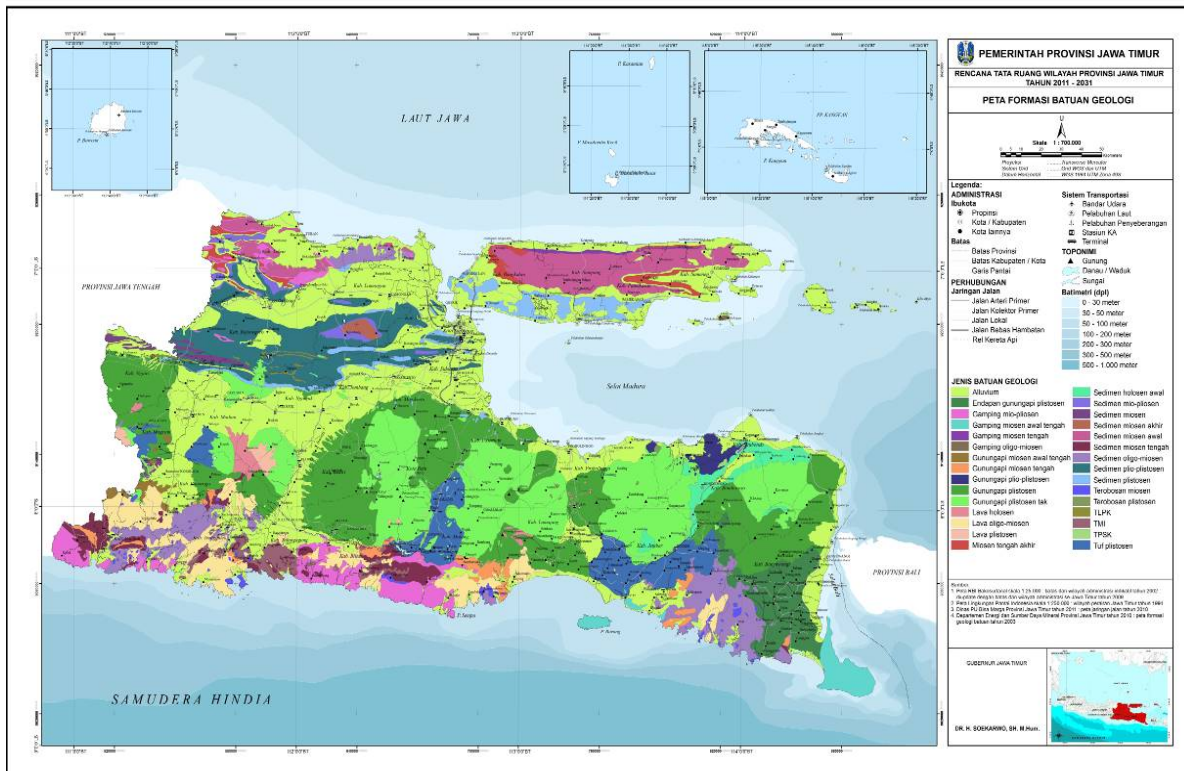
**Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

## b. Potensi Kandungan

Kondisi geologi Jawa Timur yang cukup kaya potensi sumberdaya mineral, memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu:

- Lajur Rembang terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
- Lajur Kendeng terbentuk batu lempung dan batupasir, potensi lempung, bentonit, gamping;
- Lajur Gunung Api Tengah terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter, potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf; dan
- Lajur Pegunungan Selatan terbentuk oleh batu gamping dengan intrusi batuan beku dan aliran lava yang mengalami tekanan, potensi mineral logam, marmer, onyx, batu gamping, bentonit, pospat.



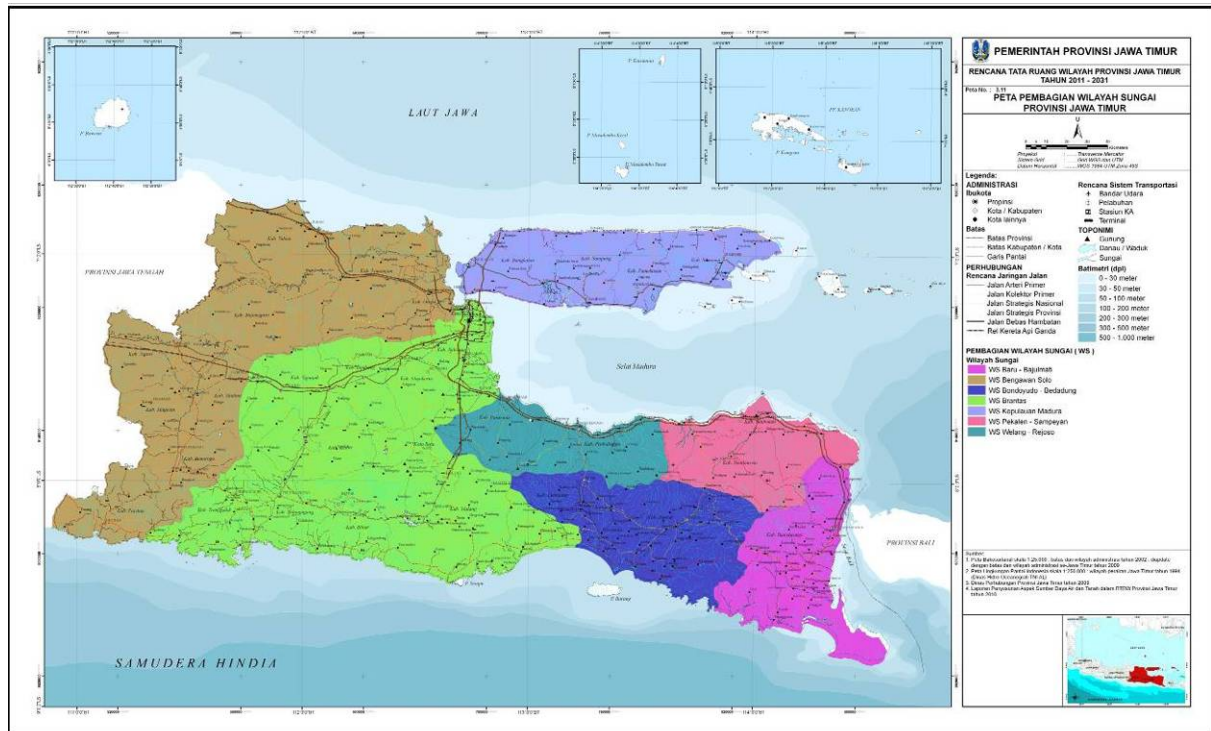
### Gambar 2.6 Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

### 2.1.1.5 Hidrologi

Provinsi Jawa Timur dialiri oleh dua daerah aliran sungai terpenting yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dan DAS Bengawan Solo. DAS Brantas merupakan sebuah sungai terbesar di Jawa Timur dengan panjang  $\pm$  320 km yang mengalir secara melingkar dan di tengah-tengahnya terdapat gunung berapi yang masih aktif yaitu Gunung Kelud. Sungai Brantas yang bersumber pada lereng Gunung Arjuno, mula-mula mengalir ke arah timur melalui kota Malang, lalu membelok ke arah selatan. Di kota Kepanjen Kali Brantas membelok ke arah barat dan di sini Kali Lesti yang bersumber dari Gunung Semeru bersatu dengan Kali Brantas. Setelah itu bersatu dengan Kali Ngrowo di Tulungagung, Kali Brantas berbelok ke utara melalui kota Kediri. Di kota Kertosono, Kali Brantas bertemu dengan Kali Widas, kemudian ke Timur mengalir ke kota Mojokerto. Di kota ini Kali Brantas bercabang dua, ke arah Surabaya dan ke Porong yang selanjutnya bermuara di Selat Madura.





**Gambar 2.7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

Secara hidrologi wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan meliputi Wilayah Sungai (WS), dan Waduk, sedangkan air tanah berupa mata air. Pembagian WS di Jawa Timur meliputi tujuh WS yaitu WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang – Rejoso, WS Pekalen – Sampean, WS Baru – Bajulmati, WS Bondoyudo – Bedadung, dan WS Madura.

**Tabel 2.2 Luas Catchment Area (km<sup>2</sup>) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur**

No	Wilayah Sungai	Luas (km <sup>2</sup> )	Jumlah DAS
1	Bengawan Solo	13.070,00	94 DAS
2	Brantas	13.880,00	20 DAS
3	Welang – Rejoso	2.601,00	36 DAS
4	Pekalen – Sampean	3.953,00	56 DAS
5	Baru – Bajulmati	3.675,00	60 DAS
6	Bondoyudo – Bedadung	5.364,00	47 DAS
7	Madura	4.575,00	173 DAS

*Sumber : Pengairan dalam Angka*

Luas catchment area tertinggi di Provinsi Jawa Timur berada pada Wilayah Sungai Brantas dengan luas 13.880 km<sup>2</sup> dan terendah di Wilayah Sungai Welang – Rejoso dengan luas 2.601 km<sup>2</sup>. Catchment area ini berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan baik ke danau,

sungai maupun ke laut, sehingga menciptakan suatu ekosistem, catchment area ini erat kaitannya dengan Daerah Aliran Sungai (DAS).

### 2.1.1.6 Klimatologi

Keadaan iklim di Jawa Timur secara umum sama dengan provinsi lain di tanah air, yaitu termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Oktober) dan musim Penghujan (Nopember-sampai sekitar bulan April). Curah hujan rata-rata antara 1.500 mm/tahun - 2.700 mm/tahun Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Suhu rata-rata kisaran minimum 15,2 derajat celcius dan maksimal 34,2 derajat celcius. Berdasarkan sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson sebagian besar wilayah (52%) mempunyai iklim tipe D. Kelembaban udara berkisar 40% hingga 97%.

**Tabel 2.3 Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2015**

Bulan	Suhu Udara			Kelembaban Udara			Curah Hujan	Tekanan Udara		Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata		Maks	Min		
01. Januari	33,40	22,20	27,50	99	43	81	464,70	1 014,20	1 007,80	8,30	54
02. Februari	33,40	22,40	27,30	97	55	83	437,40	1 012,70	1 008,80	7,00	66
03. Maret	33,40	22,40	27,80	97	55	82	479,80	1 013,50	1 009,60	7,00	61
04. April	33,60	23,70	27,90	97	55	83	259,20	1 012,40	1 008,10	6,60	61
05. Mei	32,40	22,70	28,20	97	51	77	181,60	1 014,00	1 010,00	6,80	87
06. Juni	32,80	21,80	27,70	92	47	73	-	1 016,10	1 009,40	6,70	93
07. Juli	31,80	21,00	26,90	92	45	74	1,60	1 015,40	1 010,60	8,00	94
08. Agustus	32,50	20,80	26,90	88	37	72	17,90	1 014,70	1 010,50	8,20	96
09. September	33,60	20,50	26,60	85	40	68	-	1 015,50	1 011,60	8,30	99
10. Oktober	34,80	22,80	28,70	86	38	66	-	1 015,50	1 011,80	9,00	99
11. November	35,60	24,60	30,50	90	38	68	52,60	1 012,00	1 009,30	7,00	89
12. Desember	35,40	23,60	28,90	92	47	77	129,90	1 013,20	1 008,40	7,50	62

Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda

Suhu udara rata-rata berkisar 27–31 C<sup>0</sup>. Tetapi ada wilayah yang mempunyai suhu agak panas berkisar 31–35 C<sup>0</sup> dan mempunyai suhu sejuk antara 20–25 C<sup>0</sup> Daerah panas umumnya di daratan rendah dan pesisir, sedangkan daerah yang bersuhu sejuk umumnya di daerah dataran tinggi. Kelembaban udara rata-rata selama tahun 2015 antara 66–83 persen maksimal kelembaban udara bias mencapai 99 persen, sedangkan terendah bias mencapai 37 persen.



Rata-rata kecepatan angin di Jawa Timur berkisar 6,6–9 knot dan bulan Juli–Maret kecepatan angin diatas 7 knot. Sedangkan di bulan April–Juni di bawah 7 knot. Kecepatan angin tertinggi terjadi bulan Oktober. Rata-rata lama penyinaran matahari terendah di bulan Desember–Maret di bawah 70 persen. Sedangkan bulan lainnya di atas 85 persen. Penyinaran matahari terbanyak bulan September dan Oktober atau sebesar 99 persen. Sedangkan terendah di bulan Januari hanya sebesar 54 persen. Rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2015 terjadi di bulan Januari–Mei. Tertinggi di Maret atau sebesar 479,8 mm, Terendah di bulan Juni–September.

Rata-rata jumlah hari hujan di bulan Januari–April lebih dari 20 hari. Terbanyak di bulan Pebruari 25 hari. Curah hujan pada bulan Mei sebesar 181,6 mm, tetapi jumlah hari hujan hanya 12 hari. Kondisi ini juga terjadi di bulan Desember, curah hujan 129,9 mm, tetapi hari hujan hanya 17 hari. Kemarau terasa di bulan Juni hingga Nopemver 2015. Selama periode itu curah hujan sangat mudah di bawah 20 mm, dan jumlah hari hujan sangat sedikit di bawah 5 hari per bulannya.

#### **2.1.1.7 Penggunaan Lahan**

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

##### **a. Kawasan Budidaya**

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90% dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis.



**Tabel 2.4 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur**

No	Penggunaan Lahan	Eksisting (Ha)	Prosentase (%)
A	Kawasan Lindung	578.571,30	12,11
1	Hutan Lindung	344.742,00	7,21
2	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,30	4,9
	a. Suaka Margasatwa	18.009,00	0,38
	b. Cagar Alam	10.958,00	0,23
	c. Taman Nasional	176.696,00	3,7
	d. Taman Hutan Raya	27.868,30	0,58
	e. Taman Wisata Alam	298	0,01
B	Kawasan Budidaya	4.201.403,70	87,89
1	Kawasan Hutan Produksi	782.772,00	16,38
2	Kawasan Hutan Rakyat	361.570,30	7,56
3	Kawasan Pertanian	2.020.490,71	42,27
	a. Pertanian Lahan Basah	911.863,00	19,08
	b. Pertanian Lahan Kering/ Tegalan/Kebun Campur	1.108.627,71	23,19
4	Kawasan Perkebunan	359.481,00	7,52
5	Kawasan Industri	7.403,80	0,15
6	Kawasan Pemukiman	595.255,00	12,45
7	Lainnya	74.430,89	1,56
<b>Total</b>		<b>4.779.975,00</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

### **b. Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 Ha atau sekitar 12,10% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 Ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 Ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 Ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 Ha serta taman wisata alam seluas ± 298 Ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-II/2011).



**Gambar 2.8 Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

## 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

### 2.1.2.1 Potensi Pertanian

Potensi Pertanian Berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Luas eksisting kawasan pertanian sebesar 2.020.491,71 ha dengan rincian pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha.

Berdasarkan hasil identifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, luasan lahan pertanian di Jawa Timur sebesar 1.438.588,11 ha dengan rincian sebagaimana tertera pada Tabel 2.5.

**Tabel 2.5 Luasan Lahan Pertanian di Jawa Timur**

NO	KABUPATEN	EKSISTING (ha)		NO	KABUPATEN	EKSISTING (ha)	
		IRIGASI	NON-IRIGASI			IRIGASI	NON-IRIGASI
1	Pacitan	6.702,00	6.331,00	20	Magetan	27.272,00	1.198,00
2	Ponorogo	33.050,00	1.750,00	21	Ngawi	44.648,00	3.787,00
3	Trenggalek	10.767,00	6.727,00	22	Bojonegoro	43.926,42	32.921,00
4	Tulungagung	24.343,00	9.896,00	23	Tuban	18.771,00	38.414,44
5	Blitar	30.520,00	1.205,00	24	Lamongan	45.841,00	33.479,00

NO	KABUPATEN	EKSISTING (ha)		NO	KABUPATEN	EKSISTING (ha)	
		IRIGASI	NON-IRIGASI			IRIGASI	NON-IRIGASI
6	Kediri	45.405,00	1.901,00	25	Gresik	10.346,00	-
7	Malang	33.110,30	12.777,93	26	Bangkalan	7.974,00	21.239,00
8	Lumajang	35.723,00	270,00	27	Sampang	5.031,00	72.423,74
9	Jember	84.458,00	87.474,00	28	Pamekasan	6.232,00	25.501,00
10	Banyuwangi	65.527,00	465,00	29	Sumenep	9.208,00	16.765,00
11	Bondowoso	33.264,00	34.711,00	30	Kota Kediri	3.100,00	-
12	Situbondo	32.023,00	1.616,00	31	Kota Blitar	1.156,22	138,00
13	Probolinggo	43.358,00	57.661,00	32	Kota Malang	-	-
14	Pasuruan	29.413,21	26.595,51	33	Kota Probolinggo	1.854,00	744,27
15	Sidoarjo	13.544,07	-	34	Kota Pasuruan	1.158,00	-
16	Mojokerto	31.976,00	5.150,00	35	Kota Mojokerto	586,00	45,00
17	Jombang	44.082,00	15.451,00	36	Kota Madiun	1.098,00	-
18	Nganjuk	38.641,00	22.472,00	37	Kota Surabaya	-	-
19	Madiun	30.534,14	2.350,86	38	Kota Batu	2.486,00	-
<b>TOTAL JATIM</b>						<b>897.128,36</b>	<b>541.459,75</b>

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur dan Rtrw Kab/Kota se Jawa Timur

Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03% dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis tersebar di masing-masing wilayah sungai.

Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76% dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan. Berdasarkan hal tersebut Provinsi Jawa Timur menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215.191.83 Ha.



**Gambar 2.9 Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

#### 2.1.2.2 Potensi Perkebunan

Kawasan perkebunan di Jawa Timur dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti: tebu, tembakau, kapas, serat karung dan wijen dan perkebunan tanaman semusim antara lain berupa: kelapa, kopi, kakao, cengkeh, jambu mete, cabe jamu, kapok randu, teh, kenanga, panili, lada, kemiri, jarak kepyar, jarak pagar, siwalan, serat nanas, pinang, kayu manis, asam jawa, aren, mendong, janggolan, nilam, pandan, nipah, pala, melinjo, karet, dsb.



**Gambar 2.10 Peta Peruntukan Perkebunan Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

### 2.1.2.3 Potensi Kehutanan

Kawasan hutan budidaya dibedakan menjadi hutan produksi dan hutan rakyat. Hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang secara ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman. Sedangkan hutan rakyat dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan iklim makro, memenuhi kebutuhan akan hasil hutan dan berada pada lahan-lahan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat.





**Gambar 2.11 Peta Peruntukan Hutan Produksi Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

#### 2.1.2.4 Potensi Perikanan

Potensi Perikanan di Jawa Timur pada dasarnya adalah pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengelolaan serta pemasaran hasil perikanan yang dikemas dalam sebuah sistem minapolitan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap memiliki prospek yang bagus, didukung oleh pengembangan pelabuhan perikanan Brondong yang terletak di Pantai Utara, pengembangan pelabuhan perikanan Muncar di Kabupaten Banyuwangi, dan Prigi di Kabupaten Trenggalek.

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air tawar, dan perikanan budidaya air laut. Sektor perikanan budidaya air payau berada pada kawasan Ujung Pangkah dan Panceng di Kabupaten Gresik, serta Sedati di Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas ikan bandeng dan garam. Sedangkan potensi garam yang merupakan salah satu potensi budidaya air payau berada pada Kabupaten Bangkalan, Gresik, Lamongan, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, serta Kota Pasuruan, dan Surabaya.

Perikanan budidaya air tawar berada pada Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Magetan, Malang, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Jember, dan Banyuwangi. Perikanan budidaya air laut tersebar pada wilayah pesisir seperti adanya sentra pengembangan ikan laut di bagian pantai utara Jawa Timur.



**Gambar 2.12 Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

#### **2.1.2.4.1. Produksi Perikanan**

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina padi, karamba, dan japung. Produksi perikanan pada tahun 2009 mencapai 914,09 ribu ton, tahun 2010 meningkat sebesar 21,80 persen menjadi 1.113,39 ribu ton, tahun 2011 meningkat sebesar 9,48 persen menjadi 1.218,90 ribu ton, dan pada tahun 2012 meningkat lagi sebesar 7,55 persen menjadi 1.310,98 ribu ton, trend peningkatan juga terjadi pada tiga tahun terakhir, tahun 2013 meningkat sebesar 6,10 persen menjadi 1.391,01 ribu ton, sedangkan pada dua tahun terakhir persentase peningkatannya tidak cukup signifikan dibanding

tahun 2013. Tahun 2014 meningkat hanya sebesar 3,76 persen menjadi 1.443,26 ribu ton, dan tahun 2015 meningkat sebesar 3,86 persen menjadi 1.498,99 ribu ton.

**Tabel 2.6 Produksi Perikanan (Ton) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan (Ton)	1.218.897,8	1.310.976,6	1.391.009,5	1.443.257,8	1.498.987,7

*Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur*

Share perikanan tangkap dibanding share Budidaya semakin menurun per tahunnya dalam perkembangan produksi perikanan di Jawa Timur tahun 2009-2015. Tahun 2009 produksi perikanan tangkap mencapai 407,58 ribu ton atau mencapai 44,59 persen sedangkan produksi Budidaya mencapai 506,51 ribu ton (55,41 persen) terhadap total produksi perikanan. Kemudian share produksi perikanan tangkap turun lagi menjadi 31,68 persen (352,78 ribu ton) pada tahun 2010, kemudian turun lagi menjadi 30,83 persen (375,82 ribu ton) pada tahun 2011, kemudian turun lagi menjadi 29,12 persen (381,80 ribu ton) pada tahun 2012. Share penurunan produksi perikanan tangkap pada tiga tahun terakhir juga terus berlanjut, pada tahun 2013 share-nya hanya sebesar 28,40 persen (395,05 ribu ton), tahun 2014 share-nya menjadi 27,67 persen (399,37 ribu ton), dan di tahun 2015 share-nya relatif statis hanya 27,08 persen (405,86 ribu ton). Meskipun tiap tahun produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan tapi laju kenaikan produksi kalah cepat daripada laju kenaikan produksi Budidaya ikan.

#### **2.1.2.4.2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini kontribusinya terhadap produksi perikanan total juga semakin menurun. Pada tahun 2009 produksinya mencapai 43,27 persen, tahun 2010 kontribusinya turun menjadi 30,44 persen, tahun 2011 kontribusinya hanya 29,75 persen, tahun 2012 turun lagi kontribusinya sebesar 28,06 persen. Pada tiga tahun terakhir kontribusinya terus menurun, pada tahun 2013 kontribusinya hanya 27,43 persen, tahun 2014 dan 2015 kontribusinya hampir tidak ada perubahan sebesar 26,74 persen dan 26,41 persen.

**Tabel 2.7 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	362.621,6	367.921,1	381.573,9	385.878,4	395.930

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Meskipun mengalami kenaikan volume produksi perikanan laut dalam 4 tahun terakhir (2012-2015) tetapi kenaikannya masih di bawah kenaikan volume produksi di tahun 2010. Tahun 2012 volume naik sebesar 1,46 persen, tahun 2013 volume naik sebesar 3,71 persen, tahun 2014 volume naik sebesar 1,13 persen, tahun 2015 volume naik sebesar 2,60 persen, sedangkan di tahun 2010 volume naik sebesar 6,99 persen. Hal ini dapat menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan tradisional dan keluarganya dalam 4 tahun terakhir masih sangat jauh dari harapan. Peranan dan dukungan Pemerintah sangat diharapkan oleh nelayan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan yang lebih sejahtera dengan lebih serius mengelola sumber daya laut yang cukup potensial yang membentang luas di pesisir pantai Provinsi Jawa Timur.

#### 2.1.2.4.3. Konsumsi Ikan

Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung berbagai macam zat nutrisi. Ikan menurut perairan tempat hidupnya terdiri dari ikan air tawar dan ikan laut. Keduanya adalah makanan sumber protein yang sangat penting untuk pertumbuhan tubuh. Sebagai bahan pangan, ikan merupakan sumber protein, lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan prospektif. Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan kemudahannya untuk dicerna.

**Tabel 2.8 Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th)	20,20	23,10	24,30	27,70	30,20

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

Perkembangan konsumsi ikan di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan dari 20,20 Kg/Kapita/Th (2011) menjadi 30,20 Kg/Kapita/Th (2015). Peningkatan ini merupakan wujud kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan terhadap perkembangan otak. Ibu yang mengonsumsi ikan secara teratur selama masa kehamilan, mempunyai anak yang memiliki skor tes inteligensi yang lebih tinggi dibanding dengan teman sebayanya yang lain. Selain itu, orang tua yang telah mengonsumsi ikan dalam waktu lama mempunyai risiko yang lebih rendah mengalami penurunan fungsi kognitif.

#### **2.1.2.5 Potensi Pertambangan**

Kawasan peruntukan pertambangan di wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral, pertambangan minyak dan gas bumi dan kawasan potensi daerah panas bumi.

##### **a. Pertambangan Mineral**

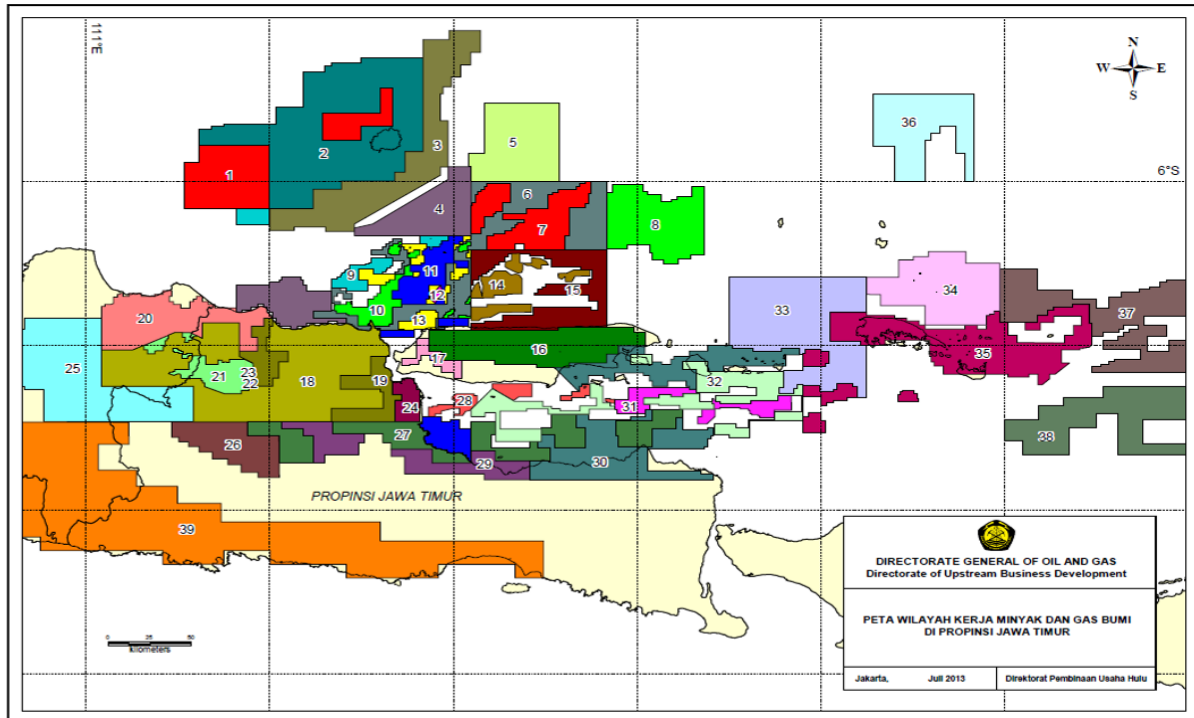
Pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi kawasan pertambangan mineral logam, mineral non logam dan batuan, diantaranya :

- Kawasan pertambangan mineral logam berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Blitar, Jember, Lumajang, Malang, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung. Adapun potensi pertambangan mineral logam yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah Pasir Besi, Emas dan Mineral Pengikutnya, dan Mangan. Beberapa di antaranya sudah teridentifikasi, seperti di Kabupaten Pacitan diketahui terdapat potensi Pasir Besi sebesar kurang lebih 24.948.189 ton yang berada di Kecamatan Ngadirejo.
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur. Potensi pertambangan mineral bukan logam yang sejauh ini dianggap potensial meliputi: Bentonite, Phiropilit, Feldspar, Zeolit, Feldspar, Kaolin, Phiropilit, Toseki, Pasir/Sirtu, dan Pasir Kwarsa yang tersebar di berbagai kabupaten di Jawa Timur.
- Kawasan pertambangan batuan tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Jawa Timur, terutama pada wilayah sekitar gunung api. yaitu batuan gamping, andesit, trass, marmer, tanah liat, tanah urug, opal, kalsedon, diorit, pasir, sirtu,



onyx, toseki, breksi, jasper dan tuff. Sedangkan untuk potensi Potensi batubara tersebar di tiga kabupaten yaitu Trenggalek, Pacitan dan Tulungagung.

#### b. Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi



**Gambar 2.13 Peta Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

#### c. Potensi Panas Bumi atau Geothermal

Sumber energi yang relatif ramah lingkungan karena berasal dari panas dalam bumi. Pemanfaatan energi panas bumi diyakini menjadi salah satu sumber energi alternatif. Potensi panas bumi di Wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada lokasi yang berdekatan dengan gunung api aktif.

**Tabel 2.9 Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur**

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
1	Gunung Lawu	195	Kab. Karanganyar, Sragen, Wonogiri (Prov. Jawa Tengah), Kab. Ngawi, Magetan (Prov. Jawa Timur) kewenangan Pusat	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2518 K/30/MEM/2014 13 Agustus 2012 Lelang oleh Pemerintah Pusat

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
2	Arjosari	18,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
3	Melati	13,5	Kab. Pacitan	Survei Rekonais Ttahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
4	Ngebel - Wilis	165	Kab. Ponorogo dan Kab. Madiun	Eksplorasi Ijin Usah Pertambangan (IUP) 188/63/KPTS/119.3/2011 16 Juni 2011 PT. Medco Cahaya Geothermal
5	Gunung Wilis	50	Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, Kab. Tulungagung dan Kab. Trenggalek	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2775 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
6	Gunung Pandan	60	Kab. Madiun dan Kab. Bojonegoro	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2774 K/30/MEM/2014 3 Juni 2014
	Songgoriti	35	Kota Batu dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2776 K/30/MEM/2014 2 Juni 2014
8	Arjuno - Welirang	185	Kab. Mojokerto, Kab. Pasuruan dan Kab. Malang	Telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) 2773K/30/MEM/ 2014 (3 Juni 2014)
9	Bromo - Tengger	-	Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Malang dan Kota Malang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) 2903 K/30/MEM/2013 30 Juli 2013 PT. Hitay Renewable Energy
10	Krucil-Tiris	147	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Penugasan Survey Pendahuluan (PSP) PT. Hitay Rawas Energy
11	Iyang - Argopuro	295	Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 1521K/034/M.PE/1990 30 Oktober 1990 PT. Pertamina Geothermal Energy
12	Gunung Raung	-	Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten	Pelaksanaan Survey Pendahuluan Panasbumi (PSP) PT. Hitay Runcing Energy

No.	Lapangan	Potensi (MWE)	Kabupaten / Kota	Keterangan
			Banyuwangi	
13	Blawan - Ijen	110	Kab. Bondowoso, Kab. Banyuwangi dan Kab. Situbondo	Eksplorasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) 188/62/KPTS/119.3/2011 25 Mei 2011 PT. Bakrie Dharmakarya Energy
14	Pulau Bawean	14,5	Kabupaten Gresik	Survei Rekonais Tahun 2013, Dinas ESDM Jawa Timur
15	Gunung Kelud	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Blitar dan Kediri	Terdapat Sumber air panas yang diduga berasal dari kawah Gunung Kelud
16	Parengan – Kec. Rengel	Potensi yang belum teridentifikasi	Kabupaten Tuban	Terdapat sumber air panas: 1. Dsn. Nganget Ds. Kedungjambe Kec. Singgahan T = 46,6 °C pH = 6,9 2. Dsn. Prataan Ds. Wukiharjo Kec. Parengan T = 43,8 °C pH = 6,99

Sumber : Dinas ESDM Prov Jawa Timur

### 2.1.2.6 Potensi Industri

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Jawa Timur meliputi: kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri, dan sentra industri. Untuk mendorong pertumbuhan wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pada dasarnya setiap daerah akan dikembangkan kawasan industri. Area industrialisasi di Jawa Timur masih terbuka bagi investor, kondisi tersebut dapat ditunjukkan adanya kawasan industri yang berkembang di wilayah pantura dan wilayah selatan Jawa Timur. Sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan adalah industri perikanan, industri manufaktur, industri pertambangan.

Pengembangan kawasan industri didasarkan pada kecenderungan perkembangan lokasi kawasan industri di Jawa Timur saat ini dan potensi kawasan. Pengembangan kawasan industri skala besar yang berdampak penting terhadap perkembangan wilayah dalam arti berhubungan dengan pangsa pasar ekspor saat ini dikonsentrasikan di sekitar pantai utara Jawa, mulai dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo pada kawasan Gerbangkertosusila. Industri kimia dasar berdampak penting terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah, seperti industri semen,

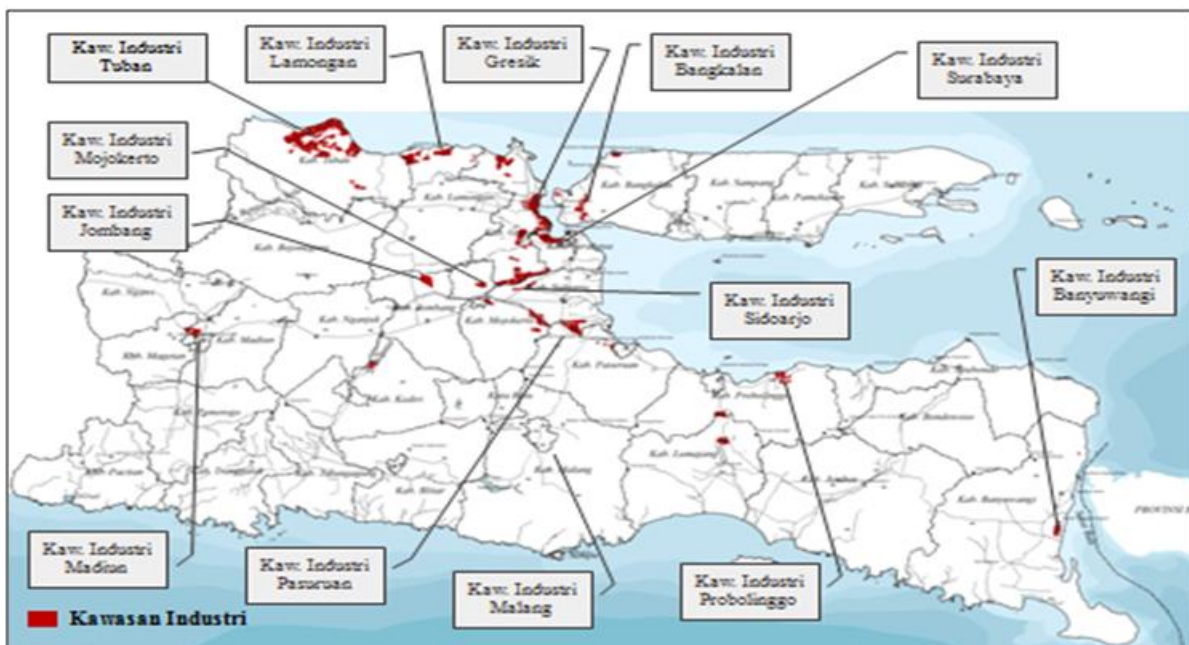
farmasi, bahan makanan, serta petro kimia dapat dikonsentrasikan di Surabaya, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, dan Lamongan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031, kawasan Industri direncanakan seluas 12.448,026 Ha. Kawasan industri besar diarahkan di sepanjang jalan arteri primer dan kolektor primer di Provinsi Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, Kawasan Industri yang sudah terbangun dan beroperasi berada di Kabupaten Gresik (PT. Maspion Industrial Estate, PT. Kawasan Industri Gresik, PT. Java Integrated Industrial Ports Estate/JIPE), Kota Surabaya (PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut), Kabupaten Sidoarjo (PT. Sidoarjo Industrial Estate Berbek), Kabupaten Mojokerto (PT. Ngoro Industrial Park) dan Kabupaten Pasuruan (PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang).

Pembangunan Kawasan Industri masih akan terus berkembang, hal ini ditandai dengan adanya usulan pembangunan Kawasan Industri di beberapa Kabupaten/Kota ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur diantaranya Kawasan Industri Agroindustri Gresik Utara dan Kawasan Industri Salt Lake di Kabupaten Gresik, Kawasan Industrial Ploso di Kabupaten Jombang, Pengembangan PT. Kawasan Industri Gresik di Kabupaten Tuban, Kawasan Industri Malang di Kota Malang, Kawasan Industri Maritim di Kabupaten Lamongan, Kawasan Industri Wongsorejo, Kampe Industrial Estate, Kawasan Industri Sidomulyo, Kawasan Industri Wangkal, dan Kawasan Industri Secang di Kabupaten Banyuwangi, Kawasan Industri Mojokerto di Kabupaten Mojokerto, Madura Industrial Seaport City di Kabupaten Bangkalan, serta Kawasan Industri Mejayan di Kabupaten Madiun.

Potensi pengembangan kawasan industri baru di Jawa Timur sangat besar terutama di wilayah pantura serta sekitar Surabaya. Meskipun demikian beberapa wilayah lain juga potensial untuk mengembangkan kawasan industri terutama wilayah yang memiliki aksesibilitas laut dan udara besar. Berbagai industri pengolah hasil alam lebih cenderung kewilayah utara Jawa Timur, diantaranya pengembangan kawasan industri Tuban, diarahkan pengembangan di wilayah utara dan selatan sebagai pengembangan industri semen, dan petrochemical dengan ditunjang oleh adanya pelabuhan, pengembangan kawasan industri Lamongan, diarahkan

pengembangan di wilayah utara sebagai pengembangan industri manufaktur, pengalengan ikan, kawasan penunjang kegiatan dilepas pantai (Shorebase), pengembangan kawasan industri Banyuwangi, diarahkan pengembangan di wilayah timur selatan, sebagai pengembangan industri perikanan, pengembangan kawasan industri wilayah selatan, diarahkan di wilayah Kabupaten Jember tepatnya di Puger dan di wilayah Kabupaten Trenggalek tepatnya di Prigi sebagai pengembangan kawasan industri perikanan, pengembangan kawasan industri Madiun, diarahkan sebagai pengembangan industri perkeretaapian dengan melibatkan masyarakat pengrajin, pergudangan, pengembangan kawasan industri Bangkalan, diarahkan sebagai kawasan industri pengolahan, pergudangan.



**Gambar 2.14 Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur**

*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

### 2.1.2.7 Potensi Pariwisata

Potensi Pariwisata berdasarkan Perda Jawa Timur No 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kawasan peruntukan pariwisata di Provinsi Jawa Timur meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

**Daya Tarik Wisata Alam**, meliputi:

1. Air Terjun Dlundung di Kabupaten Mojokerto;



2. Air Terjun Sedudo dan Pemandian Sumber Karya di Kabupaten Nganjuk;
3. Air Terjun Madakaripura, Bromo-Ngadisari, dan Pantai Bentar di Kabupaten Probolinggo;
4. Air Terjun Watu Ondo di perbatasan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu;
5. Api Abadi di Kabupaten Pamekasan;
6. Arak-Arak di Kabupaten Bondowoso;
7. Banyuanget, Gua Gong, Gua Tabuhan, Pantai Teleng Ria di Kabupaten Pacitan;
8. Bukit Bededung dan Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo;
9. Coban Glotak, Pantai Balekambang, Pantai Ngliyep di Kabupaten Malang;
10. Danau Kastoba dan Pantai Labuhan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik;
11. Grajagan, Pantai Plengkung, Pantai Sukamade, Kawah Ijen di Kab. Banyuwangi;
12. Gua Lowo, Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, dan Tirta Jualita di Kab.Trenggalek;
13. Gua Maharani dan Pantai Tanjung Kodok di Kabupaten Lamongan;
14. Gunung Kelud di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri;
15. Gunung Wilis di Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung;
16. Hutan Bambu, Pantai Watu Godeg, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dan Ranu Pane di Kabupaten Lumajang;
17. Hutan Surya, Pemandian Talun, dan Waduk Pondok di Kab Ngawi;
18. Kakek Bodo di Kabupaten Pasuruan;
19. Kayangan di Kabupaten Bojonegoro;
20. Kawah Ijen di Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso;
21. Pantai Lombang dan Pantai Slopeng di Kabupaten Sumenep;
22. Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
23. Pantai Rongkang di Kabupaten Bangkalan;
24. Pantai Watu Ulo di Kabupaten Jember;
25. Pemandian Air Panas Cangar Tahura R. Soerjo di Kota Batu;
26. Tahura R. Soeryo di Kabupaten Jombang, Kabupaten Malang,
27. Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Batu;
28. Taman Nasional Bromo–Tengger–Semeru (BTS) di Kabupaten Lumajang,

Malang, Pasuruan, dan Probolinggo;

29. Telaga Ngebel dan Tirto Manggolo di Kabupaten Ponorogo; dan Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan.

**Daya Tarik Wisata Budaya**, meliputi:

1. Asta Yusuf, Asta Tinggi, Keraton, Masjid Agung, dan Museum di Kabupaten Sumenep;
2. Candi Jabung di Kabupaten Malang;
3. Candi Jabung Tirto di Kabupaten Probolinggo;
4. Candi Penampihan di Kabupaten Tulungagung;
5. Candi Penataran di Kabupaten Blitar;
6. Gereja Poh Sarang dan Petilasan Jayabaya di Kabupaten Kediri;
7. Gua Akbar, Makam Bakti Harjo, Makam Ibrahim Asmorokondi, dan Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
8. Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
9. Makam Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
10. Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
11. Makam Proklamator Bung Karno di Kota Blitar;
12. Makam Ratu Ebu di Kabupaten Sampang;
13. Makam Sunan Ampel dan Mbah Bungkul di Kota Surabaya;
14. Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
15. Makam Sunan Giri, Makam Maulana Malik Ibrahim, dan Fatimah Binti Maemun di Kabupaten Gresik;
16. Makam Troloyo di Kabupaten Mojokerto;
17. Pura Mandara Giri Semeru Agung di Kabupaten Lumajang; dan Situs Peninggalan Budaya Majapahit di Kabupaten Mojokerto.
18. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia
19. Daya tarik wisata hasil buatan manusia di wilayah Jawa Timur meliputi:
20. Bendungan Widas dan Taman Umbul Kab Madiun;
21. Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJS) di Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya;

22. Kebun Binatang Surabaya di Kota Surabaya;
23. Kebun Raya Purwodadi & Pemandian Banyubiru di Kab Pasuruan;
24. Kolam Renang Ubalan di Kabupaten Mojokerto;
25. Pemandian Blambangan, Pemandian Kebon Agung, dan Pemandian Petemon di Kabupaten Jember;
26. Pemandian Talun & Waduk Pondok Kabupaten Ngawi;
27. Sumber Boto dan Tirta Wisata di Kabupaten Jombang;
28. Taman Kosala Tirta, Taman Manunggal, & Tirtosari di Kab Magetan;
29. Taman Safari di Kabupaten Pasuruan;
30. Taman Sengkaling dan Waduk Selorejo Kab Malang;
31. Taman Suruh di Kabupaten Banyuwangi;
32. Ubalan Kalasan di Kabupaten Kediri;
33. Waduk Gondang dan Wisata Bahari Lamongan Kabupaten Lamongan; dan
34. Waduk Wonorejo di Kabupaten Tulungagung.

### **2.1.3 Wilayah Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Di wilayah Provinsi Jawa Timur, kawasan rawan bencana dikelompokkan dalam kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana gelombang pasang, kawasan rawan bencana banjir dan kawasan rawan bencana kebakaran hutan serta kawasan rawan angin kencang dan puting beliung. Dengan adanya bencana ini dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dengan demikian harus melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi, melalui pembentukan suatu tatanan baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini.

#### **2.1.3.1 Kawasan Rawan Bencana Longsor**

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Kriteria

penetapan kawasan rawan tanah longsor menurut PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Ada 6 jenis tanah longsor, yakni: longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsor yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Wilayah rawan longsor di Jawa Timur dengan potensi gerakan tanah dengan klasifikasi menengah-tinggi sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.10 Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Ngawi	Widodaren, Jogorogo Pitu, Kedunggalar, Paron	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tuban	Bancar, Tambakboyo, Kerek, Rengel, Montong	Menengah
Kabupaten Bojonegoro	Ngambon, Purwosari	Menengah
Kabupaten Magetan	Poncol, Magetan, Panekan, Plaosan, Parang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Madiun	Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Nganjuk	Loceret, Gondang, Sawahan	Menengah
Kabupaten Ponorogo	Ngrayun, Sawoo, Sampung, Sambit, Slahung, Bungkal, Badegan, Soko, Mlarak, Pulung, Ngebel	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pacitan	Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirejo, Tulakan, Arjosari, Kebonagung, Pacitan, Pringkuku, Punung, Donorejo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Trenggalek	Bendungan, Munjungan, Tugu, Durenan, Karangan, Pule, Panggul, Dongko, Kampak, Watulimo, Munjungan	Menengah-Tinggi
Kabupaten Kediri	Grogol, Semen, Mojo	Menengah-Tinggi
Kabupaten Tulungagung	Pagerwojo, Sendang, Kauman, Karangrejo, Bandung, Kalidawir, Rejotangan, Besuki	Menengah-Tinggi
Kabupaten Blitar	Bakung, Wonotirto, Kademangan, Sutojayan, Panggungrejo	Menengah-Tinggi

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Potensi Gerakan Tanah
Kabupaten Malang	Poncokusumo, Jabung, Sumberma Njing, Batu, Pau, Kalipare	Menengah
Kabupaten Lumajang	Tempursari, Pronojiwo, Senduro, Randugung, Klakah	Menengah-Tinggi
Kabupaten Pasuruan	Lumbang, Tuttur, Tolasari	Menengah
Kabupaten Probolinggo	Lumbang, Sukapura, Sumber, Gading, Krucil	Menengah-Tinggi
Kabupaten Jember	Panti, Tempurejo, Tanggul, Jeblug, Bangsalsari, Arjasa, Rambipuji, Munjulsari, Sukorambi	Menengah-Tinggi
Kabupaten Situbondo	Bungatan, Sumbermalang, Jatibanteng, Banyuglugur, Kendit	Menengah-Tinggi
Kabupaten Bondowoso	Pakem, Curah Dami, Grujugan, Maesan, Klabang	Menengah-Tinggi
Kabupaten Banyuwangi	Kalipiro, Wongsorejo	Menengah-Tinggi
Kota Batu	Junrejo, Batu, Bumiaji	Menengah-Tinggi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

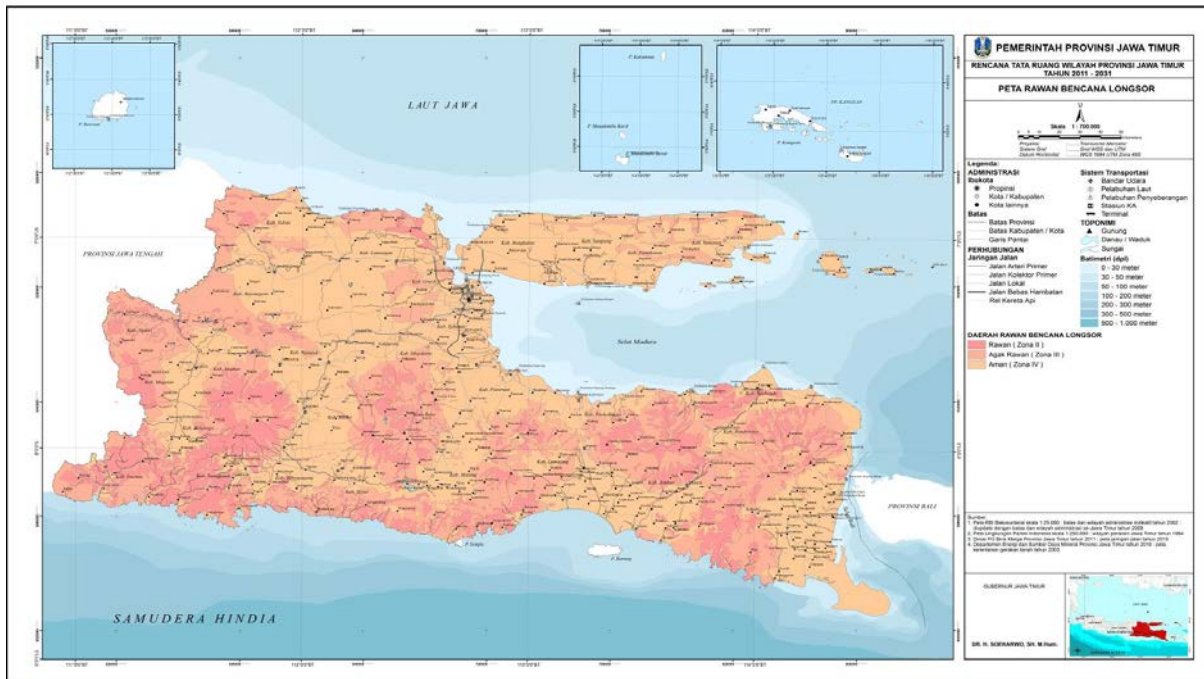
**Keterangan:**

**Menengah** : Daerah yang mempunyai potensi Menengah untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan diatas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

**Tinggi** : Daerah yang mempunyai potensi Tinggi untuk terjadi Gerakan Tanah. Pada Zona ini dapat terjadi Gerakan Tanah jika curah hujan diatas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali.

Secara umum klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor di Jawa Timur terbagi dalam tiga klasifikasi yakni Rawan, Agak Rawan, dan Aman. Wilayah dengan klasifikasi tingkat kerawanan agak rawan hingga rawan berada pada wilayah dengan kelerengan menengah hingga curam atau berada pada bentang alam berupa gunung dan perbukitan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada peta berikut.





**Gambar 2.15 Peta Rawan Bencana Longsor**  
*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*

### 2.1.3.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Gelombang pasang merupakan gelombang yang ditimbulkan oleh gaya tarik menarik antara bumi dengan planet-planet lain terutama dengan bulan dan matahari, gelombang ini mempunyai periode sekitar 12,4 jam dan 24 jam. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional kriteria kawasan rawan gelombang pasang adalah kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari. Kawasan rawan gelombang pasang di Provinsi Jawa Timur berada di kawasan sepanjang pantai di wilayah Jawa Timur baik yang berbatasan dengan Laut Jawa, Selat Bali, Selat Madura, Samudera Hindia maupun di kawasan kepulauan.

### 2.1.3.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Banjir adalah keadaan sungai, dimana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpasan dan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria kawasan rawan banjir adalah kawasan yang

diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Secara detail lokasi banjir beserta tingkat potensi bahaya tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 2.11 Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur**

Kabupaten/Kota	Area/Kecamatan	Tingkat Potensi Banjir
Bangkalan	Bangkalan	Potensi Menengah
Banyuwangi	Glagah	Potensi Menengah
Blitar	Udanawu, Ponggok, Bakung, Kesamben	Potensi Menengah
Bojonegoro	Kasiman, Padangan, Kalitidu, Bojonegoro	Potensi Menengah
Bondowoso	Grujugan, Tegalampel, Cerme	Potensi Menengah
Gresik	Gresik	Potensi Tinggi
Jember	Silo	Potensi Menengah
Jombang	Megaluh	Potensi Menengah
Kediri	Semen, Grogol, Pagu, Pare, Puncu, Wates	Potensi Menengah
Lamongan	Sekaran, Babat, Laren, Karanggeneng, Deket, Lamongan, Sukodadi	Potensi Tinggi
Lumajang	Tempeh, Tempursari, Pronojiwo	Potensi Menengah
Madiun	Kebonsari, Sawahan, Wonosari	Potensi Menengah
Magetan	Plaosan, Bendo, Kawedanan	Potensi Menengah
Malang	Kepanjen, Pakisaji	Potensi Menengah
Mojokerto	Jatiroto, Mojokerto, Bangsal, Mojosari, Pungging	Potensi Menengah
Nganjuk	Rejoso	Potensi Menengah
Ngawi	Ngrambe, Padas	Potensi Menengah
Pacitan	Ngadirojo, Kebonagung	Potensi Menengah
Pasuruan	Purwosari, Kraton	Potensi Menengah
Ponorogo	Jetis, Kauman, Siman	Potensi Menengah
Probolinggo	Kota Anyar, Paiton	Potensi Menengah
Sampang	Sreseh, Jrengik, Sampang	Potensi Menengah
Sidoarjo	Krian, Taman, Sidoarjo	Potensi Menengah
Situbondo	Sumbermalang, Situbondo	Potensi Menengah
Sumenep	Sumenep	Potensi Rendah
Trenggalek	Pule	Potensi Menengah
Tuban	Jatirogo, Bancar, Tuban	Potensi Menengah
Tulungagung	Pagerwojo, Gondang, Kalidawir	Potensi Menengah
Kota Pasuruan	Rejoso	Potensi Rendah
Kota Surabaya	sebagian besar wilayah Kota Surabaya	Potensi Menengah
Kota Malang	Wilayah Kota Bagian tengah dan timur	Potensi Rendah

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

#### 2.1.3.4 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung

Kebakaran hutan merupakan peristiwa dimana terbakarnya hutan atau adanya titik - titik api/panas yang rentan terbakar. Kebakaran hutan secara alami umumnya disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, aliran magma/lava/lahar dari letusan gunung berapi di vegetasi hutan dan objek lainnya maupun pada lahan gambut. Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan angin kencang di Jawa Timur umumnya terjadi pada kawasan Gunung Arjuno, Gunung Kawi, Gunung Welirang dan Gunung Kelud dan kawasan - kawasan lainnya dengan potensi angin puting beliung.

#### 2.1.3.5 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api

Kawasan rawan letusan gunung berapi merupakan kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi terancam bahaya letusan gunung api baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi daerah terlarang, daerah bahaya I, dan daerah bahaya II. Kawasan rawan letusan gunung berapi di Jawa Timur berada pada lereng gunung berapi yang masih aktif. Terdapat 7 gunung api aktif di Jawa Timur serta lokasi yang merupakan wilayah rawan. Menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kriteria penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi: Wilayah di sekitar kawah atau kaldera; dan Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan/atau aliran gas beracun.

**Tabel 2.12 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Jawa Timur**

No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
1	Ijen	Bondowoso dan Banyuwangi	Pos pengamatan Gunung Api Kawah Ijen, Dusun Panggung Sari, Desa taman Sari, Licin, Kec. Glagah, Kab.Banyuwangi
2	Semeru	Malang dan Lumajang	Pos Pengamatan Gunung Api di Gunung Sawur Desa Sumber Wuluh, Kecamatan Candipuro, Kab.Lumajang.
3	Bromo	Malang, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan	Pos Pengamatan Gunung Api di Cemoro Lawang Desa Ngadisari, Kec. Sukapura, Kab.Probolinggo
4	Lamongan	Lumajang dan Probolinggo	Pos Pengamatan di Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.
5	Arjuno-Welirang	Pasuruan dan	Pos Pengamatan Gunung Api di Kasiman,

No	Gunung Api	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Pengamatan
		Mojokerto	Desa Sukoreno, Kecamatan prigen, Kabupaten Pasuruan
6	Kelud	Kediri, Blitar dan Malang	Pos Pengamatan Gunung Api di Dusun Margomulyo, Desa Sugih Waras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri
7	Raung	Banyuwangi, Bondowoso dan Jember	Pos Pengamatan Gunung Api di Kp.Mang Desa Sragi, Kecamatan Songon Kabupaten Banyuwangi

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031



**Gambar 2.16 Peta Rawan Bencana Gunung Api**

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

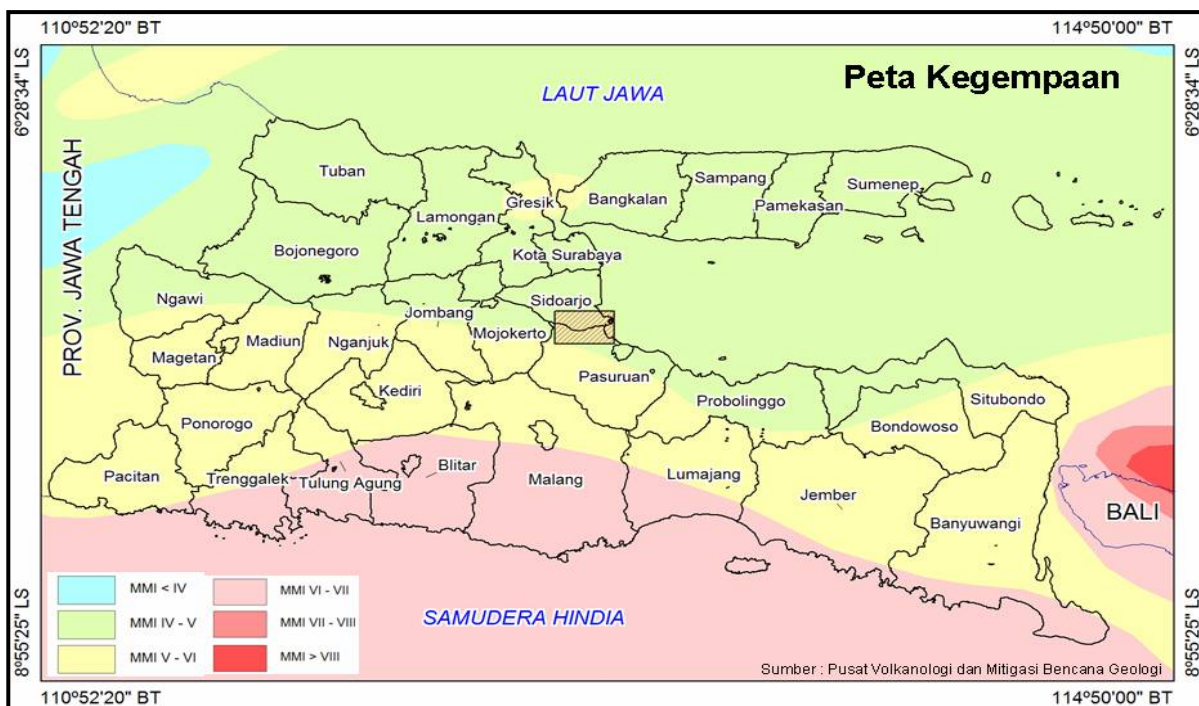
### 2.1.3.6 Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan Rawan Gempa Bumi merupakan kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana gempa bumi yang mengakibatkan berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kekuatan gempa bumi akibat aktivitas gunung api dan runtuh batuan relatif kecil sehingga kita akan memusatkan pembahasan pada gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif. Gempa bumi berlaku setiap hari di bumi, tetapi umumnya berskala kecil, sehingga tidak menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu menyebabkan kerusakan dan kehilangan nyawa yang besar melalui beberapa cara



termasuk retakkan pecah (fault rupture), getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami, lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal seperti tanah runtuh, tanah lembik, dan kebakaran atau perlepasan bahan beracun.

Kriteria kawasan rawan gempa menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan XII *Modified Mercally Intensity* (MMI). Kawasan rawan bencana gempa bumi di Provinsi Jawa Timur berada di wilayah: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung.



**Gambar 2.17 Lokasi Gempa Dibedakan Skala Modified Mercalli Intensity (MMI)**

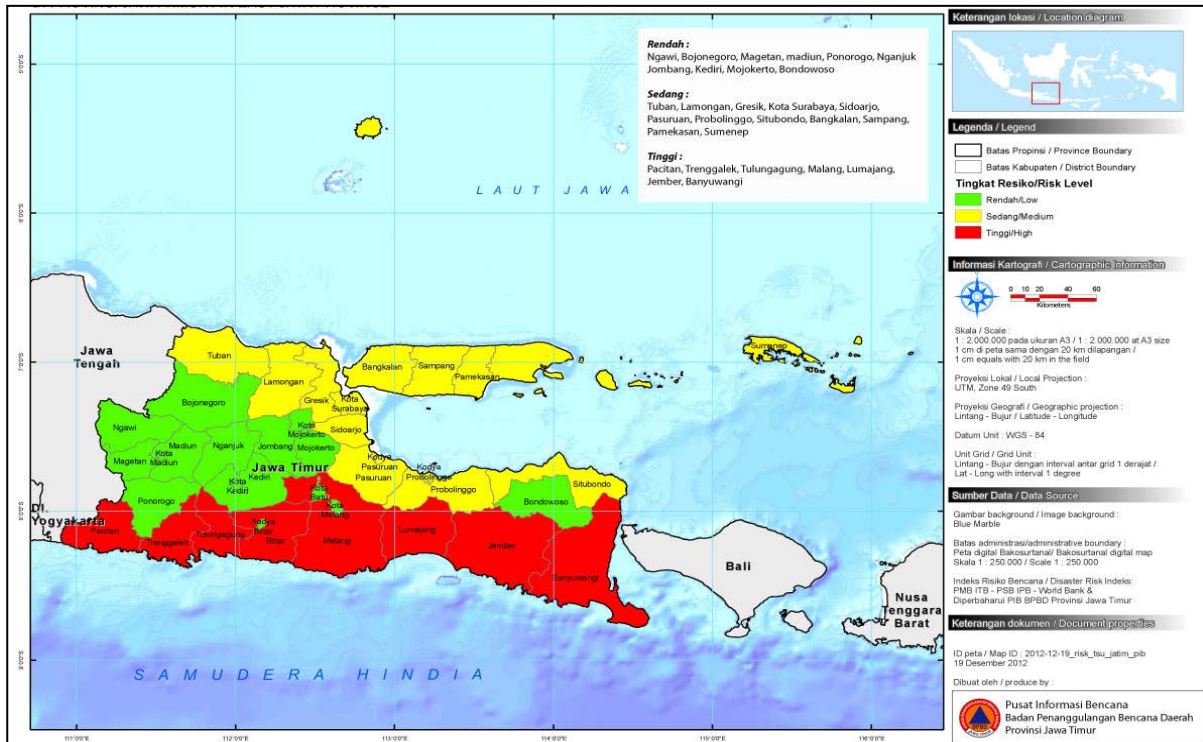
*Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031*



### 2.1.3.7 Kawasan Rawan Tsunami

Penetapan wilayah rawan tsunami didasarkan pada angka kejadian di masa lalu serta keberadaan lempeng tektonik. Berdasarkan kondisi geologi, selain kaya akan sumberdaya alam wilayah selatan Jawa juga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap bencana alam, seperti rawan gempa tektonik dan vulkanik disepanjang "*ring of fire*" yang melintasi Sumatra – Jawa – Bali – Nusa Tenggara – Banda – Maluku yang berdampak terhadap adanya bencana tsunami. Tingkat resiko tsunami di Jawa timur diklasifikasikan menjadi:

- a. Resiko Tinggi tsunami, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi.
- b. Resiko Sedang tsunami, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.
- c. Resiko Rendah tsunami, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten/Kota Kediri, Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Kabupaten Bondowoso.



**Gambar 2.18 Peta Rawan Bencana Tsunami**

*Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012*

### 2.1.3.8 Kawasan Luapan Lumpur

Kawasan luapan lumpur meliputi area terdampak dari bahaya luapan lumpur, polusi gas beracun, dan penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Arahkan pengelolaan kawasan luapan lumpur dibagi menjadi :

a. Penanganan luapan lumpur meliputi :

- Peningkatan kapasitas tampungan kolam lumpur berfungsi melindungi permukiman dan infrastruktur vital;
- Pemanfaatan debit Kali Porong yang cukup besar di musim hujan untuk melancarkan aliran endapan lumpur.

b. Penanganan infrastruktur sekitar semburan lumpur meliputi:

- Penanganan sistem drainase dengan memperbaiki atau membuat saluran drainase baru;
- Normalisasi saluran drainase utama;
- Perbaikan jalan lingkungan untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong dan perbaikan sebagian ruas Jalan Arteri Porong.

- Peningkatan jalan alternatif lainnya sepanjang  $\pm$  14 km untuk mengurangi beban lalu lintas di Jalan Arteri Porong;
  - Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol;
  - konstruksi relokasi pipa air baku PDAM Kota Surabaya.
- c. Pengamanan Kali Porong meliputi:
- Penjagaan kapasitas pengaliran Kali Porong;
  - Penjagaan keamanan tanggul dan tebing sungai dengan memasang perlindungan tebing sungai/tanggul.
- d. Penanganan dampak sosial masyarakat akibat luapan lumpur meliputi:
- Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur maupun penurunan tanah;
  - Perlindungan sosial terhadap hak-hak masyarakat atas harta benda miliknya yang hilang atau berkurang karena dampak luapan lumpur;
  - Pemulihan sosial masyarakat yang terkena luapan lumpur.

#### **2.1.3.9 Kawasan Rawan Kekeringan**

Kawasan Rawan Kekeringan merupakan kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan berhubungan dengan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kekeringan dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Kekeringan Alamiah, meliputi:
- Berhubungan dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu
  - Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim;
  - Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah;
  - Kekeringan Pertanian pada wilayah yang luas;

- Kekeringan Sosial Ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian

b. Kekeringan Antropogenik adalah kekeringan yang disebabkan karena ketidakpatuhan pada aturan, terjadi karena :

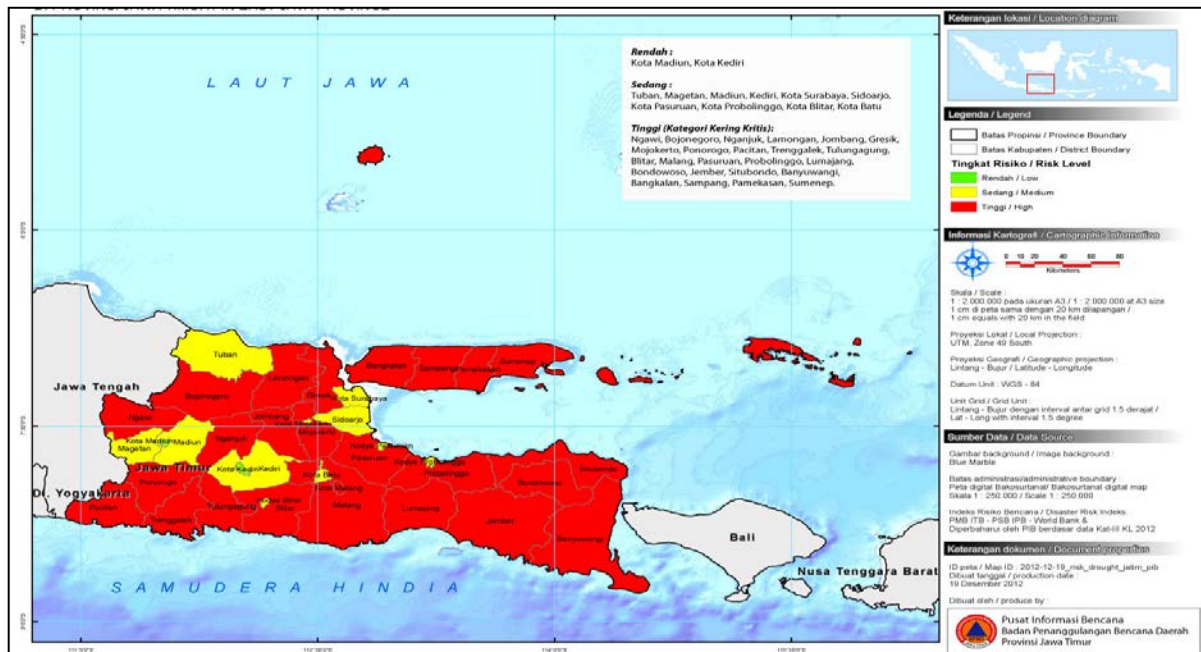
- Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat ketidakpatuhan pengguna terhadap pola tanam/pola penggunaan air;
- Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber-sumber air akibat perbuatan manusia

Gejala terjadinya kekeringan sebagai berikut: 1) kekeringan berkaitan dengan menurunnya tingkat curah hujan dibawah normal dalam satu musim. pengukuran kekeringan meteorologis merupakan indikasi pertama adanya bencana kekeringan; 2) Terjadinya kekurangan pasokanair permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan elevasi muka air sungai, waduk, danau dan air tanah. Kekeringan Hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya kekeringan; 3) Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas yang menyebabkan tanaman menjadi kering dan mengering.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2012, tingkat resiko bencana kekeringan terbagi dalam:

- a. Resiko Kekeringan Rendah, meliputi Kota Madiun, dan Kota Kediri.
- b. Resiko Kekeringan Sedang, meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Blitar, dan Kota Batu.
- c. Resiko Kekeringan Tinggi, meliputi Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten/Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo,

Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.



**Gambar 2.19 Peta Rawan Bencana Kekeringan**

*Sumber : BPBD Provinsi Jawa Timur, 2012*

## 2.1.4 Demografi

### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk

Jawa Timur mengalami kenaikan jumlah penduduk setiap tahun, pada tahun 2011 penduduk Jawa Timur berjumlah 37,8 juta jiwa dan terus meningkat menjadi 38,8 juta jiwa tahun 2015. Di tahun 2015 pertumbuhan penduduk melandai hanya sebesar 0,612 persen terendah dalam empat tahun terakhir. Sedangkan untuk rata-rata kepadatan penduduk Jawa Timur pada tahun 2015 mencapai 810 jiwa per km<sup>2</sup>, lebih tinggi dibanding tahun 2011 yaitu sebesar 789 jiwa per km<sup>2</sup>. Umumnya daerah perkotaan mempunyai kepadatan yang tinggi sedangkan di daerah perdesaan mempunyai kepadatan yang rendah.

Pada tahun 2011 hingga tahun 2015 angka ketergantungan penduduk menunjukkan terus menurun. Pada tahun 2012 angka ketergantungan tercatat 45,69 dan menurun menjadi 44,22 di tahun 2015. Capaian tahun 2015 menunjukkan bahwa setiap 100 orang berusia produktif menanggung sebanyak 44,22 orang usia



tidak produktif. Keberhasilan program keluarga berencana di Jawa Timur merupakan salah satu penyebab menurunnya angka ketergantungan penduduk.

**Tabel 2.13 Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Timur**

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk (000 Jiwa)	37.840	38.106	38.363	38.610	38.847
2	Pertumbuhan Penduduk (%)	0,73	0,70	0,67	0,64	0,61
3	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )	789	794	800	805	810
4	Sex Ratio (L/P) (%)	97,49	97,46	97,43	97,4	97,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

**Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur**

Propinsi / Kabupaten/Kota	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kabupaten</b>					
01. Pacitan	543.904	545.905	547.917	549.481	550.986
02. Ponorogo	859.302	861.806	863.890	865.809	867.393
03. Trenggalek	678.792	681.706	683.791	686.781	689.200
04. Tulungagung	998.707	1.004.711	1.009.411	1.015.974	1.021.190
05. Blitar	1.124.775	1.130.423	1.136.701	1.140.793	1.145.396
06. Kediri	1.512.610	1.521.895	1.530.504	1.538.929	1.546.883
07. Malang	2.471.990	2.490.878	2.508.698	2.527.087	2.544.315
08. Lumajang	1.013.403	1.017.900	1.023.818	1.026.378	1.030.193
09. Jember	2.353.025	2.367.482	2.381.400	2.394.608	2.407.115
10. Banyuwangi	1.567.084	1.574.528	1.582.586	1.588.082	1.594.083
11. Bondowoso	743.369	748.127	752.791	756.989	761.205
12. Situbondo	653.609	657.874	660.702	666.013	669.713
13. Probolinggo	1.107.923	1.116.390	1.123.204	1.132.690	1.140.480
14. Pasuruan	1.530.287	1.543.723	1.556.711	1.569.507	1.581.787
15. Sidoarjo	1.983.271	2.016.974	2.048.986	2.083.924	2.117.279
16. Mojokerto	1.039.299	1.049.886	1.057.808	1.070.486	1.080.389
17. Jombang	1.212.881	1.220.404	1.230.881	1.234.501	1.240.985
18. Nganjuk	1.024.105	1.028.914	1.033.597	1.037.723	1.041.716
19. Madiun	666.305	669.088	671.883	673.988	676.087
20. Magetan	622.902	624.373	625.703	626.614	627.413
21. Ngawi	820.880	822.605	824.587	827.829	828.783
22. Bojonegoro	1.217.775	1.223.079	1.227.704	1.232.386	1.236.607
23. Tuban	1.127.775	1.134.584	1.141.497	1.147.097	1.152.915
24. Lamongan	1.182.808	1.184.581	1.186.382	1.187.084	1.187.795
25. Gresik	1.196.516	1.211.686	1.227.101	1.241.613	1.256.313
26. Bangkalan	918.813	928.024	937.497	945.821	954.305
27. Sampang	892.301	903.613	913.499	925.911	936.801
28. Pamekasan	808.114	817.690	827.407	836.224	845.314
29. Sumenep	1.050.678	1.056.415	1.061.211	1.067.202	1.072.113
<b>Kota</b>					
71. Kota Kediri	271.511	273.695	276.619	278.072	280.004
72. Kota Blitar	133.492	134.723	135.702	136.903	137.908
73. Kota Malang	828.491	834.527	840.803	845.973	851.298
74. Kota Probolinggo	220.102	222.292	223.881	226.777	229.013
75. Kota Pasuruan	188.414	190.191	192.285	193.329	194.815
76. Kota Mojokerto	121.517	122.594	123.806	124.719	125.706
77. Kota Madiun	172.073	172.886	174.114	174.373	174.995
78. Kota Surabaya	2.788.932	2.805.718	2.821.929	2.833.924	2.848.583
79. Kota Batu	192.813	194.700	196.189	198.608	200.485
<b>Jawa Timur</b>	<b>37.840.657</b>	<b>38.106.590</b>	<b>38.363.195</b>	<b>38.610.202</b>	<b>38.847.561</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk, BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.1.4.2 Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Karena itu data perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, tetapi pada Agustus 2015 kembali meningkat menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi peningkatan sekitar 125 juta orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2015 tercatat adanya tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Agustus 2015 mencapai 4,47 persen atau lebih tinggi dibanding Agustus 2014 yang hanya mencapai 4,19 persen. Hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.

**Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur**

NO	JENIS KEGIATAN UTAMA	SATUAN	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	Angkatan Kerja	Ribu Orang	19.761,88	20.238,06	20.432,45	20.149,99	20.274,68
	> Berkerja	Ribu Orang	18.940,34	19.411,26	19.553,91	19.306,51	19.367,78
	> Pengangguran	Ribu Orang	821,54	826,80	878,54	843,49	906,9
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,49	69,62	69,92	68,12	67,84
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,16	4,09	4,30	4,19	4,47

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Walaupun terdapat penambahan jumlah angkatan kerja, pada Agustus 2015 tercatat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terjadi sedikit penurunan. Pada Agustus 2014, TPAK Jawa Timur tercatat mencapai angka 68,12 persen. Sedangkan pada Agustus 2015 turun menjadi 67,84 persen. Secara umum, angka ini

menunjukkan bahwa 67,84 persen penduduk Jawa Timur yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 32,16 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Penurunan angka TPAK jika diiringi dengan kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas calon angkatan kerja tentunya dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jawa Timur pada masa yang akan datang terutama dalam rangka menghadapi pasar bebas Asia Tenggara atau yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

#### **2.1.4.3 Pendidikan**

Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2015, telah berhasil meningkatkan akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Wujud pemerataan dan perluasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan suatu indikator kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Angka Rata-rata Lama Sekolah terus meningkat dari 7,36 tahun 2011 menjadi 7,71 pada tahun 2015, selanjutnya Angka Melek Huruf pada tahun 2011 sebesar 87,80 persen meningkat menjadi 91,47 persen tahun 2015. Demikian pula untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), juga menunjukkan peningkatan pada semua jenjang pendidikan.

## **2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

### **2.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

#### **2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB**

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama masyarakat, utamanya bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan dinamika pembangunan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Apabila dihitung atas dasar harga berlaku, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2011 sebesar Rp. 1.120,58 triliun, meningkat menjadi Rp. 1.248,77 triliun pada tahun 2012, Rp. 1.382,50 triliun pada tahun 2013, Rp. 1.539,79 triliun pada tahun 2014, Rp. 1.689,88 triliun pada tahun 2015, dan Rp. 1.855,02 triliun pada tahun 2016. Apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2011 sebesar Rp. 1.054,40 triliun meningkat menjadi Rp. 1.124,46 triliun pada tahun 2012, Rp. 1.192,84 triliun pada tahun 2013, Rp. 1.262,70 triliun pada tahun 2014, Rp. 1.331,42 triliun pada tahun 2015, dan Rp. 1.405,23 triliun pada tahun 2016.

**Tabel 2.16 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	1.120,58	1.248,77	1.382,50	1.540,79	1.689,88	1.855,02
PDRB ADHK 2010 (Triliun Rupiah)	1.054,40	1.124,46	1.192,79	1.262,70	1.331,42	1.405,23
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	5,55
Nasional (%)	6,17	6,03	5,56	5,02	4,79	5,02

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dapat dilihat dari besaran nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena pertumbuhan ekonomi ini benar-benar diakibatkan oleh perubahan jumlah barang dan jasa yang sudah bebas dari pengaruh harga (pertumbuhan riil). Pada tahun 2011 perekonomian Jawa Timur tumbuh 6,44 persen, berikutnya tahun 2012 tumbuh lebih cepat menjadi 6,64 persen. Namun tiga tahun berikutnya terus melambat, masing-masing tumbuh 6,08 persen (Thn. 2013), 5,86 persen (Thn. 2014), 5,44 persen (Thn. 2015), dan pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,02 persen.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2015 bila dibanding Tahun 2014 tumbuh sebesar 5,44 persen, sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen. Perlambatan ini lebih dikarenakan faktor eksternal (ekonomi global) seperti menguatnya dolar, ketidakstabilan harga minyak mentah dunia, naiknya harga pangan dunia, dan krisis utang Yunani yang berimbas pada Uni Eropa hingga Amerika dan akhirnya berdampak pada seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di

samping itu adanya perubahan asumsi makro ekonomi dan sosial berdampak pula terhadap perekonomian nasional dan Jawa Timur sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Terjadinya perubahan metodologi penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 yang memakai *SNA (System National Account)* 2008, maka cakupan sektor/kategori semakin luas, terbagi menjadi 19 sektor lapangan usaha, dan dampak dari perubahan ini capaian angka pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah.

Peningkatan pada besaran angka PDRB Jawa Timur tahun 2016 sebesar 5,55 persen mencerminkan bahwa perekonomian daerah Jawa Timur tumbuh positif walaupun ditengah lesunya perekonomian global dan nasional sekaligus menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah Jawa Timur memiliki kekuatan dan semakin kokoh. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2016 termasuk cukup tinggi melampaui pertumbuhan nasional yang hanya mencapai 5,02 persen.

### **Pertumbuhan dan Distribusi Sektoral**

Perekonomian Jawa Timur tahun 2011 mengalami pertumbuhan sebesar 6,44 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didukung oleh lapangan usaha kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh masing-masing sebesar 4,57 persen dan 9,16 persen, sebagai dampak dari membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong meningkatnya aktifitas perdagangan, baik perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar wilayah.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi antara lain kategori informasi dan komunikasi sebesar 9,11 persen, jasa keuangan dan asuransi sebesar 9,14 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 17,45 persen, jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman sebesar 9,70 persen, transportasi dan pergudangan sebesar 8,56 persen. Situasi dan kondisi perekonomian yang cukup kondusif ini berlanjut hingga tahun 2012, sehingga Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 6,64 persen. Hampir semua kategori tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali kategori pengadaan listrik dan gas yang mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen.



Selanjutnya tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tumbuh 6,08 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing kategori, maka ada tiga kategori utama yang mengalami pertumbuhan melambat yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

**Tabel 2.17 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,02	5,14	3,06	3,63	3,46	2,35
B	Pertambangan dan Penggalian	7,63	0,25	1,31	3,65	7,92	14,18
C	Industri Pengolahan	4,57	6,73	5,85	7,66	5,3	4,51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,94	-3,31	2,89	2,45	(-3,00)	0,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah/Daur Ulang	8,87	0,91	4,15	0,25	5,28	5,19
F	Konstruksi	6,09	7,45	8,05	5,44	3,6	5,07
G	Perdag Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Spd Motor	9,16	8,21	6,18	4,61	6	5,81
H	Transportasi dan Pergudangan	8,56	7,24	8,6	6,4	6,56	5,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,7	5,68	5,65	8,88	7,91	8,49
J	Informasi dan Komunikasi	9,11	12,37	12,03	6,34	6,49	7,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,14	10,71	14,16	6,95	7,19	6,99
L	Real Estate	8,78	7,98	7,37	6,97	4,97	5,22
M + N	Jasa Perusahaan	4,92	3,19	7,45	8,52	5,44	5,18
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	4,86	1,39	1,26	0,58	5,38	4,74
P	Jasa Pendidikan	6,21	8,66	8,6	6,48	6,26	5,97
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	17,45	10,7	7,96	8,17	6,46	5,74
RSTU	Jasa lainnya	3,7	2,81	5,11	5,46	4,88	4,77
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>6,44</b>	<b>6,64</b>	<b>6,08</b>	<b>5,86</b>	<b>5,44</b>	<b>5,55</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi pada tahun 2014 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,86 persen, melambat dibanding tahun 2013. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing kategori, maka lapangan usaha yang mengalami perlambatan antara lain kategori perdagangan besar dan

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi serta kategori real estat.

Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur juga melambat menjadi 5,44 persen. Apabila dilihat pertumbuhannya pada masing-masing kategori, maka lapangan usaha yang mengalami perlambatan antara lain kategori Industri pengolahan, konstruksi, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, Real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan.

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55 persen. Dari sisi produksi, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,18 persen; diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,49 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,57 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,99 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen

**Tabel 2.18 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)**

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,28	13,47	13,46	13,61	13,75	13,31
B	Pertambangan dan Penggalian	5,86	5,30	5,34	5,17	3,79	3,77
C	Industri Pengolahan	29,15	29,28	28,79	28,95	29,27	28,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,50	0,48	0,37	0,36	0,34	0,33
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah/Daur Ulang	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,04	9,18	9,22	9,47	9,50	9,69
G	Perdag Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Spd Motor	17,97	17,67	17,70	17,29	17,64	18,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2,79	2,88	3,07	3,25	3,36	3,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,78	4,82	4,91	5,19	5,41	5,66
J	Informasi dan Komunikasi	4,65	4,73	4,78	4,54	4,56	4,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	2,44	2,64	2,68	2,75	2,78
L	Real Estate	1,64	1,61	1,63	1,57	1,63	1,61
M + N	Jasa Perusahaan	0,77	0,77	0,79	0,79	0,80	0,80
O	Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	2,60	2,65	2,51	2,32	2,31	2,33

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
P	Jasa Pendidikan	2,50	2,63	2,73	2,73	2,72	2,67
Q	Jasa Kesehatan dan	0,58	0,60	0,61	0,63	0,63	0,62
RSTU	Jasa lainnya	1,50	1,39	1,36	1,38	1,43	1,39
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

### Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

Nilai PDRB menurut pengeluaran tahun 2015 mencapai Rp. 1.689,88 triliun. Namun struktur per komponen tidak berbeda jauh dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap pada urutan pertama dengan nilai sebesar 60,62 persen atau sekitar Rp.1.024,40 triliun dengan komposisi pertama terbesar untuk pengeluaran konsumsi makanan, minuman dan rokok mencapai Rp. 333,54 triliun atau sekitar 32,56 persen dari total konsumsi rumahtangga, konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sebesar Rp. 248,96 triliun (24,30 persen) dan urutan ke tiga terbesar konsumsi hotel dan restoran Rp. 166,89 triliun (16,29 persen). Dibandingkan tahun sebelumnya komponen konsumsi rumahtangga ini mengalami perlambatan karena pada tahun 2014 nilainya sebesar 62,05 persen dengan rincian konsumsi makanan, minuman dan rokok 32,76 persen, konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya 24,36 persen dan untuk konsumsi hotel dan restoran sebesar 16,13 persen.

**Tabel 2.19 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)**

Komponen Pengeluaran	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	62,77	62,59	62,71	62,05	60,20	59,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,14	1,12	1,22	1,21	1,19	1,20
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,29	6,9	6,74	6,37	6,44	5,75
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,51	27,61	27,53	27,3	27,45	27,95
5. Perubahan Inventori	0,51	0,01	0,1	3,57	2,45	1,30
6. Ekspor Luar Negeri	17,08	17,04	16,49	15,85	14,58	14,70
7. Impor Luar Negeri	19,85	20,33	21,11	22	17,90	16,07
8. Net Ekspor Antar Daerah	4,55	5,06	6,32	5,65	5,58	5,42
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jawa Timur tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 12,83 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah komponen net ekspor antar daerah sebesar 9,58 persen. Kemudian komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB), pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan impor luar negeri yang masing-masing tumbuh sebesar 6,02 persen; 5,87 persen; 4,55 persen dan 0,02 persen. Sementara komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,01 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai lebih dari separuh PDRB Jawa Timur (59,75 persen), komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Timur berturut-turut adalah PMTB (27,95 persen), impor luar negeri (16,07 persen), ekspor luar negeri (14,70 persen), pengeluaran konsumsi pemerintah (5,75 persen), net ekspor antar daerah (5,42 persen), dan pengeluaran konsumsi LNPRT (1,20 persen).

### 2.2.1.2 Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Peningkatan ini juga akan sejalan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun demikian meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

**Tabel 2.20 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional**

Indeks Gini	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,37	0,40	0,40
Nasional	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : $G < 0,3$	= Ketimpangan rendah
$0,3 \leq G \leq 0,5$	= Ketimpangan sedang, dan
$G > 0,5$	= Ketimpangan tinggi

Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2011-2015 nilai gini rasio di Jawa Timur menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 0,37 dan tahun 2016 meningkat menjadi 0,40. Peningkatan ini kalau terus dibiarkan tentunya bisa berdampak kurang baik. Ketimpangan pendapatan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah semakin tinggi. Patut menjadi perhatian, walau indeks gini rasio masih dalam kategori sedang, tetapi ada kecenderungan meningkat. Sebenarnya dengan meningkatnya gini ratio ini tidak berarti kelompok ekonomi rendah tidak mengalami peningkatan pendapatan, sebenarnya mereka juga mengalami peningkatan pendapatan, namun peningkatannya masih terlalu jauh jika dibandingkan dengan peningkatan pendapatan dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Angka gini rasio daerah perkotaan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2011-2015 selalu lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di daerah perkotaan ketimpangan kesejahteraan antar penduduk lebih terasa dibanding daerah perdesaan.

#### **2.2.1.3 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Seperti halnya gini ratio, pemerataan pendapat versi bank dunia juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan masyarakat guna mengetahui ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Bank Dunia mengukur pendistribusian kue ekonomi atau mengukur pemerataan pendapatan dalam masyarakat dengan pendekatan besar persentase distribusi pengeluaran penduduk



suatu wilayah berdasarkan kategori pendapatan 40 persen terbawah, 40 persen menengah dan 20 persen teratas. Meskipun suatu wilayah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik, masih ada yang perlu diketahui yaitu seberapa besar kue ekonomi yang terbentuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Bisa jadi kue ekonomi tersebut hanya dinikmati oleh beberapa kelompok masyarakat saja.

Kategori ketimpangan menurut Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Pengelompokkannya adalah sebagai berikut :

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

**Tabel 2.21 Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur**

Kategori Ketimpangan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
40 % Bawah	21,09	20,15	19,82	18,63	16,61	17,03
40 % Menengah	38,57	34,38	34,55	35,22	36,05	35,60
20 % Atas	40,34	45,47	45,63	46,15	45,18	47,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pemerataan pendapatan versi Bank Dunia penduduk di Jawa Timur, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir mulai tahun 2011 sampai 2016 penduduk yang masuk dalam kelompok 40 persen bawah persentase distribusinya semakin rendah, mulai sebesar 21,09 persen ditahun 2011 menjadi 17,03 persen pada tahun 2016. Sementara penduduk pada kelompok 20 persen atas persentase distribusinya semakin meningkat mulai 40,34 persen ditahun 2011 menjadi 47,37

persen pada tahun 2016. Berdasarkan pengelompokan distribusi bank dunia pada tahun 2016 masuk dalam kategori ketimpangan rendah karena jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen.

#### 2.2.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segi kinerja perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan. Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

**Tabel 2.22 Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional**

Persentase Penduduk Miskin	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	11,85
Nasional	12,36	11,66	11,47	10,86	11,13	10,70

*Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur*

Angka kemiskinan di Jawa Timur selama lima tahun terakhir secara gradual (2011-2016) menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2011 angka kemiskinan sebesar 13,85 persen atau dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.251,45 ribu jiwa, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 11,85 persen atau jumlah penduduk miskin sebesar 4.638,53 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Jawa Timur tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional yaitu sebesar 10,70 persen.

Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar penduduk miskin di Indonesia dimana sekitar 17 persen dari penduduk miskin di Indonesia berada di Jawa Timur. Per September 2015 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,27 persen atau sekitar 13 ribu orang dibandingkan dengan posisi Maret 2015. Sementara itu, garis kemiskinan di Jawa Timur mencapai Rp. 316.464 per

kapita per bulan pada September 2015 atau meningkat 3,7 persen dibandingkan dengan Maret 2015 yang mencapai Rp. 305.171. Peningkatan tersebut terjadi secara simetris pada garis kemiskinan makanan dan non makanan. Sama dengan kondisi pada periode data sebelumnya, penyebab peningkatan garis kemiskinan pada periode ini terutama adalah beras dan rokok kretek filter.

Penduduk miskin di Jawa Timur terutama di wilayah pedesaan, yakni sekitar 67 persen dari total penduduk miskin di Jawa Timur. Penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan akan terkendala jika garis kemiskinan di pedesaan terus meningkat. Pada tahun 2011, garis kemiskinan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Walaupun demikian, sejak tahun 2011 garis kemiskinan makanan di pedesaan meningkat cukup pesat sehingga pada akhirnya pada tahun 2013 lebih tinggi dari garis kemiskinan makanan di perkotaan. Hal ini terus mendorong peningkatan garis kemiskinan wilayah pedesaan, sehingga pada periode September 2015 garis kemiskinan pedesaan mencapai Rp. 318.433, sementara perkotaan hanya Rp. 314.320. Garis kemiskinan sendiri merupakan cerminan dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum, baik untuk makanan maupun non makanan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa biaya hidup minimum di pedesaan Jawa Timur lebih tinggi daripada wilayah perkotaan.

Kabupaten di wilayah Madura memiliki persentase penduduk miskin lebih besar dibanding daerah lain. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin di Kabupaten Sampang mencapai 25,69 persen, merupakan terbesar di Jawa Timur, diikuti Kabupaten Bangkalan 22,57 persen, Kabupaten Sumenep 20,20 persen, dan Kabupaten Pamekasan 17,41 persen.

Pemerintah Jawa Timur dan kabupaten/Kota telah mengambil berbagai kebijakan dalam rangka mengentas kemiskinan, di antaranya adalah melalui program pemberdayaan potensi Desa/Kelurahan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk UMKM, fasilitas Koperasi, serta pendirian Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan tujuan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Timur. Semakin tingginya investasi diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat menyerap angkatan kerja sehingga dapat menurunkan kemiskinan.

### 2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada hakekatnya pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan yang hakiki tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi secara holistik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dimaksud tidak hanya terfokus pada pembangunan gedung sarana dan prasarana, tetapi berimplikasi pada perubahan kualitas manusia. Bisa dianalogkan, pembangunan yang pro kepada kualitas manusia itu bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan pembangunan yang hakiki, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah telah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas manusia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan upaya serius dengan program peningkatan kualitas manusia baik dari sisi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Masyarakat merasa sejahtera, jika pembangunan memberikan implikasi tercapainya umur panjang dan sehat, masyarakat semakin berpengetahuan dan dapat hidup layak secara ekonomi. Potret implikasi pembangunan terhadap kualitas manusia dapat dilihat dari hasil capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Tabel 2.23 Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dan Nasional**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jawa Timur	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	69,74
Nasional	67,09	67,70	68,31	68,90	69,55	70,18

Sumber : BPS Pusat dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan ketentuan *United Nation Development Programe (UNDP)*, penghitungan IPM untuk seluruh negara menggunakan metode baru. Hal ini dikarenakan IPM metode lama mempunyai kelemahan dan perlu diperbaharui. Pada metode baru ini, angka melek huruf sudah tidak dipakai lagi digantikan angka harapan sekolah dan penghitungan kompositnya menggunakan *geometric mean*. Dampak dari perubahan penghitungan ini, menyebabkan terjadi perubahan angka IPM menjadi lebih rendah dibanding metode lama. Tetapi perlu diingat bahwa hasil penghitungan metode baru tidak bisa dibandingkan lagi dengan metode lama, karena sudah berbeda metodologi.

Secara umum, pembangunan manusia Jawa Timur terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2016. IPM Jawa Timur meningkat dari 65,36 pada tahun 2010 menjadi 69,74 pada tahun 2016 atau naik 6,71 persen. Selama periode tersebut, IPM Jawa Timur rata-rata tumbuh sebesar 1,09 persen per tahun. Pada periode 2015-2016, IPM Jawa Timur tumbuh 1,15 persen. Pertumbuhan pada periode 2015-2016 sedikit melambat dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2014-2015 yang mampu tumbuh sebesar 1,19 persen.

Meskipun demikian, pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 merupakan tercepat ketiga di antara provinsi-provinsi se Indonesia. Selama periode 2010 hingga 2016 IPM Jawa Timur menunjukkan kemajuan yang besar, konsisten meningkat dengan kategori IPM “sedang”. Diperkirakan membutuhkan satu tahun lagi IPM Jawa Timur menjadi kategori “tinggi” atau di atas 70. IPM tertinggi tercatat di Kota Malang (80,46), diikuti Surabaya (80,38), dan Kota Madiun (80,01), sedangkan IPM terendah tercatat di Sampang (59,09). Sebelumnya Kota Malang satu-satunya wilayah yang mempunyai IPM berkategori “sangat tinggi”, tetapi pada tahun 2016 yang berkategori “sangat tinggi” bertambah yaitu Surabaya dan Kota Madiun. Nganjuk, Lamongan dan Jombang juga berubah dari daerah dengan IPM berkategori “sedang” menjadi “tinggi”. Hanya Sampang yang masih berkategori “rendah”. Diperkirakan 1 atau 2 tahun mendatang, IPM Sampang berubah menjadi kategori “sedang”.

#### **2.2.1.6 Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM. Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Sayangnya, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada urusan



dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai tambah di masyarakat akan semakin nyata.

Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriarki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh perundang-undangan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah. Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melihat disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Sehingga angka yang sekarang digunakan menggantikan angka IPG yang pernah dipublish. Dengan berlakunya IPG menggunakan metode baru, maka angka yang disajikan tidak bisa dibandingkan dengan angka-angka sebelumnya. Membandingkannya harus sesuai metode yang digunakan atau *apple to apple*. Hasil penghitungan IPG metode baru, tercatat bahwa IPG Jawa Timur mengikuti tren naik.

**Tabel 2.24 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
Indeks Pembangunan	89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	91,77

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016*)
Gender						

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan : \*) Angka Sementara

Pada tahun 2014, IPG mencapai 90,83 lebih baik dibanding 2013 yang mencapai 90,22 atau naik 0,68 persen. Kondisi ini semakin membaik pada tahun 2015 menjadi 91,07 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi 91,77 (angka sementara). Naiknya angka IPG Jawa Timur, mengindikasikan program pemberdayaan perempuan oleh Pemerintah Daerah cukup berhasil. Kenaikan IPG ini didukung meningkatnya AHH perempuan, angka harapan lama sekolah perempuan, angka rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita per tahun perempuan. Dengan demikian, SDM perempuan di Jawa Timur dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki-laki, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Jawa Timur sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan Jawa Timur di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan.

### 2.2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT ). Pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan.

Dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2011 sebesar 4,16 persen dan tahun 2012 sebesar 4,12 persen, kemudian meningkat pada tahun 2013 menjadi 4,33 persen. Selanjutnya pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi

4,19 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 4,47 persen. Pada tahun 2016, TPT di Jawa Timur kembali menurun menjadi 4,21 persen.

**Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,16	4,12	4,33	4,19	4,47	4,21

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2015 bila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk yang menganggur lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan dari pada di perdesaan. TPT di perkotaan relatif lebih tinggi dibanding di perdesaan, yaitu sebesar 5,54 persen, sementara TPT perdesaan tercatat 3,42 persen. Cukup tingginya TPT di perkotaan menunjukkan bahwa di perkotaan masih menjadi tempat favorit untuk mengadu nasib tetapi belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia. Di perkotaan umumnya tenaga kerja yang terserap adalah yang memiliki keahlian khusus. Sementara di perdesaan sebagian besar tenaga yang terserap yaitu di sektor pertanian, yang memang tidak memerlukan keahlian khusus.

Pada tahun 2015 terjadi kenaikan TPT sebesar 0,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari 4,19 (2014) menjadi 4,47 persen tahun 2015. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tercatat 22 Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dan 16 Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Angka TPT yang mengalami penurunan mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat yang bekerja dan mempunyai pendapatan semakin bertambah di banding tahun sebelumnya, dengan kata lain terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dampak krisis global yang mencapai puncaknya pada medio 2015 yang lalu sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia dan tidak terkecuali negara Indonesia yang ditunjukkan dengan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi. Melemahnya perekonomian secara global tak urung membuat ekspor Indonesia juga ikut menjadi lesu dan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Pada 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain

hal di atas, permasalahan lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur yaitu:

1. Masih adanya kesenjangan antara *supply* tenaga kerja yang tersedia dengan *demand* atau kebutuhan perusahaan/usaha;
2. Minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja;
3. Rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendahnya permintaan (pasar) tenaga kerja;
4. Tingginya konflik ketenagakerjaan dalam penentuan UMK dan masih rendahnya perlindungan bagi tenaga kerja;
5. Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal; dan
6. Kurang optimalnya pengawasan terhadap ketenagakerjaan (lembaga/perusahaan, dan pekerja) serta lemahnya pengendalian terhadap masuknya tenaga kerja asing.

Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan melalui 4 kebijakan program yaitu Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Perluasan dan Penempatan Kerja.

#### **2.2.1.8 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)**

Sebagai indikator kinerja pembangunan, kualitas air sungai yang diukur berdasarkan konsentrasi BOD dan COD telah cukup menggambarkan kinerja pembangunan lingkungan hidup. Namun demikian, perlu dipertimbangkan pengukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dengan indikator lainnya seperti kualitas udara dan tutupan lahan. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dipertimbangkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah sebagai indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. IKLH

merupakan informasi kondisi lingkungan hidup dengan menggunakan kualitas air, udara dan lahan sebagai indikator.

**Tabel 2.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	-	-	56,25	56,48	61,70	63,98

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur*

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30% dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) dengan bobot sebesar 40%. Klasifikasi IKLH adalah sebagai berikut:

1. Unggul : >90
2. Sangat baik : 82 - 90
3. Baik : 74 - 82
4. Cukup : 66 - 74
5. Kurang : 58 - 66
6. Sangat Kurang : 50 – 58
7. Waspada : <50

IKLH telah menjadi indikator kinerja pembangunan lingkungan pada RPJM Nasional 2015-2019 dengan baseline tahun 2014 sebesar 63,0-64,0 (kurang) dan target sampai dengan 2019 sebesar 66,5-68,5 (cukup). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Jawa Timur dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 56,25 (Thn. 2013 – “Klasifikasi Sangat Kurang”); 56,48 (Thn. 2014 – “Klasifikasi Sangat Kurang”); 61,70 (Thn. 2015 – “Klasifikasi Kurang”); 63,98 (Thn. 2016 – “Klasifikasi Kurang”). Nilai IKLD ini sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Jawa Timur

#### **2.2.1.9 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur



penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

**Tabel 2.27 Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	79	80	81

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Perkembangan indeks kepuasan masyarakat di Jawa Timur pada tahun 2014-2016 terus menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 79 (Thn. 2014); 80 (Thn. 2015); dan 81 (Thn. 2016). Kondisi ini mencerminkan kepuasan terhadap pelayanan masyarakat di Jawa Timur lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

#### 2.2.1.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek - aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Tabel 2.28 Indeks Reformasi Birokrasi**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	61,04	63,00	65,00

Sumber : Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur

Indeks reformasi birokrasi di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 63,00, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 65,00. Peningkatan ini mencerminkan birokrasi pemerintah Jawa Timur yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

#### 2.2.1.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial tersebut meliputi :

- Solidaritas social (al-takaful alijtima'i);
- Toleransi (al-tasamuh);
- Mutualitas/Kerjasama (al-ta'awun);
- Tengah-tengah (al-l'tidal); dan
- Stabilitas (al-stabat);

Penetapan indikator kesalehan sosial terdiri dari Solidaritas sosial (Sosial ekonomi); Kerjasama/mutualitas (Supporting); Toleransi (Kerukunan beragama dan budaya); Adil (Supporting); Menjaga ketertiban umum (Tertib sosial).

**Tabel 2.29 Indeks Kesalehan Sosial**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kesalehan Sosial	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

### 2.2.2 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar

#### 2.2.2.1 Pendidikan

##### 2.2.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Seperti halnya pada pendidikan dasar, dalam melihat seberapa besar tingkat partisipasi penduduk usia 16-18 tahun dalam kegiatan belajar/sekolah dapat dilihat dari besaran Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS usia 16 – 18 tahun adalah jumlah penduduk kelompok usia pendidikan menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan per jumlah penduduk usia pendidikan 16-18 tahun.

**Tabel 2.30 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun**

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APS (Usia 16-18 tahun)	59,65	62,51	65,95	71,23	72,14	72,76

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka partisipasi sekolah usia 16 – 18 tahun di Jawa Timur dalam enam tahun terakhir (tahun 2011-2016) menunjukkan nilai yang semakin meningkat. Meningkatnya APS usia 16 – 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi terutama jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2011 APS pendidikan menengah sebesar 59,65 persen dan terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 72,14 persen. Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari banyaknya program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu dengan adanya program Bantuan Siswa Miskin (BSM) maupun Program Indonesia Pintar.

#### 2.2.2.1.2 Angka Putus Sekolah - SMA/MA/SMK

Gangguan belajar pada siswa sekolah, baik yang disebabkan oleh faktor internal (kurangnya motivasi sekolah, keterbatasan kemampuan belajar), maupun yang disebabkan faktor eksternal, dapat mengakibatkan siswa menjadi putus/berhenti sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang minim, menuntut siswa untuk bekerja membantu mencari nafkah keluarga, cara pandang yang sempit terhadap pendidikan menganggap pendidikan bukanlah yang utama, tidak ada sarana dan prasarana yang memadai merupakan beberapa alasan banyaknya siswa memutuskan untuk berhenti sekolah/putus sekolah.

**Tabel 2.31 Angka Putus Sekolah di Jawa Timur**

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Putus Sekolah SMA/MA/ SMK	0,84	0,80	0,68	0,65	0,62	0,58

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jenjang pendidikan setingkat SMA/MA/SMK, dalam enam tahun terakhir Angka Putus Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun mengalami penurunan. Tahun 2011 sebesar 0,84 persen kemudian tahun 2016 menjadi sebesar 0,58 persen. Pada tahun 2016 dalam tiap 1.000 anak usia 16-18 tahun sekitar 5 anak yang putus sekolah.

#### 2.2.2.1.3 Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK

Salah satu syarat kelulusan setiap siswa dari suatu jenjang pendidikan adalah mengikuti Ujian Akhir Nasional (UNAS). Namun UNAS bukanlah satu satunya syarat seorang siswa dinyatakan lulus. Unas disyaratkan bagi murid yang telah menduduki kelas tertinggi, untuk kelas reguler kelas 6 untuk SD sederajat & kelas 3 untuk SLTP dan SLTA sederajat, sedangkan untuk kelas akselerasi adalah menduduki kelas akhir. Besaran angka kelulusan mencerminkan tingkat kualitas jenjang pendidikan, jika suatu sekolah banyak siswa yang lulus tentunya sekolah tersebut mempunyai kualitas yang lebih baik dibanding dengan sekolah yang siswanya sedikit lulus.

**Tabel 2.32 Angka Kelulusan Sekolah di Jawa Timur**

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kelulusan Sekolah SMA/MA/ SMK	97,73	98,14	98,27	98,52	98,57	98,63

*Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur*

Angka kelulusan sekolah setingkat SMA/MA/SMK dalam 6 (enam) tahun terakhir terus meningkat mulai 97,73 persen tahun 2011, meningkat menjadi 98,63 persen pada tahun 2016. Hal ini memberikan gambaran adanya peningkatan kualitas jenjang pendidikan, karena secara umum sekolah setingkat SD hingga setingkat SLTA angka kelulusan meningkat mendekati angka sempurna yaitu 100 persen.

#### 2.2.2.1.4 Guru Jenjang SMA, SMK, dan PK-PLK Berkualifikasi Min D4/S1

Keberadaan guru tidak hanya diperlukan dari sisi jumlahnya saja, tetapi juga kualitasnya. Kualitas seorang guru secara umum ditentukan dari tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang ditamatkan seorang guru akan sangat mempengaruhi kemampuannya dalam mengajar murid, semakin tinggi pendidikan

maka dia akan mempunyai kemampuan yang lebih dibanding yang pendidikannya rendah. Dengan tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan.

**Tabel 2.33 Persentase Guru Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Berkualifikasi Minimal D4/S1**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK berkualifikasi min D4/S1	87,46	91,93	92,36	94,84	96,55	98,78

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S.1-D.IV pendidikan menengah selama enam tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan, 87,46 persen pada tahun 2011 menjadi 98,78 persen tahun 2016. Hal ini merupakan suatu tuntutan dan juga dengan adanya pemberian tunjangan sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

#### 2.2.2.1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA

APM adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalannya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (*Key Development Milestones*) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Pada tahun 2011-2016, APM SMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu sekitar 54-68 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Peningkatan APM SMA/MA/SMK ini memberikan gambaran adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah.



**Tabel 2.34 Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Timur**

Angka Partisipasi Murni (APM)	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APM SMA/MA/SMK	54,97	55,94	59,78	65,78	65,83	68,21

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.2.1.6 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks pembangunan manusia, yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Pada tahun 2011 indeks pendidikan mencapai 0,55 dan di tahun 2016 capaiannya meningkat menjadi 0,60. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, semakin besar pula kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

**Tabel 2.35 Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015**

Indeks Pendidikan	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Pendidikan	0,55	0,55	0,57	0,58	0,59	0,60

Sumber : BPS Prov Jatim

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan pada Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Adapun permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah:

1. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan;
2. Belum setaranya pendidikan diniyah dan pesantren salafiyah dengan pendidikan umum;
3. Masih terbatasnya layanan pada Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur;
4. Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa; dan
5. Kurangnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

### 2.2.2.1.7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas

Angka rata-rata lama sekolah (*mean years school/MYS*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhirnya.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Timur, selama 2011-2015 terjadi peningkatan kualitas pendidikan penduduk yaitu dari 6,79 tahun ditahun 2011 meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2016.

**Tabel 2.36 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Timur**

Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
25 Tahun Keatas	6,79	6,85	6,90	7,05	7,14	7,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

### 2.2.2.1.8 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2011-2016, APKSMA/MA/SMK mengalami peningkatan, yaitu dari 73,78 persen pada tahun 2011 menjadi 81,42 persen tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk yang menempuh

pendidikan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolahnya di jenjang pendidikan tertentu.

**Tabel 2.37 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Timur**

Angka Partisipasi Kasar (APK)	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
APK SMA/MA/SMK	73,78	74,21	78,21	78,23	79,14	81,42

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Jatim

## 2.2.2.2 Kesehatan

### 2.2.2.6.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang berkaitan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Perkembangan angka kematian bayi selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2011 angkanya mencapai 29,24, selanjutnya terus menurun hingga tahun 2015 menjadi 24,00.

**Tabel 2.38 Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Bayi	29,24	25,50	25,00	24,50	24,00	23,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Terjadinya penurunan AKB merupakan dampak positif dari naiknya angka persalinan dengan bantuan tenaga medis dan meningkatnya proporsi tingkat pendidikan perempuan secara umum, khususnya para ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun tidak cukup signifikan secara nilai absolut, akan tetapi tingkat

penurunan ini menunjukkan bahwa upaya keras semua pihak, khususnya pemerintah untuk menekan angka kematian bayi membuahkan hasil. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, keberhasilan program KB, serta semakin baiknya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Secara perlahan namun pasti AKB mengalami penurunan, artinya kesehatan bayi menjadi prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan. Dalam usaha meminimalkan AKB diperlukan penanganan yang intensif baik dari faktor eksternal maupun internal, antara lain melalui keberadaan penolong persalinan yang mumpuni dan kemudahan akses ke tempat pelayanan kesehatan serta peningkatan perawatan bayi seperti pemberian asupan makanan yang cukup serta pemberian ASI dan imunisasi.

#### 2.2.2.6.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup, tetapi bukan karena kecelakaan.

**Tabel 2.39 Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Kematian Ibu	104,3	97,43	97,39	93,52	89,60	91,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Secara umum selama tahun 2011-2016 AKI di Jawa Timur terus menunjukkan penurunan, yaitu masing-masing 104 (tahun 2011) 97,43 (tahun 2012) 97,39 (tahun 2013), 93,52 (tahun 2014), dan 89,60 (tahun 2015) sedangkan pada tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 91 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor penyebab terbesar kematian ibu hamil saat melahirkan diantaranya karena pendarahan. Untuk menekan angka kematian ibu hamil saat melahirkan tersebut, berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pendampingan dan sosialisasi kepada ibu hamil serta kader kesehatan, agar ibu hamil mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak pelatihan, gerakan senam ibu hamil, dan mengintensifkan koordinasi

dengan bidan dan memanfaatkan sarana kesehatan yang terdekat. Pemberian tablet penambah darah melalui puskesmas atau pada saat pendampingan diharapkan akan mengurangi angka kematian ibu.

Penanganan pada kasus kematian ibu, harus komprehensif dan bersinergi, antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan keluarga. Aspek sosial ekonomi, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, sosial budaya harus diupayakan meningkat, sehingga diharapkan akan menekan Angka Kematian Ibu (AKI). Selain itu juga melalui beberapa program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan derajat kesehatan reproduksi, yaitu melalui pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan dan penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran.

#### 2.2.2.6.3 Angka Harapan Hidup

Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk suatu Negara atau wilayah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mencapai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.

Definisi Angka Harapan Hidup (AHH) pada suatu umur  $x$  adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur  $x$ , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya,



dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan

**Tabel 2.40 Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (AHH)	70,02	70,14	70,34	70,45	70,68	70,74

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*. Dari hasil penghitungan proyeksi yang dilakukan oleh BPS RI, rata-rata AHH di Jawa Timur selama enam tahun terakhir (2011–2016) menunjukkan trend meningkat yaitu dari 70,02 (tahun 2011) menjadi 70,74 (tahun 2016).

Pada umumnya kabupaten di wilayah **“tapal kuda”** seperti Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Jember, Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep memiliki usia harapan hidup yang rendah dibanding daerah **“kulonan atau mataraman”** (Jawa Timur sebelah barat). AHH pada wilayah “tapal kuda” berkisar 64 hingga 66 tahun untuk perempuan dan 60 hingga 63 tahun untuk laki-laki. Wilayah yang memiliki usia harapan hidup cukup tinggi adalah Kota Surabaya, Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, dan Kota Blitar, dengan 74 – 75 tahun untuk perempuan dan 71 – 73 tahun untuk laki-laki.

#### 2.2.2.6.4 Rumah Sakit Terkreditasi

Rumah sakit terakreditasi adalah rumah sakit pemerintah yang memperoleh sertifikat akreditasi sedangkan untuk pengertian rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit milik pemerintah daerah, UPT Dinas Kesehatan Provinsi, dan rumah

sakit milik kementerian kesehatan/kementerian lain (tidak termasuk BUMN dan TNI/POLRI). Secara umum selama tahun 2011-2014 persentase Rumah Sakit di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan, yaitu masing-masing 82,96 (tahun 2011), 86,72 (tahun 2012), 88,00 (tahun 2013) dan 90,63 (tahun 2014). Pada tahun 2015 terdapat masa peralihan terhadap standar akreditasi yang berlaku, namun tidak mengurangi mutu pelayanan rumah sakit. Rumah sakit yang telah terakreditasi akan mendapatkan pengakuan dari Pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan. Peningkatan ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

**Tabel 2.41 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	82,96	86,72	88,00	90,63	65,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.2.6.5 Kusta

Secara umum *prevalensi rate* di Jawa Timur tidak terjadi perubahan yang *significant* (dari 1,02 pada tahun 2015 menjadi 1,04 pada tahun 2016) karena kegiatan *intensified case finding* (ICF) dikembangkan yang semula hanya di 2 kabupaten menjadi 12 kabupaten endemis kusta yang melibatkan peran serta keluarga dengan dibantu oleh kader kesehatan dan toma/toga untuk deteksi gejala dini kusta pada anggota keluarganya. Selain kegiatan ICF diatas juga dilakukan kegiatan validasi data terutama di semua kabupaten endemis untuk melihat jumlah kasus kusta tercatat sesuai dengan kenyataan dilapangan. Dan hasilnya ada 2 kabupaten yang bisa bergeser dari daerah endemis menjadi non endemis kusta, yaitu Kabupaten Gresik dan Lamongan.

Keberhasilan pengobatan (*RFT rate*) tahun 2016 telah sesuai target yaitu > 90%. Secara komulatif mulai awal program sampai dengan akhir Desember 2016 penderita Kusta yang dapat menyelesaikan pengobatan dengan MDT sebanyak 138.897 penderita. Untuk pencapaian *RFT rate* di tingkat provinsi mencapai 90,3%, sedangkan pencapaian *RFT rate* sebesar > 90% ada di 31 kabupaten/kota atau

81,6%. Untuk pencapaian program baik berdasarkan target Rencana Strategis, indikator kinerja dari rencana kerja dan target program secara lengkap tergambar pada tabel berikut.

**Tabel 2.42 Pencapaian Program Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2016**

No	Indikator	Target	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Penderita Terdaftar	-	6,392	5,496	6,157	5,570	4,275	4,114	3,946	4,058
2	Prev. Rate per 10.000	< 1 / 10.000	1.69	1.48	1.63	1.46	1.12	1.1	1.02	1.04
3	Penderita Baru	-	6,040	4,653	5,284	4,807	4,069	4,116	4,013	3,991
	C D R per 10.000	< 5 / 100.000	16.00	12.50	13.99	12.63	10.62	10,08	10.3	10.3
	Proporsi MB	-	84	84	86	86	87	87	87	86
	Proporsi Cacat II (%)	< 5%	11%	13%	13%	14%	12%	11%	12%	11%
	Proporsi anak (%)	< 5%	12%	11%	11%	9%	9%	9%	8%	9%
4	RFT Rate	> 90%	91%	87%	90%	89%	87%	90%	91%	90%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.2.6.6 HIV dan AIDS

Sampai dengan Desember 2016, jumlah kasus AIDS yang dilaporkan adalah 17.394 orang, dan 39.224 kasus HIV. Dari jumlah tersebut 3.679 (21.15%) diantaranya meninggal dunia. Angka tersebut sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sebenarnya terjadi, dan dari hasil estimasi sampai dengan tahun 2012 diperkirakan jumlah ODHA di Jawa Timur mencapai 57.321 orang. Dan sejak September 2003, Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebagai wilayah dengan prevalensi HIV yang terkonsentrasi bersama 5 (lima) provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Papua, Bali, Riau dan Jawa Barat. Secara teoritis WHO membagi tingkat epidemi HIV menjadi 3 (tiga) tingkat, yaitu :

1. Tingkat epidemi HIV rendah (*low level epidemic*), dimana prevalensi HIV pada kelompok risiko tinggi di bawah 5% dan atau prevalensi HIV pada populasi umum (ibu hamil) di bawah 1%.
2. Tingkat epidemi HIV terkonsentrasi (*concentrated level epidemic*), dimana pada sub populasi tertentu (kelompok risiko tinggi) seperti kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK), kelompok *Injecting Drug Users/Use* (IDU), kelompok Waria, Narapidana di Lembaga Perasyarakatan dan sebagainya, prevalensi HIV secara

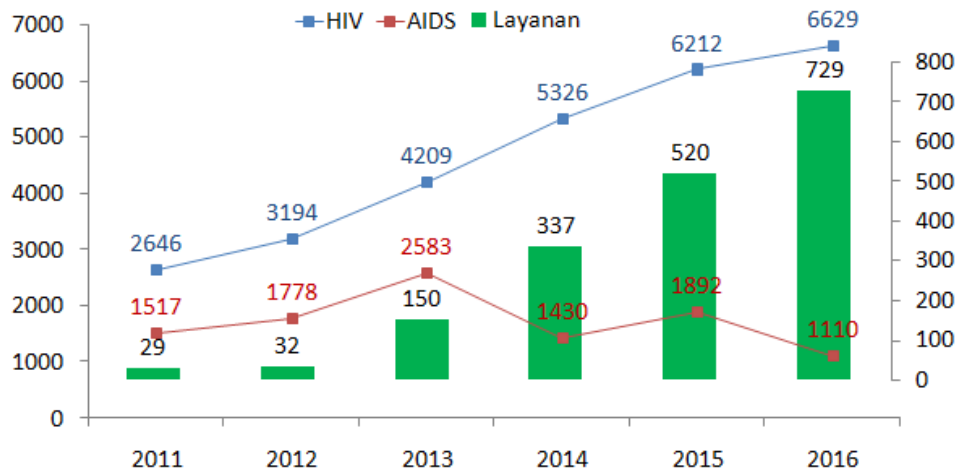
konsisten (dalam beberapa tahun pengamatan) lebih dari 5% dan atau prevalensi HIV pada populasi umum (ibu hamil) masih di bawah 1%.

3. Tingkat epidemi HIV meluas (*generalized level epidemic*), dimana prevalensi HIV pada kelompok risiko tinggi di atas 5% dan atau prevalensi HIV pada polpulasi umum (ibu hamil) di atas 1%.

Berdasarkan waktu, maka nampak sekali pesatnya peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS dari waktu ke waktu. Kalau tahun 1989 hanya 1 orang penderita yang dilaporkan maka mulai tahun 1999 meningkat tajam sekali dari tahun ke tahun dan jumlahnya terus bertambah hingga Desember 2016.

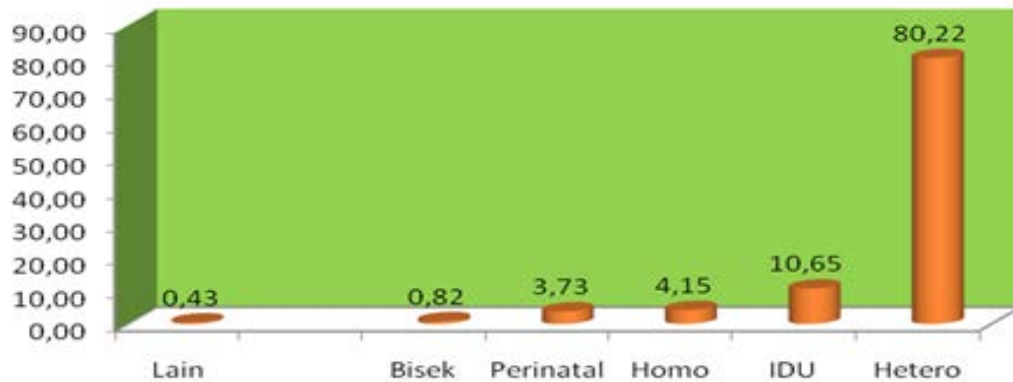
Penambahan kasus AIDS dari tahun ke tahun sebagian besar berasal dari faktor seksual. Sampai Desember 2016 secara kumulatif kasus AIDS yang dilaporkan sebanyak 17.394 kasus, dimana 3.679 (21,15%) diantaranya sudah meninggal. Sedangkan Kasus HIV yang ditemukan melalui VCT ( KTS dan KTIP ) sebanyak 39.224 kasus. Dari 38 kabupaten/ kota semua sudah melaporkan adanya kasus HIV dan AIDS melalui Sistim Informasi HIV/ AIDS (SIHA), namun sangat disadari bahwa kasus AIDS tersebut masih jauh lebih sedikit dibandingkan kasus yang sesungguhnya mengingat tidak seluruh kasus AIDS yang ada atau baru sebagian kecil yang dilaporkan (*under reported*) melalui laporan surveilans AIDS. Ditinjau dari cara penularan pada kasus AIDS dari data laporan Surveilans nampak bahwa, faktor risiko yang tertinggi adalah heteroseksual 80,22%, pengguna narkoba suntik (IDU) 10,65%, homoseksual 4,15%, perinatal dari ibu ke bayi 3,73%, biseksual 0,82% dan faktor lain sebesar 0,43%.

Berdasarkan jenis kelamin, kasus AIDS sampai dengan tahun 2015 didominasi kelompok laki-laki sebesar 10.766 kasus (61,89%) dan wanita sebesar 6.628 kasus (38,11%). Namun proporsi perempuan cenderung mengalami peningkatan secara tajam dari tahun ke tahun. Dan dari segi kelompok umur, maka kasus AIDS didominasi oleh kelompok umur seksual aktif, yang tertinggi adalah kelompok usia 25-29 tahun 3.626 kasus, disusul kelompok usia 30-34 tahun dengan 3.525 kasus, serta kelompok usia 35-39 tahun dengan 2.586 kasus. Disamping itu kasus HIV sudah ada yang manifestasi menjadi AIDS di kalangan anak-anak dengan 429 kasus usia 0-9 tahun.



**Gambar 2.20 Perkembangan Kasus HIV/AIDS dan Jumlah Layanan Tes HIV per Tahun Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2016**

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*



**Gambar 2.21 Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita Provinsi Jawa Timur sampai dengan 2016**

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*



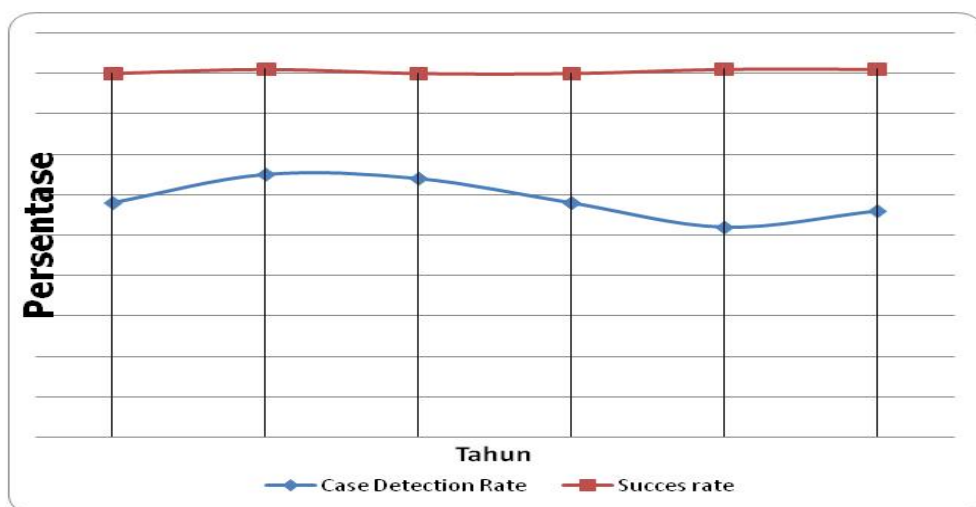
**Gambar 2.22 Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin Penderita Provinsi Jawa Timur, Sampai Dengan Tahun 2016**

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*



### 2.2.2.6.7 Tuberkulosis (TB)

Capaian indikator program, Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dalam jumlah penemuan penderita TB BTA positif kasus baru (di bawah Jawa Barat). Akan tetapi dari angka penemuan kasus baru BTA positif (*Case Detection Rate/CDR*), Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedelapan dari 33 provinsi di Indonesia. CDR pada tahun 2015 adalah 56%, dengan jumlah kasus TB BTA positif sebanyak 23.456 penderita. Target CDR yang ditetapkan adalah minimal 70%. Dari sisi kesembuhan penderita yang diobati, angka yang didapatkan adalah 84%. Angka tersebut merupakan data pasien yang diobati pada tahun 2014 yang telah menyelesaikan keseluruhan pengobatannya. Target kesembuhan yang ditetapkan adalah 85%. Sedangkan angka keberhasilan (*Success Rate*) penderita TB BTA positif kasus baru di Jawa Timur pada tahun 2015 sudah sebesar 91%, sedangkan target yang ditetapkan adalah lebih dari 90%. Dengan *success rate* >90%, menggambarkan semakin banyak masyarakat yang menderita TB yang menyelesaikan pengobatan sampai tuntas. Mayoritas penderita TB adalah usia produktif, sehingga dengan sembuh dan tuntasnya pengobatan masyarakat dari penyakit TB berarti produktifitas mereka bisa meningkat dan mereka bisa hidup secara normal di masyarakat. Maka *impact*-nya adalah masyarakat Jawa Timur terbebas dari TB dan masalah-masalah sosial ekonomi yang diakibatkan karena penyakit TB.



**Gambar 2.23 Perkembangan Persentase CDR dan *Success Rate* TB Provinsi Jawa Timur Tahun 2010– 2014**

*Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*

### 2.2.2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 2.2.2.3.1 Jalan dan Jembatan

##### A. Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik/Mantap

Kriterianya adalah jalan provinsi yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalannya diukur menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Nilai maksimum IRI adalah 8 atau RCI minimum nilainya sedang. Menurut Peraturan Menteri PU No.13 Tahun 2011 disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantab meliputi kondisi jalan baik dan sedang, sedangkan kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat.

**Tabel 2.43 Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap	-	85,73	88,40	87,68	89,43	88,87

*Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur*

Kewenangan penyelenggaraan jalan di Jawa Timur mengalami perubahan sejak terbitnya SK Menteri PUPR no: 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional tanggal 5 Mei 2015 dan SK Gubernur Jawa Timur No: 188/128/KPTS/013/2016 tentang Penetapan ruas – ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan provinsi tanggal 12 Februari 2016. Perubahan itu terkait adanya perubahan status beberapa ruas jalan di Jawa Timur yang berubah dari status jalan provinsi menjadi jalan nasional ataupun kabupaten/ kota dan status jalan kabupaten/ kota menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Jalan provinsi di Jawa Timur sejak diterbitkannya SK tersebut menjadi 1.421 Km.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2015 adalah sebesar 89,43 persen dan pada tahun 2016 adalah sebesar 88,87 persen mengalami penurunan kemantapan sebesar 0,56 persen. Penurunan kemantapan ini dikarenakan adanya perubahan panjang jalan provinsi yang mengalami perubahan fungsi dan status jalannya.

## B. Jalan Provinsi yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Primer

Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

1. Menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan;
2. Menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

**Tabel 2.44 Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Primer**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Jalan Provinsi Yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan Dalam Sistem Jaringan Jalan Primer	-	-	54,14	55,15	56,89	57,90

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer pada tahun 2015 adalah sebesar 56,87 persen dan pada tahun 2016 adalah sebesar 57,90 persen mengalami peningkatan sebesar 1,03 persen. Peningkatan capaian sasaran 2 tersebut dikarenakan ada peningkatan struktur dan kapasitas jalan sepanjang 27,49 km dengan lebar jalan minimal 7 meter.

## C. Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan kawasan potensial adalah kawasan yang memiliki sumberdaya alam atau sumberdaya manusia baik yang telah di mobilisir maupun yang belum yang dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu kawasan.

**Tabel 2.45 Persentase Pembangunan Jalan menuju Kawasan Potensial**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial	-	-	40,63	40,63	44,50	47,36

Sumber : Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur

Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan pada tahun 2015 adalah sebesar 44,50 % dan pada tahun 2016 adalah sebesar 47,36 % mengalami peningkatan sebesar 2,86 %. Peningkatan capaian sasaran 3 tersebut dikarenakan ada pembangunan Jalan Lintas Selatan di ruas Bts. Kab. Lumajang–Mayangan (3,2 Km) dan ruas Mayangan–Puger (2,8 Km).

#### 2.2.2.3.2 Pengairan

##### A. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku

Air baku adalah air yang dijadikan sebagai sumber untuk pengolahan air bersih. Air baku dapat berasal dari berbagai macam sumberdaya air. Pengertian air bersih adalah air yang terbebas dari zat-zat terlarut dan telah memenuhi syarat kualitas sehingga dapat dikonsumsi sebagai air minum. Ketersediaan air baku merupakan kemampuan suatu sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan air baik secara kuantitas maupun kualitas dalam suatu wilayah. Ketersediaan air baku dapat diperoleh dari beberapa sumber air yang ada di bumi. Sumber air adalah keberadaan air sebagai air baku untuk air bersih bagi kebutuhan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mempertahankan hidupnya.

Pada tahun 2016, ketersediaan dan kebutuhan air baku di Jawa Timur sebesar 87,89 persen. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kebutuhan air baku adalah pembangunan sarana prasarana infrastruktur pengairan dan melakukan normalisasi tampungan air sehingga

diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan penyediaan air baku untuk berbagai keperluan.

**Tabel 2.46 Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Baku	-	-	-	-	-	87,89

Sumber : Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur

## B. Pelayanan Air untuk Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Pelayanan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal. Dalam hal tertentu, pelayanan air irigasi dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Pada tahun 2013, persentase pelayanan air untuk irigrasi di Jawa Timur sebesar 68,00 persen kemudian meningkat menjadi 82,20 persen pada tahun 2016. Kondisi ini berdampak pada peningkatan ketersediaan air sehingga meningkatkan produktifitas pertanian.

**Tabel 2.47 Persentase Pelayanan Air Untuk Irigasi**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pelayanan Air Untuk Irigrasi	-	-	68,00	69,00	70,00	82,20

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

## C. Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik

Pemeliharaan jaringan irigrasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigrasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan oprasi dan mempertahankan kelestariannya. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 68,40 persen, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 68,30 persen. Kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya penyediaan dan pengaturan air dalam menunjang proses produksi pertanian.

**Tabel 2.48 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pelayanan Air Untuk Irigasi	-	-	68,00	69,00	70,00	82,20

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

#### **D. Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir**

Banjir adalah keadaan aliran air dan atau elevasi muka air dalam sungai atau kali atau kanal yang lebih besar atau lebih tinggi dari normal. Genangan yang timbul di daerah rendah sebagai akibat yang ditimbulkannya juga termasuk dalam pengertian ini. Penanggulangan banjir harus dilakukan oleh berbagai pihak antara pemerintah dan masyarakat. Mulai dari tata kota dan saluran air yang baik, serta perilaku masyarakat yang bijak terhadap lingkungan. Persentase penanganan luas daerah genangan banjir di Jawa Timur pada tahun 2016 sebesar 52,29 persen. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan luas genangan banjir adalah melalui operasi pemeliharaan dan rehabilitasi sungai.

**Tabel 2.49 Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir	-	-	-	-	-	52,29

Sumber : Dinas PU Sumberdaya Air Provinsi Jawa Timur

#### **2.2.2.3.3 Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal.



**Tabel 2.50 Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW	-	-	-	-	45

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur*

Persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW pada tahun 2015 sebesar 45 persen. Semakin meningkatnya persentase luas kawasan yang peruntukannya sesuai dengan RTRW maka kesenjangan antar wilayah bisa teratasi, disamping itu meratanya pengembangan infrastruktur wilayah dapat memberikan dampak distribusi ekonomi dan investasi menjadi lebih optimal.

#### 2.2.2.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di beberapa negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh penambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar-dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Sarana perumahan meliputi sarana pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sedangkan prasarana perumahan adalah drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, listrik, telepon, dan jalan.

**Tabel 2.51 Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman**

Indikator	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	32.91	51,55

*Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Jawa Timur*

Persentase capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 32,91 persen, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 51,55 persen. Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

#### 2.2.2.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang meliputi beberapa peraturan seperti peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan daerah, peraturan desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Persentase penegakkan pelanggaran Perda sebagaimana tabel berikut merupakan indikator kinerja daerah (IKD) baru.

**Tabel 2.52 Persentase Penegakkan Pelanggaran Perda**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Penegakkan Pelanggaran Perda	-	-	-	-	5

*Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Timur*

Peraturan Daerah (Perda) adalah Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, ini berarti kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi. Kinerja penagakan pelanggaran Perda ditunjukkan dengan Persentase penegakkan pelanggaran Perda. Tahun 2015 Persentase penegakkan pelanggaran Perda di Jawa Timur sebesar 5 persen. Artinya, bahwa dengan meningkatnya penegakan pelanggaran perda maka akan terjamin adanya kepastian hukum, sehingga diharapkan dapat menciptakan sertamemelihara ketentraman dan ketertiban umum.

## 2.2.2.6 Sosial

### 2.2.2.6.1 Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk mencegah, menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha-usaha kesejahteraan sosial. Pada tahun 2015, persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebesar 13,05 persen. Meningkatnya pembinaan terhadap PSKS maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial akan berjalan dengan baik dan berkesinambungan.

**Tabel 2.53 Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	13,05

*Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur*

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak akan optimal apabila hanya ditangani oleh Pemerintah saja, maka peran serta keterlibatan PSKS dalam proses penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di masyarakat dan dunia usaha menjadi prioritas. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui pembinaan dan peran aktif pilar-pilar partisipan kesejahteraan sosial PSKS.

Mengingat masih cukup besarnya jumlah PMKS di Jawa Timur maka, peran PSKS sangat dibutuhkan untuk memperluas jangkauan penanganan PMKS. Namun berbagai permasalahan masih perlu mendapatkan perhatian yakni :

1. Belum optimalnya kemampuan SDM PSKS khususnya dalam manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS;

2. Kuantitas Pilar-pilar sosial seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, TAGANA, Keluarga pioneer, Wanita Pemimpin dan sebagainya masih perlu ditambah maka dibutuhkan upaya dari *stakeholders*;
3. Minimnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di masyarakat dan pemerintah kabupaten dan kota yang menangani PMKS (selain anak dan lansia) dan belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia pada LKS kabupaten dan kota.

#### 2.2.2.6.2 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan PMKS dan meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya merupakan indikator penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan meningkatnya kemampuan fungsi sosial PMKS merupakan indikasi meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

**Tabel 2.54 Persentase PMKS yang meningkat Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat beberapa permasalahan terbatasnya akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Masih tingginya angka PMKS utamanya Orang Dengan Gangguan Jiwa dan kasus pemasungan, Anak jalanan dan anak telantar serta lanjut usia telantar , Gelandangan Psikotik, Wanita Tunas susila razia, penyandang disabilitas;

2. Tingginya kejadian bencana alam yang membutuhkan penanganan cepat tepat dan tuntas serta Mitigasi kebencanaan alam maupun sosial,
3. Belum optimalnya verifikasi dan validasi data masyarakat miskin di daerah yang membutuhkan ketepatan sasaran, serta koordinasi ditingkat kabupaten kota dalam pendataan penerima manfaat jaminan.

### 2.2.3 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Non Dasar

#### 2.2.3.1 Ketenagakerjaan

##### 2.2.3.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. TPAK dapat juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan, Makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

**Tabel 2.55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,49	69,62	69,78	68,12	67,84

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data BPS Agustus 2015 (hasil Sakernas 2015), jumlah Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas) sebanyak 29,880 juta orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya sebesar 64,81%. TPAK sebesar 67,84% artinya dari 100 orang penduduk usia kerja, 67-68 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan kecenderungan meningkat, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi di tahun 2015 turun menjadi 67,84 dari 68,12 di tahun 2014. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 67,84 persen penduduk Jawa Timur yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. Sedangkan 32,16 persen sisanya memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia). Kondisi kesehatan di Jawa Timur relatif semakin baik membuat angka harapan hidup di Jawa

Timur semakin meningkat dan membuat jumlah lansia semakin bertambah. Di sisi lain, peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut dibarengi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja. Penurunan angka TPAK jika diiringi dengan kegiatan atau program yang dapat meningkatkan kualitas calon angkatan kerja tentunya dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jawa Timur pada masa yang akan datang.

#### 2.2.3.1.2. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan.

**Tabel 2.56 Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	-	-	-	54,99	59,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari tahun 2015 Jawa Timur, diketahui bahwa jumlah pencari kerja tahun 2015 yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur sebanyak 668.507 orang. Dibandingkan tahun 2014, jumlah pencari kerja mengalami penurunan sebanyak 39.128 orang atau sebesar 5,53%. Selanjutnya dari jumlah pencari kerja tersebut, sebanyak 395.654 orang tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2015. Dengan demikian persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap seluruh pencari kerja hampir mencapai 59,18 persen.



### 2.2.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 2.2.3.5.1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari Indeks Pemberdayaan Gender mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

**Tabel 2.57 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Pemberdayaan Gender	68,62	69,29	70,77	68,17	69,41

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Perkembangan IPG pada tahun 2011 sebesar 68,62 dan tahun 2012 sebesar 69,29 kemudian tahun 2013 sebesar 70,77, selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 68,17 dan pada tahun 2015 meningkat kembali menjadi 69,41. Hal ini dapat diartikan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan ekonomi semakin menuju ke arah yang lebih baik terlihat dari semakin meningkatnya kesetaraan peran gender.

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Masih lemahnya kelembangaan dan jaringan pengarusutamaan gender;
2. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak;
3. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan; dan
4. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.

### 2.2.3.3 Ketahanan Pangan

#### 2.2.3.5.1. Ketersediaan Pangan

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyangga pangan nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping untuk stok/cadangan pangan nasional. Sebagai provinsi lumbung pangan, Jawa Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

**Tabel 2.58 Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis di Jawa Timur**

No.	Komoditas/ Pangan		Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
1.	Beras	- Ketersediaan	6.315.925	7.291.033	7.199.536	7.407.895	7.497.433
		- Konsumsi	3.339.123	3.339.123	3.424.550	3.451.752	3.472.972
		- Surplus	3.535.630	3.951.910	3.774.986	3.956.144	4.024.461
2.	Jagung	- Ketersediaan	4.811.184	5.568.307	5.096.065	5.075.010	5.425.136
		- Konsumsi	139.444	139.444	138.108	162.163	163.160
		- Surplus	5.304.261	5.428.863	4.957.958	4.912.847	5.261.976
3.	Kedelai	- Ketersediaan	296.291	296.163	301.558	325.964	316.258
		- Konsumsi	467.327	467.327	402.730	432.434	435.093
		- Surplus	(100.328)	-171.163	-101.172	-106.470	-118.834

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Ketersediaan beras di Jawa Timur pada tahun 2011 sebesar 6.315.925 ton, selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2015 menjadi 7.497.433 ton. Kondisi yang sama juga terjadi pada komoditas jagung dan kedelai, dimana ketersediaanya terus meningkat tiap tahunnya.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan kestabilan pangan.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan Rendahnya ketersediaan pangan pada beberapa komoditi pangan. Selain

berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada bahan pangan beras (88,6 Kg/kapita/tahun);
2. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang (skor PPH 79);
3. Inflasi bahan pangan yang sering tidak terkendali (ekstrim); dan
4. Keamanan Pangan yang masih memerlukan penanganan serius.

#### 2.2.3.5.2. Pola Pangan Harapan (PPH)

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

**Tabel 2.59 Nilai PPH di Jawa Timur Tahun 2013 - 2015**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PPH	-	-	81,10	81,60	83,30

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013 Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur sebesar 81,10, selanjutnya meningkat menjadi 81,60 pada tahun 2014 dan tahun 2015 kembali meningkat menjadi 83,30. Dengan meningkatnya Pola Pangan Harapan (PPH) di Jawa Timur berarti semakin membaiknya kecukupan dan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli masyarakat.

## 2.2.3.4 Lingkungan Hidup

### 2.2.3.4.1. Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas air seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Indeks kualitas air di Jawa Timur terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 49,11 (2013); 49,11(2014); dan 50,33(2015). Dengan semakin meningkatnya indeks kualitas air maka kualitas perairan di Jawa Timur semakin sehat dan membaik.

**Tabel 2.60 Indeks Kualitas Air**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kualitas Air	-	-	49,11	49,11	50,33

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

### 2.2.3.4.2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter(indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NOx). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Kondisi indeks kualitas udara di Jawa Timur pada tahun 2013 sebesar 74,45 dan meningkat menjadi 89,21 pada tahun 2015. Dengan demikian kualitas udara di Jawa Timur semakin bersih dan sehat bagi masyarakat.

**Tabel 2.61 Indeks Kualitas Udara**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kualitas Udara	-	-	72,45	73,10	89,21

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

### 2.2.3.4.3. Indeks Tutupan Lahan

Berdasarkan data dari program Menuju Indonesia Hijau (MIH), klasifikasi hutan terbagi atas hutan primer dan hutan sekunder. Hutan primer adalah hutan yang belum mendapatkan gangguan atau sedikit sekali mendapat gangguan manusia. Sedangkan hutan sekunder adalah hutan yang tumbuh melalui suksesi sekunder alami pada lahan hutan yang telah mengalami gangguan berat seperti lahan bekas pertambangan, peternakan, dan pertanian menetap. Untuk menghitung indeks tutupan hutan yang pertama kali dilakukan adalah menjumlahkan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Indeks tutupan lahan di Jawa Timur menunjukkan peningkatan, yaitu dari 49,47 pada tahun 2013 menjadi 49,59 tahun 2015.

**Tabel 2.62 Indeks Tutupan Lahan**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks tutupan Lahan	-	-	49,47	49,47	49,59

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan
2. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
3. Masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana prasarana persampahan;
4. Terindikasi tingginya degradasi lingkungan, yang berpotensi memicu bencana alam.

### 2.2.3.5 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

#### 2.2.3.5.1. Persentase Penduduk Ber KTP

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga

Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka sejak tahun 2013 di Provinsi Jawa Timur penerapan e-KTP sudah meliputi 38 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang dihimpun dari dinas/instansi terkait realisasi perekaman data e-KTP tahun 2013 sebesar 84,27 persen dan pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan dalam perekaman data e-KTP yaitu menjadi 89,62 persen. Pada Tahun 2015 hasil perekaman KTP elektronik di 38 Kabupaten/Kota terus menunjukkan peningkatan menjadi 92,09 persen. Persentase Penduduk Ber-KTP adalah indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

**Tabel 2.63 Persentase Penduduk Ber-KTP di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Penduduk Ber-KTP (%)	76,87	76,86	84,27	89,62	92,09

*Sumber : Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur*

Peningkatan kepemilikan e-KTP selama 5 tahun terakhir menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan e-KTP hal ini ditandai dengan meningkatnya perekaman jumlah e-KTP dari tahun ke tahun. Selain itu, pada saat ini pelayanan e-KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan setempat.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan terkait belum optimalnya pelaksanaan e-KTP. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk; dan
2. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



### 2.2.3.6 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### 2.2.3.6.1. Pertumbuhan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kelurahan

Wilayah pedesaan selalu dicirikan dengan rendahnya tingkat produktivitas kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas hidup dan pemukiman. Pedesaan dianggap sebagai daerah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan. Padahal sebenarnya kawasan pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal. Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

**Tabel 2.64 Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel	-	-	-	-	26

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur*

Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 26 persen. Hal ini perlu ditingkatkan kembali karena peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat desa/kel secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraannya yang semakin membaik sehingga bebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Lemahnya pemahaman aparat desa terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan desa;
2. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
3. Belum Optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi; dan
4. Belum optimalnya kelembagaan masyarakat desa dan kelembagaan ekonomi desa (Bumdes, LKMK, LPMD, dll).

### 2.2.3.6.2. Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Yang Aktif adalah indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

**Tabel 2.65 Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yang Aktif (%)**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	-	-	-	-	60

*Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2015, Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif sebesar 60 persen. Dengan semakin meningkatnya lembaga kemasyarakatan Desa/Kel. yang aktif diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

### 2.2.3.7 Pengendalian Penduduk dan KB

#### 2.2.3.7.1. Rasio Akseptor KB (%)

Program keluarga berencana (KB) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan program KB adalah Rasio Akseptor KB. Rasio akseptor KB digunakan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka

partisipasi KB (akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan pengendalian jumlah penduduk.

**Tabel 2.66 Rasio Akseptor KB Di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Akseptor KB (%)	82,74	83,35	84,10	83,65	75,44

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Harus diakui Program KB pada dekade ini sudah tidak segencar dulu lagi, hal ini kemungkinan karena efek tidak langsung dari era otonomi pemerintahan dimana penanganan masalah KB antara daerah yang satu dengan yang lain bisa berbeda instansi. Selain itu juga koordinasi dengan pemerintahan di atasnya kurang intens. Hal inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah akseptor KB. Karena kalau kita perhatikan dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai 2015 jumlah akseptor KB terus mengalami penurunan dari sebesar 84,1 persen di tahun 2013 sekarang pada tahun 2015 tinggal 75,44 persen. Begitu juga peserta KB aktif (PUS usia 15-49 yang sedang menggunakan alat/cara KB) juga terus mengalami penurunan dan pada tahun 2015, PUS yang sedang ber KB sekitar 63,79 persen.

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Rendahnya minat akseptor metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP); dan
2. Tingginya laju pertumbuhan penduduk.

### 2.2.3.8 Perhubungan

#### 2.2.3.8.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sector transportasi oleh Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.67 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perhubungan	-	-	82,06	85,88	74,41

Sumber : Dishub LLAJ Provinsi Jawa Timur

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan pada tahun 2013-2014 menggunakan dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik yang didalamnya terdapat 14 (Empat belas) unsur variable sebagai dasar penilaian yaitu Prosedur pelayanan (U1), Persyaratan pelayanan (U2), Kejelasan petugas pelayanan (U3), Kedisiplinan petugas pelayanan (U4), Tanggung jawab petugas pelayanan (U5), Kemampuan petugas pelayanan (U6), Kecepatan pelayanan (U7), Keadilan mendapatkan pelayanan (U8), Kesopanan dan keramahan petugas (U9), Kewajaran biaya pelayanan (U10), Kepastian biaya pelayanan (U11), Kepastian jadwal pelayanan (U12), Kenyamanan lingkungan (U13), Keamanan pelayanan (U14), Sedangkan pada pengukuran IKM di tahun 2015 terjadi perubahan dasar variable dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan 9 (sembilan) unsur variabel penilaian terdiri dari Persyaratan pelayanan (U1), Prosedur pelayanan (U2), Waktu pelayanan (U3), Biaya/Tarif pelayanan (U4), Produk Spesifikasi Jenis pelayanan (U5), Kompetensi Pelaksana (U6), Perilaku Pelaksana (U7), Maklumat Pelayanan (U8), Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U9), dimana pada tahun 2015 maklumat pelayanan terkait layanan Penimbangan Kendaraan Angkutan Barang belum dipublikasikan, sehingga berpengaruh terhadap variabel penilaian Indeks Kepuasan masyarakat. Maklumat pelayanan dimaksud merupakan bentuk komitmen yang memberikan hak kepada masyarakat pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan & kebutuhannya, kepastian biaya dan waktu penyelesaian, pengaduan dan melakukan pengawasan.

### **2.2.3.9 Komunikasi dan Informasi**

#### **2.2.3.9.1. PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki Website sesuai Standar Muatan TIK**

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet,

sedangkan teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Persentase PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK pada tahun 2015 sebesar 40 persen. Kondisi ini perlu ditingkatkan terus, karena dengan PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang sudah memiliki website sesuai standar muatan TIK maka arus informasi akan lebih mudah dan cepat.

**Tabel 2.68 Persentase PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK	-	-	-	-	40

*Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur*

Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Masih Terjadinya Kesenjangan Di Bidang Komunikasi Sosial Dan Teknologi Informasi (Digital Divide) Dimasyarakat Khususnya Antara Desa Dan Kota;
2. Belum optimalnya penyebar luasan informasi kepada masyarakat;
3. Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
4. Masih terbatasnya Sarana dan prasarana Monitoring Isi Siaran di Media Televisi dan Radio.

### **2.2.3.10 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi sebagai wadah berkembangnya koperasi dan UKM anggotanya. Beberapa hal yang merupakan parameter yang menunjukkan akumulasi berfungsinya kelembagaan koperasi yang melatarbelakangi munculnya indikator tersebut diantaranya :

1. Adanya perubahan kewenangan di Undang - Undang 23 Tahun 2014 → mikro di Kabupaten/Kota,
2. Perubahan dinamika global → persaingan global,

3. Perubahan regulasi → status LKM yang terkendala Undang – Undang tentang LKM

**Tabel 2.69 Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi UKM**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi UKM	-	-	87,93	87,98	7,00

*Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur*

Perkembangan persentase pertumbuhan omzet Koperasi UKM di Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2013-2015) berfluktuatif, pada tahun 2013 sebesar 87,93 persen, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 87,98 dan pada tahun 2015 turun menjadi 7 persen. Peningkatan omzet Koperasi UKM ini akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian dan penciptaan kesempatan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran.

Berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Struktur pelaku usaha didominasi usaha mikro yang informal dan memiliki aset dan akses ke pembiayaan serta produktivitas yang terbatas. (95,72% Usaha Mikro 6.533.694 unit dari 6.825.931 unit sensus UMKM 2012);
2. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Kredit UMKM hanya 29,6% total kredit;
3. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas);
4. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud;
5. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen;
6. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (2 inkubator bisnis); dan
7. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan UMKM (3.856 koperasi tidak aktif).



### 2.2.3.11 Penanaman Modal

#### 2.2.3.11.1. Izin Prinsip Investasi

Total nilai izin prinsip investasi menunjukkan peningkatan selama tahun 2011-2013, yaitu masing-masing 70,91 Trilyun (2011); 76,71 (2012); dan 113, 64 Trilyun (2013), selanjutnya pada tahun 2014 sedikit menurun menjadi 110,63 Trilyun dan pada tahun 2015 meningkat kembali sebesar 55,98 persen menjadi 172,57 Trilyun. Total proyek izin prinsip investasi pada tahun 2015 sebanyak 758 proyek, yang terdiri dari 223 proyek PMA dan 535 proyek PMDN. Sedangkan untuk total tenaga kerja yang terserap sebanyak 57.755 tenaga kerja, dengan rincian 26.688 tenaga kerja PMA dan 32.067 tenaga kerja PMDN.

**Tabel 2.70 Izin Prinsip Investasi di Jawa Timur Tahun 2011 - 2015**

Izin Prinsip Investasi	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PMDN (Trilyun Rp.)	26,23	46,31	38,95	35,72	42,31
PMA (Trilyun Rp.)	44,68	30,40	74,69	74,91	130,26
<b>TOTAL</b>	<b>70,91</b>	<b>76,71</b>	<b>113,64</b>	<b>110,63</b>	<b>172,57</b>

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.3.11.2. Realisasi Investasi

Total nilai realisasi investasi menunjukkan peningkatan selama tahun 2011-2015, yaitu masing-masing 110,47 Trilyun (2011); 133,43 (2012); dan 145,06 Trilyun (2013); 145,03 Trilyun (2014); dan 163,36 Trilyun (2015). Total proyek untuk realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2015 sebanyak 556 proyek, yang terdiri dari 247 proyek PMA dan 309 proyek PMDN serta PMDN Non Fasilitas sebanyak 121.630 unit usaha. Sedangkan untuk total tenaga kerja PMA dan PMDN yang terserap sebanyak 62.687 tenaga kerja, dengan rincian 22.699 tenaga kerja PMA dan 39.988 tenaga kerja PMDN serta PMDN Non Fasilitas sebanyak 870.379 tenaga kerja.

**Tabel 2.71 Realisasi Investasi di Jawa Timur di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Non Fas (Trilyun Rp.)	70,07	79,57	76,58	83,19	95,77

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PMDN (Trilyun Rp.)	20,33	28,73	34,85	42,55	35,49
PMA (Trilyun Rp.)	20,07	25,13	33,63	19,29	32,42
<b>TOTAL</b>	<b>110,47</b>	<b>133,43</b>	<b>145,06</b>	<b>145,03</b>	<b>163,68</b>

Sumber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan masih terdapat permasalahan Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurang memadainya kapasitas SDM dan infrastruktur penunjang investasi; dan
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi

## 2.2.3.12 Kepemudaan dan Olahraga

### 2.2.3.12.1. Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Pembangunan

Pemuda merupakan penerus perjuangan generasi terdahulu untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pemuda menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa, Pemuda lah yang dapat merubah pandangan orang terhadap suatu bangsa dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan suatu bangsa dengan ide-ide ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepadanilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur.

**Tabel 2.72 Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Pembangunan**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pemuda Yang Berpartisipasi Dan Berperan Aktif Dalam Pembangunan	-	-	16,62	26,13	29,52

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur

### 2.2.3.12.2. Pembibitan Olahragwan Berbakat

Pada tahun 2015, persentase pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sebesar 29,52 persen. Hal ini perlu terus ditingkatkan agar pemuda dapat berfikir positif untuk berkreasi yang akan melahirkan karya – karya nyata yang monumental dan membawa pengaruh dan perubahan yang besar dalam pembangunan bangsa dan negaranya. Di samping itu juga menguasai pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global.

Kebutuhan akan pentingnya olah raga, di samping untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, tetapi juga merupakan salah satu hiburan bagi para peminat olah raga sekaligus mempererat hubungan sosialisasi antar pemuda. Pembibitan olahragawan yang berbakat merupakan salah satu cara untuk mengasah bakat dari atlet agar bisa meningkatkan prestasinya di kancah nasional maupun internasional.

**Tabel 2.73 Persentase Pembibitan Olahragwan Berbakat**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase pembibitan olahragawan berbakat	-	-	16,07	37,96	8,64

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2013, persentase pembibitan olahragawan berbakat sebesar 16,07, meningkat di tahun 2014 mencapai 37,96. Sedangkan di tahun 2015 mengalami capaiannya mengalami penurunan yaitu 8,64 hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan yang berbeda.

Selain berdasarkan gambaran data di atas beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kepemudaan dan olah raga adalah:

1. Masih rendahnya kualitas pemuda;
2. Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya;
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.
4. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan (PPLP dan PPLPD) dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi
5. Masih rendahnya kualitas atlet.

### 2.2.3.13 Kebudayaan

#### 2.2.3.13.1. Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan penghargaan Nasional pada tahun 2015 sebanyak 16 penghargaan. Hal ini mencerminkan karya seni budaya di Jawa Timur berkembang dengan pesat.

**Tabel 2.74 Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional	-	-	13	11	16

*Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim*

#### 2.2.3.13.2. Cagar Budaya (Benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang Dipelihara/Dilestarikan

Cagar budaya yang terdiri dari benda, struktur, situs dan kawasan merupakan warisan yang harus dipelihara sesuai amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010. Pada tahun 2011 sampai dengan 2015 indikator yang digunakan adalah jumlah cagar budaya sebanyak 1.268 buah, tetapi pada kelanjutannya berubah menjadi prosentase cagar budaya (benda, struktur, situs, kawasan) yang dipelihara/dilestarikan melalui proses pendataan & pemeringkatan cagar budaya yang dilestarikan. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat hal yang lain yang perlu mendapatkan perhatian pad aspek kebudayaan adalah :

1. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya di masyarakat;
2. Semakin turunnya minat generasi muda terhadap budaya daerah; dan
3. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan asset budaya

### 2.2.3.14 Perpustakaan

#### 2.2.3.14.1. Indeks Minat Baca

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat, secara kasar sebenarnya minat baca masyarakat Jawa Timur ~~minat bacanya~~ cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari dari respon balik masyarakat Jawa Timur terhadap setiap kegiatan perpustakaan seperti Mobil Perpustakaan Keliling, Mobil Dongeng Keliling, Hari Kunjung Perpustakaan dan Roadshow Perpustakaan serta Bedah Buku.. Penelitian terhadap indeks minat baca masyarakat Jawa Timur pernah dilakukan di tahun 2006 bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dengan hasil 42, dilakukan penelitian kembali di tahun 2013 bekerjasama dengan Universitas Airlangga dengan capaiannya sebesar 56,05, dan dihitung kembali pada tahun 2015 sebesar 65,25.

**Tabel 2.75 Indeks Minat Baca**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Minat Baca			56,05	-	65,25

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur*

#### 2.2.3.14.2. Persentase Penerbit dan Pengusaha Rekaman Yang Menyerahkan Hasil Karya Cetak Karya Rekam

Semenjak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, belum banyak karya cetak karya rekam yang dapat disimpan oleh perpustakaan daerah terutama dalam rangka mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya bangsa. Dalam undang-undang tersebut mengamanahkan bahwa semua penerbit (setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak) dan pengusaha rekaman (setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam) wajib menyerahkan hasil karya terbitan dan karya

rekaman sebanyak satu eksemplar/buah per judul kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, Sub Urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Karya cetak karya rekam koleksi daerah akan menunjang pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta berperan penting dalam menunjang pembangunan pendidikan, kebudayaan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran informasi. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek perpustakaan, yakni:

1. Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola perpustakaan
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan

### **2.2.3.15 Kearsipan**

#### **2.2.3.15.1. Arsip yang Terselamatkan**

Penyelamatan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip dari orang yang tidak berhak, agar arsip tidak rusak atau hal-hal lain yang menyebabkan hilangnya nilai guna arsip, sehingga tidak dapat disimpan secara berkelanjutan sebagai arsip statis. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis. Penambahan khasanah arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip statis diselamatkan dan dilestarikan di lembaga kearsipan, sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.

Dengan penyerahan arsip statis dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan, berarti bahwa tanggungjawab dan hak pengelolaan arsip statis akan berpindah dari lembaga pencipta ke lembaga kearsipan. Hal ini juga berarti akan



mengurangi volume arsip yang semakin meningkat di setiap OPD. Itulah sebabnya manajemen kearsipan harus diterapkan agar tidak terjadi penumpukan arsip di tiap OPD. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yakni Belum optimalnya penataan tertib arsip, dan terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Pengelola Kearsipan.

#### **2.2.3.15.2. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tertib Arsip**

Manajemen Kearsipan adalah suatu proses yang disusun secara sistematis untuk mencapai kinerja organisasi yang efektif dan efisien, mulai dari penciptaan, pengumpulan hingga proses penyimpanan, penyusutan dan pelayanan arsip. Dengan kata lain, manajemen kearsipan meliputi siklus daur hidup arsip. Tujuan akhir dari manajemen kearsipan adalah menjaga keseimbangan volume arsip dan pendaayagunaannya bagi kepentingan lembaga. Dengan terselenggaranya manajemen kearsipan di setiap OPD diharapkan akan tercapai tertib arsip.

Standar untuk penyelenggaraan tertib arsip mengalami perubahan sesuai dengan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan sehingga perhitungan organisasi perangkat daerah yang tertib arsip pun berubah.

#### **2.2.4 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Pilihan**

##### **2.2.4.1 Kelautan dan Perikanan**

Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB tahun 2015 sebesar 4,70 persen.

**Tabel 2.76 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	-	-	-	-	4,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selain berdasarkan gambaran di atas terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek kelautan dan perikanan, yakni:

1. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran;
2. Menurunnya potensi ikan lemuru di perairan selat Bali;
3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan;
4. Tingginya tingkat abrasi pantai;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
6. Mutu dan hasil tangkapan masih rendah;
7. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System belum optimal;
8. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah;
9. Harga pakan ikan pabrikan tinggi;
10. Rendahnya kualitas garam rakyat;
11. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing; dan
12. Kualitas SDM non aparatur ( nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan.

#### **2.2.4.2 Pariwisata**

Dalam era globalisasi saat ini, sektor pariwisata telah menjadi salah satu industri terbesar dan terkuat di dunia. Bahkan pariwisata merupakan penyumbang terbesar dalam pemasokan pendapatan terutama dalam hal perekonomian masyarakat dan negara. Sekarang kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat mulai dari masyarakat kota sampai pada masyarakat desa. Kegiatan pariwisata yang dilakukan masyarakat dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB di Jawa Timur menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu dari 4,98 persen tahun 2013 dan menjadi 5,48 persen pada tahun 2015. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian pada sektor pariwisata, yakni:

1. Kurangnya sinergi dengan stakeholder terkait;
2. Lemahnya pemasaran kedalam maupun luar negeri;

3. Kurangnya kualitas dari kompetensi profesi pelaku usaha pariwisata; dan
4. Lemahnya pengelolaan dan daya tarik wisata Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.

**Tabel 2.77 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	-	-	4,98	5,26	5,48

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov Jatim

### 2.2.4.3 Pertanian

#### 2.2.4.3.1. Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB

Sub kategori tanaman pangan meliputi komoditi: padi dan palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar, dan palawija lainnya). Pertumbuhan Sub sektor ini terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 1,38 persen (2013); 2,98 persen (2014); dan 3,39 persen (2015).

**Tabel 2.78 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB	-	-	1,38	2,98	3,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.3.2. Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh, kopi, coklat, tebu, rami, serat manila dan tanaman lainnya. Pada tahun 2013, pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB sebesar 1,81 persen, kemudian

meningkat pada tahun 2014 sebesar 4,97 persen dan turun kembali pada tahun 2015 menjadi 1,61 persen.

**Tabel 2.79 Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan sub sektor perkebunan terhadap PDRB	-	-	1,81	4,97	1,61

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.3.3. Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB

Sub kategori peternakan dalam kurun waktu 2011-2015 kontribusinya relatif stabil antara 2,70 - 2,74 persen. Berbeda dengan kontribusinya yang relatif stabil, pertumbuhan sub kategori peternakan cenderung mengalami perlambatan dari tahun 2011 sebesar 4,19 persen menjadi 1,15 persen pada tahun 2014, namun pada tahun 2015 terjadi akselerasi percepatan menjadi 2,01 persen. Perlambatan ini diakibatkan karena terjadi penurunan populasi berdasarkan hasil sensus pada tahun 2013.

**Tabel 2.80 Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Kontribusi Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB	2,74	2,70	2,73	2,74	2,74
Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB	4,19	3,30	1,07	1,15	2,01

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.3.4. Permasalahan pada Sektor Pertanian

Permasalahan utama pada sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) adalah rendahnya pertumbuhan sektor pertanian (share PDRB/jumlah tenaga kerja) dan NTP yang diakibatkan oleh produksi dan produktivitas yang belum optimal yang disebabkan oleh beberapa permasalahan pokok:

1. Kepemilikan lahan pertanian relatif sempit (0,39 Ha);
2. Rendahnya bahan organik tanah, dan masih terjadinya alih fungsi lahan;

3. Fluktuasi Perubahan iklim yang mengakibatkan gangguan produksi;
4. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
5. Masih terjadi kehilangan hasil pertanian;
6. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah;
7. Masih adanya pemotongan sapi betina produktif;
8. Terbatasnya RPH modern yang berstandar SNI;
9. Terbatasnya Petugas Lapangan Pertanian;
10. Kelembagaan petani yang masih berdasarkan alamat (by address);
11. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan;
12. Belum optimalnya Perlindungan usahatani (asuransi pertanian baru tahap pilot project);
13. Masih terjadi mutasi lahan ke non pertanian yang cukup tinggi; dan
14. Masih tingginya harga pakan ternak.

#### **2.2.4.4 Kehutanan**

##### **2.2.4.4.1. Pertumbuhan Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu terhadap PDRB**

Sub kategori kehutanan dan penebangan kayu meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun, getah, dan akar, termasuk jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Dicakup juga jasa yang menunjang kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak. Pertumbuhan Sub sektor kehutanan dan penebangan kayu terhadap PDRB terus menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, yaitu masing-masing 0,44 persen (2011), 0,52 persen (2012), 0,53 persen (2013); 0,54 persen (2014); dan 0,55 persen (2015).



**Tabel 2.81 Persentase Pertumbuhan Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	0,44	0,52	0,53	0,54	0,55

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.4.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Keberhasilan pembangunan di Jawa Timur tentu tidak terlepas dari peran Ketersediaan pasokan daya listrik. Ketersediaan listrik bisa menjadi angin segar bagi pelaku bisnis dan industri untuk mengembangkan usahanya di Jawa Timur, karena dengan kondisi kelistrikan yang ada saat ini, bisa memberikan ruang gerak untuk para pelaku bisnis dan investor dalam memajukan usahanya tanpa rasa khawatir kekurangan atau defisit listrik. Kebutuhan daya listrik dari waktu ke waktu terus menunjukkan peningkatan yang pesat, sehingga diperlukan perhitungan yang matang mengenai perencanaan untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya di Jawa Timur. Pengelolaan kelistrikan di Jawa Timur dilakukan oleh BUMN seperti Pembangkitan Jawa Bali (PJB), Indonesia Power dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Selanjutnya PLN yang mendistribusikannya kepada masyarakat/ instansi/ perusahaan/ lembaga swasta untuk berbagai keperluan.

**Tabel 2.82 Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Elektrifikasi	-	-	0,80	0,83	0,85

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013 rasio elektrifikasi mencapai 0,80, meningkat pada tahun 2014 menjadi 0,83 dan pada tahun 2015 menjadi 0,85. kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kebutuhan listrik yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik rumah tangga, swasta, industri, instansi, lembaga perusahaan lainnya.



#### 2.2.4.6 Perdagangan

Persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Selama tahun 2013-2015, persentase share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan fluktuatif. Tahun 2013 mencapai 1,70 persen, menurun atau minus 0,50 persen pada tahun 2014, meningkat sebesar 1,63 persen tahun 2015.

**Tabel 2.83 Persentase Share Net Ekspor pada PDRB menurut Penggunaan**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Share net ekspor pada PDRB menurut penggunaan	-	-	1,70	-0,50	1,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian pada sektor perdagangan, yakni:

1. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri;
2. Kurangnya promosi & kerjasama ekonomi antar Swasta dgn Swasta (P to P) maupun Swasta dgn Pemerintah (P to G) Pemerintah dgn Pemerintah (G to G);
3. Masih terjadi Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli;
4. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan.

#### 2.2.4.7 Perindustrian

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Kontribusi sektor Industri terhadap pembangunan nasional dari tahun ke tahun menunjukkan kontribusi yang signifikan. Setiap wilayah memiliki potensi dan keunggulan sektoral yang menjadi basis perekonomian dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur yang menjadikan industri pengolahan sebagai basis pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan mendorong pengembangan wilayah wilayah tertentu sebagai pusat pertumbuhan kegiatan industri. Pengembangan wilayah wilayah tersebut diharapkan selain dapat

sebagai kegiatan ekonomi utama (prime mover) juga dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap tumbuhnya sektor sektor yang lain.

**Tabel 2.84 Persentase Pertumbuhan Industri**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pertumbuhan Industri	5,56	1,60	0,87	0,50	0,47

Sumber : Disperindag Provinsi Jawa Timur

Jumlah perusahaan industri di Jawa Timur terus mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 2011-2015 walaupun angka pertumbuhannya kecenderungan menurun selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan perusahaan industri tertinggi pada tahun 2011 dimana tumbuh sebesar 5,56 persen dibanding tahun 2010 sedangkan tahun 2015 pertumbuhan sebesar 0,47 persen. Perkembangan jumlah industri berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru sehingga mengurangi pengangguran di Jawa Timur. Selain berdasarkan gambaran data diatas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Masih tingginya tingkat ketergantungan produk dari bahan baku impor;
2. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk;
3. Hambatan peningkatan efisiesi produksi; dan
4. Efisiensi biaya transaksi relatif masih rendah.

#### 2.2.4.8 Ketramigrasian

Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) adalah merupakan indikator baru dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Jawa Timur. Persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga) tahun 2015 sebesar 82,00 persen.

**Tabel 2.85 Presentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Transmigran Yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi Dan Sosialnya (Kepala Keluarga)	-	-	-	-	62,00

Sumber : Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur

Untuk meningkatkan persentase transmigrasi ini dibutuhkan peran pemerintah, diantaranya pemerataan penduduk ke daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar tetapi belum dimanfaatkan dengan maksimal dan memberikan pelatihan serta keterampilan pada penduduk transmigrasi agar memanfaatkan potensi sumber daya alam sekitar untuk meningkatkan perekonomiannya. Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Kurangnya minat masyarakat untuk bertransmigrasi; dan
2. Kurangnya kesiapan daerah tujuan penempatan transmigran

## **2.2.5 Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan**

### **2.2.5.1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada tahun 2016, capaian persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD adalah 100%.

### 2.2.5.2 Badan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pada tahun 2013, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 11,57 trilyun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 13,58 trilyun. Penerimaan terbesar dari PAD bersumber dari Pajak Daerah dan yang terendah dari Retribusi daerah.

**Tabel 2.86 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp. Juta)	-	-	11.579.340,71	14.442.216,53	13.586.420,24

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

### 2.2.5.3 Badan Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi Jawa Timur memantapkan komitmennya untuk mencapai *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pencapaian hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.87 Nilai Opini BPK**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Opini BPK	-	-	WTP	WDP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2013, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), selanjutnya pada tahun 2014 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), hal ini dikarenakan masih ditemukan kelemahan yang harus

diperbaiki sehingga tidak ada lagi temuan yang masih berulang pada Temuan Sistem Pengendalian Intern serta Temuan Kepatuhan Perundangan – Undangan dalam pengelolaan keuangan di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk opini BPK Tahun 2015 Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Dengan pencapaian ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan putusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

#### 2.2.5.4 Badan Kepegawaian Daerah

##### 2.2.5.4.1. Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu unsur penentu upaya peningkatan kinerja organisasi dan penyediaan tenaga kerja yang memberikan perspektif yang lebih tajam dan spesifik terhadap pekerja dan pekerjaannya, karena kompetensi merujuk kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (*superior performer*).

Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi di Jawa Timur pada tahun 2014 sebesar 87,70 persen, pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 96,20 persen. Kondisi ini mencerminkan penataan pegawai ASN telah sesuai dengan formasi kebutuhan dan kompetensi sehingga menciptakan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negeri (ASN) yang profesional dan berkualitas.

**Tabel 2.88 Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi	-	-	75,3	87,70	96,20

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.4.2. Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)

Indeks Profesionalitas Pegawai adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat profesionalitas individu atau kelompok dalam suatu organisasi dengan menggunakan composite index. Perhitungan indeks professional pegawai didasarkan pada 4 (empat) komponen, yaitu Kompetensi, Kinerja, Kompensasi (penghasilan), dan Disiplin. Pada tahun 2013, Indeks Profesionalitas Pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar 73, meningkat di tahun 2015 menjadi 75. Capaian ini mencerminkan bahwa Profesionalitas Pegawai setiap tahunnya meningkat.

**Tabel 2.89 Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	-	-	73	73,5	75

Sumber : BKD Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.5 Badan Pendidikan dan Pelatihan

Tujuan penyelenggaraan diklat adalah membentuk aparatur sipil negeri (ASN) yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat. Pada tahun 2013, Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90) sebesar 86,14, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 91. Kondisi tersebut mencerminkan aparatur sipil negeri (ASN) di Jawa Timur lebih professional dan berkualitas serta memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai pelayan masyarakat

**Tabel 2.90 Persentase Peserta Diklat Yang memperoleh Sertifikat Kompetensi (Certificate Of Competence) dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal memuaskan (skor 80,1-90)**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi ( <i>certificate of competence</i> ) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)	-	-	86,14	90,70	91

Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur



## 2.2.5.6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

### 2.2.5.6.1. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi. Aspek demokrasi yang dimaksud adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja.

**Tabel 2.91 Indeks Demokrasi Indonesia**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks Demokrasi Indonesia	55,98	54,99	59,32	70,36	76,90

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Timur 2015 mencapai 76,90 dalam skala 0 sampai 100, angka ini naik 6,54 poin dibandingkan dengan IDI Jawa Timur 2014 sebesar 70,36. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Timur masih berada pada kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks >80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60). Perubahan IDI Jawa Timur dari 2014-2015 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) yang naik 3,64 poin (dari 81,62 menjadi 85,26), Hak-Hak Politik (Political Rights)

yang naik 11,15 poin (dari 56,29 menjadi 67,44), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) yang naik 2,85 poin (dari 78,54 menjadi 81,39).

#### 2.2.5.6.2. Kejadian terkait Poleksosbud di Jawa Timur

Kemajemukan masyarakat Jawa Timur yang sangat tinggi, terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, yang mewarnai kehidupan masyarakatnya. Perbedaan tersebut membuat perbedaan cara pandang, komunikasi dalam interaksi sehari-hari, sehingga rawan untuk terjadinya kejadian perselisihan dan pertikaian, terutama yang dilatarbelakangi kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kejadian – kejadian tersebut merupakan potensi konflik yang harus diantisipasi agar tidak menjadi konflik sosial, yang akan mengganggu stabilitas, keamanan, dan menghambat pembangunan. Persentase kejadian terkait Poleksosbud di Jawa Timur adalah penyempurnaan dari indikator sebelumnya yaitu jumlah kejadian terkait poleksosbud. Hal ini ditujukan agar lebih mengetahui perkembangan kejadian-kejadian yang terjadi di Jawa Timur yang dilatarbelakangi kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya, sehingga pemerintah dapat melakukan antisipasi lebih cepat.

**Tabel 2.92 Persentase Kejadian terkait Poleksosbud**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Kejadian terkait Poleksosbud	115,76	78,82	95,95	23,56	312,26

*Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur*

Persentase kejadian Poleksosbud di Jawa Timur tahun 2011 – 2015 sangat fluktuatif. Pada tahun 2011 dan 2015 mengalami peningkatan kejadian, dimana ditandai dengan capaian yang berada diatas 100%. Namun pada 2012, 2013 dan 2014 mengalami penurunan, dimana capaian di tahun tersebut berada dibawah 100%. Dari capaian tersebut dapat disimpulkan dinamika masyarakat di Jawa Timur sangatlah tinggi, untuk itulah diperlukan peran aktif pemerintah dalam melakukan pemantauan kejadian dan antisipasi dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Sedangkan di tahun 2015, capaiannya diatas 100 % hal ini dikarenakan pemantauan

dan kerja sama yang baik antara komunitas intelejen daerah (pemda, aparat hukum, kehati) sehingga menemukan kejadian yang lebih banyak dari pada tahun 2014.

Selain berdasarkan gambaran data di atas terdapat permasalahan lain yang perlu mendapatkan perhatian, yakni:

1. Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik;
3. Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
4. Masih rendahnya tingkat koordinasi dan konsultasi antar pihak terkait dalam penanganan keamanan dan ketertiban;
5. Aktivitas Ormas/LSM belum semua melaporkan;
6. Kurang berdayanya institusi-institusi demokrasi, peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM;
7. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM;

## **2.2.5.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

### **2.2.5.7.1. Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi**

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) adalah serangkaian sistem yang berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya kejadian alam, Sistem peringatan dini ini akan memberitahukan terkait bencana yang akan terjadi atau kejadian alam lainnya. Peringatan dini pada masyarakat atas bencana merupakan tindakan memberikan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Dalam keadaan kritis, secara umum peringatan dini yang merupakan penyampaian informasi tersebut diwujudkan dalam bentuk sirine, kentongan dan lain sebagainya.

Membunyikan sirine saat akan terjadi sesuatu merupakan langkah untuk mengantarkan informasi kepada masyarakat, harapannya adalah agar masyarakat dapat merespon informasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kesigapan dan kecepatan reaksi masyarakat diperlukan karena waktu yang sempit dari saat dikeluarkannya informasi dengan

saat (dugaan) datangnya bencana. Kondisi kritis, waktu sempit, bencana besar dan penyelamatan penduduk merupakan faktor-faktor yang membutuhkan peringatan dini.

**Tabel 2.93 Persentase Sistem Peringatan Dini / Ews Yang Berfungsi**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi	-	-	-	-	100

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur*

Pada tahun 2015, persentase Sistem Peringatan Dini / EWS Yang Berfungsi sebesar 100 persen, kondisi ini memberikan rasa aman pada masyarakat yang tinggal di kawasan bencana dalam beraktifitas sebab peringatan dini akan terjadinya bencana sudah bisa di ketahui, sehingga masyarakat juga bisa melakukan pencegahan untuk menyelamatkan diri saat terjadinya bencana alam.

#### 2.2.5.7.2. Korban Terdampak Bencana yang Ditangani

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Korban bencana adalah orang/sekelompok orang yang mengalami dampak buruk akibat bencana, seperti kerusakan dan atau kerugian harta benda, penderitaan dan atau kehilangan jiwa. Korban meliputi korban meninggal, hilang, luka/sakit, menderita, dan mengungsi. Pada tahun 2015 persentase korban terdampak bencana yang tertangani mencapai 100 persen. Hal ini perlu dipertahankan karena dengan tertanganinya korban terdampak maka akan meminimalkan kondisi terburuk setelah terjadinya bencana.

**Tabel 2.94 Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani	-	-	-	-	100

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur*

### 2.2.5.8 Badan Penghubung

#### 2.2.5.8.1. Persentase Pelayanan Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan di dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sebagai bentuk kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan / atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.

**Tabel 2.95 Persentase Pelayanan Keprotokolan**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Pelayanan Keprotokolan	89	91	91	91	92

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun terakhir persentase pelayanan keprotokolan menunjukkan peningkatan, yaitu dari 91 persen pada tahun 2013 menjadi 92 persen pada tahun 2015. Kondisi ini memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional

#### 2.2.5.8.2. Persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek

Potensi daerah adalah segala kemampuan yang ada pada suatu daerah yang dapat dikembangkan. Agar potensi daerah dapat bermanfaat, maka masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Promosi potensi daerah sangat diperlukan dan diharapkan terus meningkat tiap tahunnya karena untuk menarik wisatawan dan investor. Pada tahun 2015 persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek mencapai 100, sedangkan tahun 2011-2014 indikatornya bukan persentase melainkan Jumlah kegiatan Promosi Potensi Daerah yaitu pada tahun 2011 terselenggara 96 kali kegiatan Promosi Potensi Daerah, tahun 2012 ada 90 kali kegiatan, tahun 2013 ada 123 kali kegiatan, tahun 2014 ada 80 kali kegiatan.

**Tabel 2.96 Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek	-	-	123	80	76-100

Sumber : Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur

### 2.2.5.9 Inspektorat

Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, sebenarnya pada titik akhirnya adalah kepentingan masyarakat. Untuk itu, aspirasi dan kepentingan masyarakat harus diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang-undangan. Persentase Ketaatan terhadap perundang-undangan daerah oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota di Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 70 persen. Kondisi ini perlu ditingkatkan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

**Tabel 2.97 Persentase Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Daerah Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Kab/Kota Di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Daerah Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Kab/Kota Di Jawa Timur	-	-	-	-	70

Sumber : Inspektorat Provinsi Jawa Timur

### 2.2.5.10 Sekretariat Daerah

#### 2.2.5.10.1. Nilai LAKIP

LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran. Pada tahun 2013 nilai LAKIP Provinsi Jawa Timur adalah B, kemudian pada tahun 2015 nilainya meningkat menjadi A. Hal ini menandakan akuntabilitas kinerja di Provinsi Jawa Timur sudah semakin baik.

**Tabel 2.98 Nilai LAKIP**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai LAKIP	-	-	B	B+	A

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

#### 2.2.5.10.2. Peringkat LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik diantara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing. Selama tiga tahun terakhir (2013-2015), nilai LPPD Provinsi Jawa Timur adalah sangat tinggi artinya pembangunan di Jawa Timur benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

**Tabel 2.99 Peringkat LPPD**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Peringkat LPPD	-	-	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

*Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur*

#### 2.2.5.10.3. Produk Hukum yang Tidak Bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang yang Lebih Tinggi, Kesusilaan dan Kepentingan Umum

Dalam penyusunan suatu peraturan produk hukum maka sangatlah penting agar dalam penyusunan suatu produk hukum tidaklah bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum. Indikator Persentase Produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi, kesusilaan dan kepentingan umum baru dihitung pada tahun 2017

#### 2.2.5.10.4. Penegakan Supremasi Hukum dan HAM di Jawa Timur

Tidak saja hanya terkait penyusun produk hukum saja yang diperhatikan tetapi bagaimana penegakan supremasi hukum dan HAM juga perlu diperhatikan



agar produk hukum yang telah disusun benar-benar telah dijalankan sesuai aturan dan tidak melanggar HAM. Indikator Persentase penegakan supremasi hukum dan HAM di Jawa Timur baru merupakan indikator yang baru dihitung tahun 2017

#### 2.2.5.11 Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan dan Pemerintahan

**Tabel 2.100 Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	60

Sumber : Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan

#### 2.2.5.12 Sekretariat DPRD

Salah satu fungsi dari Sekretariat DPRD adalah memfasilitasi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Pada tahun 2014, indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD mencapai 70,00, mengalami peningkatan di tahun 2015 sebesar 71,23. Hal ini menandakan bahwa kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD mengalami peningkatan.

**Tabel 2.101 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Indeks kepuasan masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-		70,00	71,23

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur

### 2.2.6 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.2.6.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

##### 2.2.6.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat

diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula.

**Tabel 2.102 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
PengeluaranKonsumsiRumahTanggaPerKapita	479.490	524.225	586.407	674.580	830.472

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), rata rata pengeluaran perkapita penduduk Jawa Timur tahun 2011- 2015 terus mengalami peningkatan. Rp. 479.490 per kapita sebulan di tahun 2011 menjadi Rp 830.472 per kapita sebulan di tahun 2015. Pada tahun 2015 pengeluaran perkapita penduduk Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 23.11 persen dan ini merupakan pertumbuhan tertinggi selama kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adalah adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, yang pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### **2.2.6.1.2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita**

Secara umum manusia selalu akan memenuhi kebutuhan hidupnya akan barang dan jasa. Kebutuhan untuk kelangsungan hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu, kelompok makanan dan non makanan. Dalam memenuhi kebutuhan makan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang non makanan tidak ada batasnya. Semakin tinggi tingkat pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk kebutuhan makanan akan menurun, sebaliknya proporsi untuk non makanan semakin meningkat.

**Tabel 2.103 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita	49,36	50,52	49,46	50,50	54,12

*Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur*

Kalau kita perhatikan komposisi persentase antara makanan dan non makanan penduduk Jawa Timur dalam dua tahun terakhir ini (2014-2015) sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan. Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena dengan semakin meningkatnya perbaikan ekonomi, maka pengeluaran untuk bukan makanan akan semakin tinggi dibanding pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2015 proporsi pengeluaran penduduk Jawa Timur untuk non makanan sebesar 54,12 persen, relatif lebih besar sekitar 10 persen dibanding untuk kebutuhan makanan, begitu juga jika dibanding dengan tahun 2014, kebutuhan penduduk akan barang non makanan juga mengalami peningkatan sekitar 4 persen. Namun demikian jika kita perhatikan menurut wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa untuk daerah perdesaan pengeluaran penduduknya masih banyak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Fakta ini sedikit banyak menjelaskan kalau kesejahteraan penduduk daerah perdesaan masih dibawah penduduk daerah perkotaan.

#### **2.2.6.1.3. Nilai Tukar Petani (NTP)**

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding dengan barang/jasa yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

**Tabel 2.104 Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	103,83	104,59	104,75	104,83

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

NTP Jawa Timur tahun 2015 naik sebesar 0,08 persen dibanding 2014 yaitu dari 104,75 menjadi 104,83. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih besar dibanding laju indeks harga yang dibayar petani. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2015 secara umum masih lebih baik dibanding kondisi tahun 2014. Jika dilihat NTP masing-masing sub sektor pada tahun 2015, NTP tertinggi terjadi pada sub sektor peternakan sebesar 111,35 sedangkan NTP terendah terjadi pada sub sektor tanaman pangan sebesar 100,34. Kenaikan NTP terjadi pada sub sektor tanaman pangan yaitu sebesar 0,77 persen dan sub sektor peternakan naik 0,16 persen. Sedangkan pada sub sektor tanaman hortikultura dan sub sektor perkebunan rakyat mengalami penurunan NTP. Meskipun demikian NTP pada kedua sub sektor tersebut masih terjaga di atas 100.

#### 2.2.6.1.4. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN pada periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar dan sebaliknya jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan.

**Tabel 2.105 Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	148,46	99,79	103,16	106,54	106,69

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Rata-rata NTN Jawa Timur tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen dibanding tahun 2014 yaitu dari 106,51 menjadi 106,69. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan rata-rata indeks harga yang diterima nelayan (8,98 persen) lebih besar dari kenaikan rata-rata indeks harga yang dibayar nelayan (8,80 persen). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2015 secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2014.

Pada tahun 2015 NTN Jawa Timur pada bulan tertentu lebih tinggi dibanding kondisi bulan yang sama pada tahun 2014 dan pada bulan tertentu lebih rendah dibanding kondisi bulan yang sama pada tahun 2014. Jika dilihat besarnya perubahan di tahun 2015, kenaikan NTN terbesar terjadi pada Bulan Januari sebesar 3,31 persen karena indeks harga yang diterima nelayan pada bulan yang sama mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan sebesar 1,74 persen. Penurunan NTN terbesar terjadi pada bulan Desember sebesar 1,97 persen karena indeks harga yang diterima nelayan mengalami penurunan sebesar 0,89 persen sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami peningkatan sebesar 1,10 persen.

## **2.2.6.2 Fokus Iklim Berinvestasi**

### **2.2.6.2.1. Angka Kriminalitas**

Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminalitas yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

**Tabel 2.106 Angka Kriminalitas di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Angka Kriminalitas	3,98	4,01	3,80	3,57	2,67

Sumber : Polda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data Polda Jawa Timur, angka kriminalitas ditunjukkan melalui jumlah tindak kriminal yang terjadi selama satu tahun per 10.000 penduduk. Dalam rentang tahun 2013-2015 angka kriminalitas cenderung mengalami penurunan yaitu dari 3,80 tahun 2013 menjadi 3,57 tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 angka kriminalitas menurun hingga 2,67, ini berarti selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kriminalitas. Angka kriminalitas sebesar 2,67 menunjukkan bahwa terjadi hampir 3 tindak kriminal di antara 10.000 penduduk per tahunnya.

#### 2.2.6.2.2. Lama Proses Perizinan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas aparatur pemerintah di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan.

**Tabel 2.107 Lama Proses Perizinan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Lama Perizinan	1-17	1-17	1-17	1-17	1-17

Sumber : BPM Provinsi Jawa Timur

Penyelenggaraan pemerintah daerah saat ini bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh aktor dalam sebuah wilayah atau daerah. Meski demikian, peran pemerintah daerah masih dominan terkait dengan penyediaan pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa dan administratif. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), berupaya meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan di semua sektor pelayanan publik, terutama dalam kegiatan pelayanan perizinan. Upaya untuk meminimalisir permasalahan perizinan yang berdampak buruk terhadap kurang optimalnya investasi di Jawa Timur adalah dengan membentuk model Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Secara umum penyelesaian proses perizinan di Unit P2T Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu 1 (satu) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian maksimal dalam 17 hari.

### 2.2.6.3 Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.2.6.3.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Tahun 2015 merupakan awal diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. Dalam menghadapi tantangan ini tentunya Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan supaya tidak kalah dengan SDM dari negara Asean lainnya. Begitu juga Provinsi Jawa Timur tentunya juga tidak mau kalah dalam menyiapkan SDM yang ada. Salah satu mengukur potensi SDM di suatu wilayah adalah melihat dengan tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas SDM yang ada. Tingkat pendidikan penduduk yang digunakan sebagai ukuran adalah Sarjana (D4/S1 keatas), hal ini dikarenakan tingkat pendidikan D4/S1 keatas merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang pendidikan.

**Tabel 2.108 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Lulusan S1/S2/S3	315	341	323	356	386

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam lima tahun terakhir (2011-2015) proporsi penduduk di Jawa Timur yang berpendidikan D4/S1 keatas semakin meningkat dari 315 per sepuluh ribu



penduduk pada tahun 2011 menjadi 386 per sepuluh ribu penduduk di tahun 2015. Bila dilihat sex rasionya maka penduduk laki-laki yang berpendidikan tinggi proporsinya lebih banyak dibanding perempuan.

#### 2.2.6.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun karena umumnya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan perbandingan jumlah penduduk usia < 15 tahun dan > 64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

**Tabel 2.109 Rasio Ketergantungan di Jawa Timur**

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Ketergantungan	45,69	45,26	44,85	44,50	44,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Pada tahun 2015, angka *dependency ratio* untuk Jawa Timur sebesar 44,22 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 44-45 orang penduduk usia non produktif. Dari tahun ke tahun, angka *dependency ratio* menunjukkan penurunan, yang berarti bahwa semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 2.110 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
<b>1.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>							
<b>1.1</b>	Pertumbuhan PDRB/LPE (%)		6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	6,88 - 7,19
<b>1.2</b>	Laju Inflasi (%)		4,09	4,5	7,59	7,77	3,08	-
<b>1.3</b>	PDRB per kapita (Ribu Rp.)		29.613,05	32.770,38	36.037,18	39.880,51	43.500,30	-
<b>1.4</b>	Indeks Gini		0,37	0,36	0,36	0,37	0,42	0,359 - 0,356
<b>1.5</b>	Indeks Pemerataan Pendapatan versi Bank Dunia							
	a. 40 % bawah		21,09	20,15	19,82	18,63	18,77	20,76 - 20,89
	b. 40 % menengah		38,57	34,38	34,55	35,22	36,05	-
	c. 20 % atas		40,34	45,47	45,63	46,15	45,18	-
<b>1.6</b>	Prosentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan		86,15	86,92	87,27	87,72	87,72	87,65 - 88,03
<b>1.7</b>	Persentase Penduduk Miskin		13,85	13,08	12,73	12,28	12,28	12,21 - 11,73
<b>1.8</b>	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		66,06	66,74	67,55	68,14	68,95	73,26 - 73,76
<b>1.9</b>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		89,28	89,36	90,22	90,83	91,07	67,79 - 68,39
<b>2.</b>	<b>Fokus Kesejahteraan Sosial</b>							
<b>2.1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
<b>2.1.1</b>	Rata-rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun Ke Atas		6,79	6,85	6,9	7,05	7,14	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	2.1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	2.1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) - SMA/MA/SMK	73,78	74,21	78,21	78,23	79,14	
	2.1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) - SMA/MA/SMK	54,97	55,94	59,78	65,78	65,83	61,3
	2.1.5	Indeks Pendidikan	0,55	0,55	0,57	0,58	0,59	
	<b>2.2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
	2.2.1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	970,76	974,50	975,00	975,50	976,40	
	2.2.2	Angka Kematian Bayi (AKB)	29,24	25,50	25,00	24,50	24,00	25,61
	2.2.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	104,3	97,43	97,39	93,52	89,6	97,3
	2.2.4	Angka Usia Harapan Hidup	69,81	70,14	70,34	70,45	70,68	70,7
	2.2.5	Persentase Balita Gizi Buruk	3,88	3,56	2,30	2,00	1,80	2,93
	2.2.6	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100
	<b>2.3.</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>						
	2.3.1	Rasio Penduduk yang bekerja	95,84	95,91	95,7	95,81	95,53	95,78 - 95,87
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
	<b>1.</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar</b>						
	<b>1.1.</b>	<b>Pendidikan</b>						
	1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun	59,65	62,51	65,95	71,23	72,14	
	1.1.2	Angka Kelulusan Sekolah - SMA/MA/SMK	97,73	98,14	98,27	98,52	98,57	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	1.1.3	Persentase guru jenjang SMA, SMK, dan PKLK berkualifikasi minimal S1/D4	87,46	91,93	92,36	94,84	96,55	
	<b>1.2.</b>	<b>Kesehatan</b>						
	1.2.1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	15,47	15,44	15,47	15,43	15,36	
	1.2.2	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,11	0,11	0,11	0,111	0,113	
	1.2.3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,087	0,0903	0,0925	0,0961	0,0955	
	1.2.4	Cakupan Puskesmas	144,41	145,02	144,58	144,43	144,58	
	1.2.5	Cakupan Puskesmas Pembantu	26,81	26,74	26,7	26,75	26,8	
	<b>1.3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>						
	1,3,1	Jalan dan Jembatan						
	1,3,1,1	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik/mantap (Km)	1376,28	1509,64	1556,62	1543,93	1574,82	842
	1,3,1,2	Panjang jembatan provinsi dalam kondisi baik (m)	19.726,31	14.305,57	13.965,98	13.747,08	13.708,28	19.843
	1,3,1,3	Panjang jalan yang terbangun (Km)	0	0	0	0	0	0,5
	1,3,1,4	Panjang jembatan yang terbangun (M)	0	0	0	0	0	5
	1,3,1,5	Panjang jalan JLS yang terbangun (Km)	330,995	330,995	330,995	322.420	368.481	135
	1,3,1,6	Panjang jembatan JLS yang terbangun (M)	2.378	2.378	2.378	3.330	3.842	3.857
	1,3,2	Penyediaan Air Baku Untuk Irigrasi (%)	-	-	68	69	70	
	1,3,3	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	5,36	5,34	4,19	4,15	4,15	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	1,3,4	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk	7,79	8,07	13,03	12,13	12,08	
	1,3,5	Penataan Ruang						
	1,3,5,1	Rasio Jumlah RTR Kawasan Strategis Provinsi	-	-	30,77	43,58	53,85	58,97
	1,3,5,2	Jumlah Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota	-	-	2	6	16	7
	1,3,5,3	Presentase Ketersediaan Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Tata Ruang	-	-	5	10	10	10
	1,3,5,4	Presentase Kasus Mediasi Pemanfaatan Ruang Yang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	-	75	100	100	75
	<b>1.4.</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>						
	1,4,1	Persentase Rusun Terbangun	-	-	16,06	23,78	26,33	44,27
	1,4,2	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	93,42	94,53	95,01	95,52	95,21	95,76
	1,4,3	Rumah Tangga Pengguna Listrik	99,3	99,57	99,7	99,7	99,87	99,6
	1,4,4	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih						
		a. Perkotaan	61,81	62,51	61,89	66,76	73,03	62,96
		b. Pedesaan	55,43	56,88	56,98	57,97	69,45	
	1,4,5	Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah						
		a. Perkotaan	76,54	77,19	74,66	78,09	78,1	64,97
		b. Pedesaan	46,38	46,49	44,22	46,59	48,66	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	1,4,6	Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	78,05	79,76	79,87	79,96	80,07	81,97
	1,4,7	Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	80,3	82,76	82,78	82,96	84,14	84,58
	<b>1.5.</b>	<b>Permukiman Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</b>						
	1,5,1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	1,24	1,31	1,47	1,49	1,54	
	1,5,2	Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk	78,17	73,59	73,55	70,32	69,71	
	1,5,3	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan	7,14	7,22	8,38	8,28	8,41	
	<b>1.6.</b>	<b>Sosial</b>						
	1,6,1	Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi	1.746	1.845	1.704	1.925	1.966	
	1,6,2	PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	278.327	258.328	325.504	811.796	755.079	
	1,6,3	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	11,08	11,91	15,2	28,27	23,46	
		Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Aktif Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	13,05	
		Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
2.	<b>Fokus Layanan Urusan Non Wajib Dasar</b>							
2.1.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
2,1,1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		69,49	69,62	69,78	68,12	67,84	70
2,1,2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		327.489	474.989	443.415	389.120	395.654	
2,1,3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		4,16	4,12	4,33	4,19	4,47	4,22 - 4,13
2.2.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
2,2,1	Indeks Pemberdayaan Gender		68,62	69,29	70,77	68,17	69,17	70,42
2,2,2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur		1,8	3,15	6,75	3,28	2,56	
2,2,3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		55,01	55,2	55,56	53,17	52,43	
2.3.	<b>Ketahanan Pangan</b>							
2,3,1	Ketersediaan Pangan							
	a. Beras		6.315.925	7.291.033	7.199.536	7.407.895	7.497.433	
	b. Jagung		4.811.184	5.568.307	5.096.065	5.075.010	5.425.136	
	c. Kedelai		296.291	296.163	301.558	325.964	316.258	
	d. Kacang Tanah		194.164	196.514	191.495	173.399	176.307	
	e. Kacang Hijau		72.990	60.701	52.427	54.832	61.698	
	f. Ubi Kayu		3.865.556	4.070.625	3.452.350	3.486.310	3.031.000	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
		g. Ubi Jalar	191.440	362.367	346.015	274.930	308.454	
		h. Daging	210.771	351.433	333.082	371.848	377.500	
		i. Telur	269.969	301.785	323.221	330.994	369.974	
		j. Susu	477.190	479.224	396.995	406.657	450.011	
		k. Ikan	1.190.742	1.257.824	1.321.928	1.036.558	1.454.011	
		l. Gula	1.047.776	1.252.788	1.232.090	1.248.278	1.195.501	
	<b>2.4.</b>	<b>Pertanahan</b>	<b>Belum ada Indikator</b>					
	<b>2.5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>						
	2,5,1	Kualitas Air Sungai (BOD dan COD)						
		a. BOD	4,41	4,33	3,6	4,27	4,14	3,58 - 3,56
		b. COD	15,45	13,64	10,92	12,45	11,88	10,84 - 10,83
	2,5,2	Cakupan Penghijauan (Konservasi) Sumber Mata Air (Titik)	-	-	4	4	5	15
	2,5,3	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal (Kew. Prov Saja). (%)	-	-	80	73	69,56	82
	2,5,4	Persentase Penyelesaian Kasus LH Dg Sanksi Administrasi (%)	-	-	66,67	100	100	60
	<b>2.6.</b>	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>						
	2,6,1	Persentase Penduduk Ber KTP	76,87	76,86	84,27	89,62	92,09	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	2,6,2	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	<b>2.7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>						
	2,7,1	Jumlah LSM	-	514	873	883	-	
	<b>2.8.</b>	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>						
	2,8,1	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2,39	1,27	1,29	1,27	1,28	
	2,8,2	Rasio Akseptor KB (%)	82,74	83,35	84,1	83,65	75,44	
	<b>2.9.</b>	<b>Perhubungan</b>						
	2,9,1	Rasio Ijin Trayek	0,014	0,013	0,013	0,013	0,015	
	2,9,2	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis						
		a. Jumlah Pelabuhan Laut	22	22	22	22	22	
		b. Jumlah Pelabuhan Udara	2	3	3	3	6	
		c. Jumlah terminal Bus	60	60	59	59	59	
	2,9,3	Angkutan Darat (Penumpang)	10.399	6.516	6.517	6.044	6.045	
	2,9,4	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim	-	-	82,06	85,88	74,41	81
	2,9,5	Prosentase Jumlah Kab/Kota Yang Memperoleh Predikat Wahana Tata Nugraha Dibandingkan Jumlah Peserta Dari Kab/Kota	39	47	55	71	73	55
	2,9,6	Jumlah Alarm Early Warning System Terpasang	104	120	145	188	236	185



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	<b>2.10.</b>	<b>Komunikasi dan Informasi</b>						
	2,10,1	Penyiaran Televisi dan Radio Lokal						
		a. Televisi	102	102	116	-	-	
		b. Radio	404	543	589	-	-	
	2,10,2	Website Milik Pemerintah Daerah						
		a. Website	45	56	59	-	-	
		b. Domain	36	42	48	-	-	
	2,10,3	Pameran/Expo Komunikasi dan Informasi	10	10	10	-	-	
	<b>2.11.</b>	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>						
	2,11,1	Persentase Koperasi Aktif	86,29	87,28	87,93	87,98	88,1	79,83
	2,11,2	Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	4	4	4	4	10	9
	2,11,3	Rasio Perputaran Modal Kopwan	-	-	1,36	1,39	2,1	2,1
	<b>2.12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>						
	2,12,1	Izin Prinsip Investasi	70,91	76,71	113,64	110,63	172,57	
	2,12,2	Realisasi Investasi	110,47	133,43	145,06	145,03	163,68	
	<b>2.13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>						
		Persentase Pemuda yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan						
		Persentase pembibitan olahragawan berbakat						
	<b>2.14.</b>	<b>Statistik</b>						
	2,14,1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	2,14,2	Buku PDRB Kabupaten	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	<b>2.15.</b>	<b>Persandian</b>	<b>Belum ada Indikator</b>					
	<b>2.16.</b>	<b>Kebudayaan</b>						
		Persentase Cagar Budaya (benda, Struktur, Situs, Kawasan) yang dipelihara/dilestarikan						
		Jumlah Karya Seni Budaya yang mendapat penghargaan nasional						
	<b>2.17.</b>	<b>Perpustakaan</b>						
		Indeks Minat Baca						
		Persentase Penerbit dan Perusahaan Rekaman yang menyerahkan Karya Cetak dan karya Rekam						
	<b>2.18.</b>	<b>Kearsipan</b>						
		Persentase arsip yang terselamatkan						
		Persentase organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tertib arsip						
	<b>3</b>	<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>						
	<b>3.1.</b>	<b>Pertanian</b>						
	3,1,1	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	54,89	61,74	59,15	59,81	61,13	
	3,1,2	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Total PDRB	13,28	13,47	13,46	13,61	13,75	
	3,1,3	Kontribusi Sub Kategori Tanaman Pangan Terhadap PDRB Kategori Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan	33,86	33,58	33,34	32,37	32,53	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	3,1,4	Kontribusi Sub Kategori Perkebunan Terhadap PDRB Kategori Pertanian , Kehutanan, dan Perikanan	15,9	15,95	15,47	15,73	15,54	
	<b>3.2.</b>	<b>Kehutanan</b>						
	3,2,1	Kontribusi Subsektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB	0,44	0,52	0,53	0,54	0,55	
	3,2,3	Rehabilitasi Kawasan Hutan (Ha)	-	-	14.637	24.675,50	24.660,40	10.000
	3,2,4	Reboisasi Kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	-	-	350	315	650	300
	3,2,5	Penurunan Luas Kebakaran Hutan (Ha)	-	-	1.353,97	10.876,70	1.950	3.376
	<b>3.3.</b>	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
	3,3,1	Kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian Terhadap Total PDRB	5,86	5,3	5,34	5,17	3,79	
	3,3,2	Pertambangan Tanpa Ijin/ PETI (Ha)	-	-	1164,48	985,65	974,15	200
	3,3,3	Berkurangnya Pertambangan Tanpa Ijin/PETI (Kab/Kota)	-	-	237,83	245,28	474,97	3
	<b>3.4.</b>	<b>Pariwisata</b>						
	3,4,1	Kunjungan Wisata	185.815	197.776	225.041	217.193	129.574	
	<b>3.5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>						
	3,5,1	Produksi Perikanan	1.218.897,80	1.310.976,60	1.391.009,50	1.443.257,80	1.498.987,70	
	3,5,2	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	362.621,60	367.921,10	381.573,90	385.878,40	395.930	
	3,5,3	Konsumsi Ikan	20,2	23,1	24,3	27,7	30,2	
	<b>3.6.</b>	<b>Perdagangan</b>						



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	3,6,1	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Terhadap Total PDRB	17,97	17,67	17,7	17,29	17,64	
	3,6,2	Ekspor Bersih Perdagangan	19,06	16,25	15,51	18,77	17,12	
	<b>3.7.</b>	<b>Perindustrian</b>						
	3,7,1	Kontribusi Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB	29,15	29,28	28,79	28,95	29,27	
	3,7,2	Pertumbuhan Industri	5,56	1,6	0,87	0,5	0,47	
	<b>3.8.</b>	<b>Ketransmigrasian</b>						
	3,8,1	Transmigrasi Swakarsa	549	860	304	44	0	
<b>D</b>	<b>4.</b>	<b>Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						
	<b>4.1.</b>	<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>						
	4,1,1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	4,1,2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	4,1,3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	<b>4.2.</b>	<b>Badan Pendapatan Daerah</b>						
	4,2,1	Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah						



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
		Total Pajak Daerah	7.298.242.129. 261	7.816.590.831. 387	9.404.933.62 2.357	11.517.684.92 6.169	12.497.148.70 4.551	
		a. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	2.692.582.635. 332	3.287.113.502. 460	3.896.189.87 1.560	4.309.073.589. 585	4.911.609.520. 175	
		b. BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)	3.366.060.701. 100	3.138.044.541. 300	3.836.938.43 5.381	4.064.715.327. 300	3.534.061.188. 065	
		c. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)	1.217.228.864. 295	1.365.520.465. 879	1.640.013.82 8.698	1.985.179.965. 577	2.201.522.361. 438	
		d. PAP (Pajak Air Permukaan)	22.369.928.53 4	25.912.321.74 8	31.791.486.7 17	31.770.800.08 6	30.116.623.82 4	
		Total Retribusi Daerah	2.812.741.144	2.785.962.590	2.361.996.96 5	2.236.751.905	2.849.623.430	
		a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.812.741.144	1.264.666.540	764.814.000	1.440.034.620	2.208.044.800	
		b. Retribusi Tempat Pelelangan	-	1.521.296.050	1.597.182.96 5	796.717.285	641.578.630	
<b>4.3.</b>	<b>Badan Pengelola Keuangan Daerah</b>							
4,3,1	Realisasi Pendapatan Daerah		11.493.375.58 3.401	15.401.493.95 1.238	17.390.109.4 58.210	20.772.483.89 2.731	22.218.448.26 8.374	
	Pendapatan Asli Daerah		8.898.616.683. 297	9.584.081.971. 227	11.596.681.6 33.381	14.442.216.53 4.959	15.392.645.71 4.903	
	a. Pajak Daerah		7.298.242.129. 261	7.816.590.831. 387	9.404.933.62 2.357	11.517.684.92 6.169	12.497.148.70 4.551	
	b. Retribusi Daerah		66.359.751.55 3	118.823.637.5 91	106.213.770. 752	148.638.035.6 45	176.560.147.6 95	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		365.149.164.6 87	352.899.911.8 54	332.020.394. 956	342.920.271.0 75	352.223.333.4 71	





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.168.865.637. 797	1.295.767.590. 396	1.753.513.84 5.317	2.432.973.302. 070	2.366.713.529. 185		
	Dana Perimbangan	2.528.086.449. 989	3.069.016.101. 831	3.092.884.29 9.095	3.485.336.767. 166	3.115.619.118. 152		
	a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/Cukai	1.125.553.550. 989	1.523.964.905. 831	1.374.591.58 2.095	1.516.912.612. 166	1.462.318.221. 152		
	b. Dana Alokasi Umum	1.347.501.699. 000	1.491.561.136. 000	1.632.648.28 7.000	1.866.548.185. 000	1.587.261.707. 000		
	c. Dana Alokasi Khusus	55.031.200.00 0	53.490.060.00 0	85.644.430.0 00	101.875.970.0 00	66.039.190.00 0		
	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	66.672.450.11 6	2.748.395.878. 180	2.700.543.52 5.734	2.844.930.590. 606	3.710.183.435. 320		
	a. Pendapatan Hibah	29.197.348.11 6	34.240.520.68 0	39.728.179.9 34	45.478.647.46 0	40.499.137.95 9		
	b. Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	37.475.102.00 0	2.714.155.357. 500	2.660.815.34 5.800	2.799.451.943. 146	3.669.684.297. 361		
<b>4.4.</b>	<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>							
	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)			73	73,5	75		
	Persentase penataan pegawai ASN sesuai formasi kebutuhan dan kompetensi			75,3	87,7	96,2		
<b>4.5.</b>	<b>Badan Pendidikan dan Pelatihan</b>							
	Persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat kompetensi (certificate of competence) dengan kualifikasi kelulusan minimal memuaskan (skor 80,1-90)			86,14	90,70	91		



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	4.6.	Badan Penelitian dan Pengembangan						
	4,6,1	Perkembangan Hasil Penelitian						
		a. Bidang Pemerintahan	12	15	16	-	-	
		b. Bidang Ekonomi & Keuangan	9	14	14	-	-	
		c. SDA dan Teknologi	13	17	17	-	-	
		d. Kemasyarakatan	10	14	17	-	-	
	4.7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		Persentase kejadian terkait poleksosbud di Jawa Timur						
		Indeks Demokrasi Indonesia	55,98	54,99	59,32	70,36	76,90	
	4.8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	4,8,1	Penanganan Korban Bencana (Pra,Tanggap,Transisi)						
		a. Jumlah relawan terlatih di daerah rawan bencana	91	148	194	228	288	
		b. Jumlah Aparatur yang terlatih dalam tanggap darurat bencana	51	83	109	128	188	
		c. Jumlah peralatan tanggap darurat bencana yang siap digunakan	14	23	30	31	31	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
		d. Jumlah kebutuhan bahan pokok bagi korban bencana pada saat tanggap darurat bencana	4.480	7.280	9.520	11.200	13.700	
		e. Jumlah stok makanan siap saji di gudang	7.200	8.400	9.600	10.800	13.300	
		f. Jumlah dokumen SOP Kedaruratan	-	-	2	2	2	
	<b>4.9.</b>	<b>Badan Penguhung</b>						
		Persentase Pelayanan Keprotokolan						
		Persentase promosi potensi daerah di Jabodetabek						
	<b>4.10.</b>	<b>Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan</b>	Belum ada Indikator					
<b>C</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
	<b>1</b>	<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>						
	<b>1.1.</b>	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>						
	1,1,1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	479.490	524.225	586.407	674.580	830.472	
	1,1,2	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	49,36	50,52	49,46	50,5	54,12	
	<b>1.2.</b>	<b>Pertanian</b>						
	1,2,1	Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65	103,83	104,59	104,75	104,83	
	1,2,2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	148,46	99,79	103,16	106,54	106,69	103,53



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
2	<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>							
2.1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
2,1,1	Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang		3.290	4.015	3.913	4.067	5.139	
2,1,2	Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel		1.833	1.923	1.890	1.993	2.234	
2.2.	<b>Komunikasi dan Informasi</b>							
2,2,1	Rasio Ketersediaan Daya Listrik		71,7	70,53	80,51	83,6	86,68	
2,2,2	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon							
	a. Telephon		7,49	5,4	5,58	4,92	3,7	
	b. HP		75,69	80,11	84,24	85,52	85,94	
3	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
3.1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
3,1,1	Angka Kriminalitas		3,98	4,01	3,8	3,57	2,67	1,57
3,1,2	Lama Proses Perizinan		1-17	1-17	1-17	1-17	1-17	
4	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
4.1.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
4,1,1	Rasio Lulusan S1/S2/S3		315	341	323	356	386	



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah		Capaian					Target Tahun 2015
			Thn. 2011	Thn. 2012	Thn. 2013	Thn. 2014	Thn. 2015	
	4,1,2	Rasio Ketergantungan	45,69	45,26	44,85	44,5	44,22	44,2





## DAFTAR ISI

<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>41</b>
2.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	41
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	41
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	41
2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis .....	43
2.1.1.3 Topografi .....	46
2.1.1.4 Geologi .....	48
2.1.1.5 Hidrologi .....	50
2.1.1.6 Klimatologi .....	52
2.1.1.7 Penggunaan Lahan .....	53
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah .....	55
2.1.2.1 Potensi Pertanian .....	55
2.1.2.2 Potensi Perkebunan .....	57
2.1.2.3 Potensi Kehutanan.....	58
2.1.2.4 Potensi Perikanan.....	59
2.1.2.5 Potensi Pertambangan .....	63
2.1.2.6 Potensi Industri .....	66
2.1.2.7 Potensi Pariwisata .....	68
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana .....	71
2.1.3.1 Kawasan Rawan Bencana Longsor .....	71
2.1.3.2 Kawasan Rawan Gelombang Pasang.....	74
2.1.3.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir .....	74
2.1.3.4 Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Puting Beliung.....	76
2.1.3.5 Kawasan Rawan Letusan Gunung Api .....	76
2.1.3.6 Kawasan Rawan Gempa Bumi .....	77
2.1.3.7 Kawasan Rawan Tsunami.....	79
2.1.3.8 Kawasan Luapan Lumpur .....	80
2.1.3.9 Kawasan Rawan Kekeringan.....	81



2.1.4	Demografi .....	83
2.1.4.1	Jumlah Penduduk .....	83
2.1.4.2	Ketenagakerjaan .....	85
2.1.4.3	Pendidikan .....	86
2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	86
2.2.1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	86
2.2.1.1	Pertumbuhan PDRB .....	86
2.2.1.2	Indeks Gini .....	92
2.2.1.3	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia .....	93
2.2.1.4	Persentase Penduduk Miskin .....	95
2.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	97
2.2.1.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG) .....	98
2.2.1.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	100
2.2.1.8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) ....	102
2.2.1.9	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	103
2.2.1.10	Indeks Reformasi Birokrasi.....	104
2.2.1.11	Indeks Kesalehan Sosial.....	105
2.2.2	Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar .....	105
2.2.2.1	Pendidikan .....	105
2.2.2.2	Kesehatan.....	111
2.2.2.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	120
2.2.2.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	125
2.2.2.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	126
2.2.2.6	Sosial .....	127
2.2.3	Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Non Dasar .....	129
2.2.3.1	Ketenagakerjaan .....	129
2.2.3.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	131

2.2.3.3	Ketahanan Pangan .....	132
2.2.3.4	Lingkungan Hidup .....	134
2.2.3.5	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	135
2.2.3.6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	137
2.2.3.7	Pengendalian Penduduk dan KB .....	138
2.2.3.8	Perhubungan .....	139
2.2.3.9	Komunikasi dan Informasi.....	140
2.2.3.10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	141
2.2.3.11	Penanaman Modal .....	143
2.2.3.12	Kepemudaan dan Olahraga .....	144
2.2.3.13	Kebudayaan .....	146
2.2.3.14	Perpustakaan .....	147
2.2.3.15	Kearsipan.....	148
2.2.4	Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Pilihan.....	149
2.2.4.1	Kelautan dan Perikanan .....	149
2.2.4.2	Pariwisata .....	150
2.2.4.3	Pertanian .....	151
2.2.4.4	Kehutanan .....	153
2.2.4.5	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	154
2.2.4.6	Perdagangan.....	155
2.2.4.7	Perindustrian.....	155
2.2.4.8	Ketransmigrasian.....	156
2.2.5	Aspek Pelayanan Umum Fokus Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan .....	157
2.2.5.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ....	157
2.2.5.2	Badan Pendapatan Daerah.....	158
2.2.5.3	Badan Pengelola Keuangan Daerah .....	158
2.2.5.4	Badan Kepegawaian Daerah.....	159
2.2.5.5	Badan Pendidikan dan Pelatihan.....	160
2.2.5.6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....	161

2.2.5.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	163
2.2.5.8	Badan Penghubung .....	165
2.2.5.9	Inspektorat .....	166
2.2.5.10	Sekretariat Daerah .....	166
2.2.5.11	Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan dan Pemerintahan .....	168
2.2.5.12	Sekretariat DPRD .....	168
2.2.6	Aspek Daya Saing Daerah .....	168
2.2.6.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	168
2.2.6.2	Fokus Iklim Berinvestasi .....	172
2.2.6.3	Fokus Sumber Daya Manusia .....	174
<b>DAFTAR ISI .....</b>		<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>		<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>		<b>xi</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur .....	41
Tabel 2.2	Luas Catchment Area (km <sup>2</sup> ) Pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur .....	51
Tabel 2.3	Keadaan Cuaca Bulanan Tahun 2015 .....	52
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur .....	54
Tabel 2.5	Luasan Lahan Pertanian di Jawa Timur .....	55
Tabel 2.6	Produksi Perikanan (Ton) di Jawa Timur.....	61
Tabel 2.7	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton) di Jawa Timur 62	
Tabel 2.8	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th) di Jawa Timur .....	62
Tabel 2.9	Potensi Panas Bumi di Provinsi Jawa Timur .....	64
Tabel 2.10	Wilayah Potensi Tanah Longsor di Provinsi Jawa Timur .....	72
Tabel 2.11	Potensi Banjir di Provinsi Jawa Timur .....	75
Tabel 2.12	Kawasan Rawan Letusan Gunung Api di Provinsi Jawa Timur 76	
Tabel 2.13	Indikator Kependudukan di Provinsi Jawa Timur .....	84
Tabel 2.14	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	84
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Jawa Timur .....	85
Tabel 2.16	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan Nasional .....	87
Tabel 2.17	Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) ....	89
Tabel 2.18	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) .....	90
Tabel 2.19	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran (Persen).....	91
Tabel 2.20	Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional .....	92
Tabel 2.21	Persentase Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur ..	94
Tabel 2.22	Persentase Penduduk Miskin Jawa Timur dan Nasional.....	95
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur dan Nasional ..	97

Tabel 2.24	Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jawa Timur .....	99
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur .....	101
Tabel 2.26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) .....	103
Tabel 2.27	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	104
Tabel 2.28	Indeks Reformasi Birokrasi .....	104
Tabel 2.29	Indeks Kesalehan Sosial .....	105
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-18 Tahun .....	106
Tabel 2.31	Angka Putus Sekolah di Jawa Timur .....	106
Tabel 2.32	Angka Kelulusan Sekolah di Jawa Timur .....	107
Tabel 2.33	Persentase Guru Jenjang SMA, SMK dan PK-PLK Berkualifikasi Minimal D4/S1 .....	108
Tabel 2.34	Angka Partisipasi Murni (APM) di Jawa Timur .....	109
Tabel 2.35	Indeks Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2015 109	
Tabel 2.36	Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Timur .....	110
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jawa Timur .....	111
Tabel 2.38	Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur .....	111
Tabel 2.39	Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur .....	112
Tabel 2.40	Angka Harapan Hidup (AHH) di Jawa Timur .....	114
Tabel 2.41	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi di Jawa Timur .....	115
Tabel 2.42	Pencapaian Program Pemberantasan Penyakit Kusta Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2016 .....	116
Tabel 2.43	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap .....	120
Tabel 2.44	Persentase Jalan Provinsi yang Memenuhi Persyaratan Teknis Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan Primer .....	121
Tabel 2.45	Persentase Pembangunan Jalan menuju Kawasan Potensial 122	
Tabel 2.46	Persentase Ketersediaan dan Kebutuhan Air Baku .....	123
Tabel 2.47	Persentase Pelayanan Air Untuk Irigasi .....	123
Tabel 2.48	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik .....	124
Tabel 2.49	Persentase Penanganan Luas Daerah Genangan Banjir ....	124

Tabel 2.50	Persentase Luas Kawasan yang Peruntukannya Sesuai Dengan RTRW .....	125
Tabel 2.51	Persentase Capaian Infrastruktur Dasar Perumahan dan Permukiman .....	125
Tabel 2.52	Persentase Penegakkan Pelanggaran Perda .....	126
Tabel 2.53	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial .....	127
Tabel 2.54	Persentase PMKS yang meningkat Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Meningkatkan Kemampuan Fungsi Sosialnya .....	128
Tabel 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Jawa Timur .....	129
Tabel 2.56	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan di Jawa Timur 130	
Tabel 2.57	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Timur .....	131
Tabel 2.58	Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Strategis di Jawa Timur 132	
Tabel 2.59	Nilai PPH di Jawa Timur Tahun 2013 - 2015 .....	133
Tabel 2.60	Indeks Kualitas Air .....	134
Tabel 2.61	Indeks Kualitas Udara .....	134
Tabel 2.62	Indeks Tutupan Lahan .....	135
Tabel 2.63	Persentase Penduduk Ber-KTP di Jawa Timur .....	136
Tabel 2.64	Persentase Tumbuhnya Usaha Ekonomi Masyarakat Desa/Kel 137	
Tabel 2.65	Persentase Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. Yang Aktif (%) .....	138
Tabel 2.66	Rasio Akseptor KB Di Jawa Timur .....	139
Tabel 2.67	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan .....	139
Tabel 2.68	Persentase PD, UPT, Lembaga Non Struktural dan Kab/Kota yang memiliki website sesuai standar muatan TIK .....	141
Tabel 2.69	Persentase Pertumbuhan Omzet Koperasi UKM .....	142

Tabel 2.70	Izin Prinsip Investasi di Jawa Timur Tahun 2011 - 2015 ...	143
Tabel 2.71	Realisasi Investasi di Jawa Timur di Jawa Timur .....	143
Tabel 2.72	Persentase Pemuda yang Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Pembangunan .....	144
Tabel 2.73	Persentase Pembibitan Olahragwan Berbakat .....	145
Tabel 2.74	Jumlah Karya Seni Budaya Yang Mendapatkan Penghargaan Nasional .....	146
Tabel 2.75	Indeks Minat Baca .....	147
Tabel 2.76	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB .....	149
Tabel 2.77	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB ..	151
Tabel 2.78	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB .....	151
Tabel 2.79	Persentase Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB .....	152
Tabel 2.80	Kontribusi dan Pertumbuhan Sub Kategori Peternakan Terhadap PDRB .....	152
Tabel 2.81	Persentase Pertumbuhan Sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu Terhadap PDRB .....	154
Tabel 2.82	Rasio Elektrifikasi di Jawa Timur .....	154
Tabel 2.83	Persentase Share Net Ekspor pada PDRB menurut Penggunaan .....	155
Tabel 2.84	Persentase Pertumbuhan Industri .....	156
Tabel 2.85	Presentase Transmigran yang Berhasil Meningkatkan Taraf Ekonomi dan Sosialnya .....	156
Tabel 2.86	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur .....	158
Tabel 2.87	Nilai Opini BPK .....	158
Tabel 2.88	Persentase Penataan Pegawai ASN sesuai Formasi Kebutuhan dan Kompetensi .....	159
Tabel 2.89	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP) .....	160



Tabel 2.90	Persentase Peserta Diklat Yang memperoleh Sertifikat Kompetensi (Certificate Of Competence) dengan Kualifikasi Kelulusan Minimal memuaskan (skor 80,1-90) .....	160
Tabel 2.91	Indeks Demokrasi Indonesia.....	161
Tabel 2.92	Persentase Kejadian terkait Poleksosbud .....	162
Tabel 2.93	Persentase Sistem Peringatan Dini / Ews Yang Berfungsi .....	164
Tabel 2.94	Persentase Korban Terdampak Bencana yang Ditangani .....	164
Tabel 2.95	Persentase Pelayanan Keprotokolan .....	165
Tabel 2.96	Persentase Promosi Potensi Daerah di Jabodetabek .....	165
Tabel 2.97	Persentase Ketaatan Terhadap Perundang-Undangan Daerah Oleh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Kab/Kota Di Jawa Timur	166
Tabel 2.98	Nilai LAKIP .....	166
Tabel 2.99	Peringkat LPPD.....	167
Tabel 2.100	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang Ditindaklanjuti .....	168
Tabel 2.101	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD .....	168
Tabel 2.102	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita di Jawa Timur	169
Tabel 2.103	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita di Jawa Timur .....	170
Tabel 2.104	Nilai Tukar Petani (NTP) di Jawa Timur .....	171
Tabel 2.105	Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Jawa Timur .....	171
Tabel 2.106	Angka Kriminalitas di Jawa Timur.....	173
Tabel 2.107	Lama Proses Perizinan di Jawa Timur .....	173
Tabel 2.108	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Jawa Timur .....	174
Tabel 2.109	Rasio Ketergantungan di Jawa Timur .....	175
Tabel 2.110	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur .....	176



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Kawasan Tertinggal di Provinsi Jawa Timur.....	44
Gambar 2.2	Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur .....	45
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng .....	47
Gambar 2.4	Peta Ketinggian Lahan .....	48
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Provinsi Jawa Timur .....	49
Gambar 2.6	Peta Formasi Batuan Geologi Provinsi Jawa Timur.....	50
Gambar 2.7	Peta Pembagian Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur....	51
Gambar 2.8	Penggunaan Lahan Eksisting Provinsi Jawa Timur .....	55
Gambar 2.9	Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Provinsi Jawa Timur.....	57
Gambar 2.10	Peta Peruntukan Perkebunan Provinsi Jawa Timur .....	58
Gambar 2.11	Peta Peruntukan Hutan Produksi Provinsi Jawa Timur ...	59
Gambar 2.12	Peta Peruntukan Perikanan Budidaya Air Payau Provinsi Jawa Timur .....	60
Gambar 2.13	Peta Peruntukan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Provinsi Jawa Timur .....	64
Gambar 2.14	Peta Persebaran Kawasan Industri di Jawa Timur .....	68
Gambar 2.15	Peta Rawan Bencana Longsor .....	74
Gambar 2.16	Peta Rawan Bencana Gunung Api .....	77
Gambar 2.17	Lokasi Gempa Dibedakan Skala Modified Mercalli Intensity (MMI) .....	78
Gambar 2.18	Peta Rawan Bencana Tsunami .....	80
Gambar 2.19	Peta Rawan Bencana Kekeringan .....	83
Gambar 2.20	Perkembangan Kasus HIV/AIDS dan Jumlah Layanan Tes HIV per Tahun Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2016 .....	118
Gambar 2.21	Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Faktor Resiko Penderita .....	118

Gambar 2.22	Proporsi Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin Penderita .....	118
Gambar 2.23	Perkembangan Persentase CDR dan <i>Success Rate</i> TB ..	119